

**PERAN PEMERINTAH KOTA CILEGON  
DALAM MENGATASI DAMPAK SOSIAL  
ATAS PEMBANGUNAN PT. KRAKATAU POSCO  
di KECAMATAN CIWANDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi  
Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

Afifatun Nisa

NIM 6661090710

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG**

**2016**

## ABSTRAK

**AFIFATUN NISA, 6661090710.** Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam Mengatasi Dampak Sosial atas Pembangunan PT.krakatau Posco (Studi di Kecamatan Ciwandan). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Leo Agustino, Ph.D., Dosen Pembimbing II, Riny Handayani, M.Si.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, dampak sosial, pembangunan PT.Krakatau Posco

Pembangunan PT. Krakatau Posco menyebabkan adanya kegundahan bagi masyarakat Kecamatan Ciwandan, baik yang disebabkan dari segi ketegangan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco. Penelitian ini mengutip teori peran menurut Siagian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Analisis data menggunakan model Prasetya Irawan dengan mengumpulkan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan penyimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco belum optimal karena peran pemerintah dalam hal stabilisator, modernisator dan pelopor dianggap kurang, seperti prioritas tenaga lokal tidak terpenuhi, kurangnya Dinsos dan Disnaker memelopori persiapan daya saing global seperti IMTAK dan penguasaan pengetahuan masyarakat, pemberdayaan lebih kepada pelatihan keterampilan, dan informasi mengenai lowongan tenaga kerja lewat papan pengumuman yang ada di Disnaker. Meskipun peran pemerintah dalam hal inovator sudah relatif baik karena secara konsep pihak Krakatau Steel yang akan melakukan rekrutmen tenaga lokal, dikeluarkannya SK Walikota 300/Kep.145. Disbudpar/2014 Tentang Penutupan Penyelenggaraan Hiburan Malam dan dibuatnya mes khusus untuk WNA. Saran dalam penelitian ini yakni Disnaker memelopori pelatihan kerja dan sertifikasi untuk masyarakat Kota Cilegon, pemerintah terkait mengoptimalkan teknologi dan pelatihan aparatur setiap bulan, Disnaker memberikan sanksi yang tegas terhadap beberapa pelanggaran yang terjadi, mengoptimalkan pendidikan IMTAK dua minggu sekali.

## ABSTRACT

**AFIFATUN NISA, 6661090710.** Cilegon City Government's Role in overcoming the Social Impact on Development PT. Krakatau Posco in the subdistrict Ciwandan. Public Administration. Study program, social science and political science faculty. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1<sup>st</sup> advisor, Leo Agustino, Ph.D., 2<sup>nd</sup> advisor, Riny Handayani, M.Si.

Keywords: Role of Government, social impact, development PT. Krakatau Posco

The development PT. Krakatau Posco causes anxiety for people of District Ciwandan, either caused in terms of social tensions. The purpose of this study is to determine how the Cilegon government's role in overcoming social impact on the development of PT. Krakatau Posco. This study cites the theory of the role of government according to Siagian which is the qualitative-descriptive method. Data analysis using Prasetya Irawan's model that is the collection of raw data, transcript data, the manufacture of coding, categorization of data, temporary inference, triangulation, and the final inference. The result of research showed that the Cilegon government's role in overcoming social impact on the development of PT. Krakatau Posco is not yet optimal, because the government's role in stabilizer, modernizer, and pioneer is minus, as a priority locally are not met, the lack of Social Affairs and Manpower hindered the preparation of global competitiveness as IMTAK and mastery of the knowledge society, as empowerment on skills training, other side the announcement or information regarding employment vacancies through notice boards in Manpower. Nevertheless the role of government vacancies through notice relatively has not bad because conceptually the Krakatau Steel will recruit local workers, issuance Mayor SK 300/Kep.145. Disbudpar/2014 About closing of Evening Entertainment and the mess made specifically for foreigners. Suggestions this study spearheaded the Manpower job training and certification for Cilegon City community, relevant government optimizing the technology and the training of personnel every month, Manpower provides strict sanctions against several violations, optimizing education IMTAK two weeks.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AFIFATUN NISA

Nim : 6661090710

Fakultas/Program Studi : FISIP/ Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco di Kecamatan Ciwandan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2016



AFIFATUN NISA

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Afifatun Nisa  
NIM : 6661090710  
Judul : PERAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM  
Skripsi : MENGATASI DAMPAK SOSIAL ATAS  
PEMBANGUNAN PT. KRAKATAU POSCO DI  
KECAMATAN CIWANDAN

Serang, 10 Februari 2016

Skripsi ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Leo Agustino, Ph.D.  
NIP : 197408032003121001

Pembimbing II,

Riny Handayani, M.Si.  
NIP : 197601062006042007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Safari, S.Sos., M.Si.  
NIP : 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : AFIFATUN NISA  
NIM : 6661090710  
Judul Usulan Penelitian : PERAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM  
MENGATASI DAMPAK SOSIAL ATAS  
PEMILANGAN PT. KRAKATAU POSCO DI  
KECAMATAN CIWANDAN

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal  
28 Juni tahun 2016 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 28 Juni 2016

Ketua Penguji:

Listyaningsih, S. Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001



Anggota:

Dr. Ayuning Badiyati, MPPM  
NIP. 196905022005012001



Anggota:

Riny Handayani, M.Si  
NIP. 197601062006042007



Mengetahui,

  
Dekan FISIP UNTIRTA  
  
Dr. Agus Sufjari, M.Si  
NIP. 197108242005011002

  
Ketua Program Studi  
  
Listyaningsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

## CARI TAU APA YANG ALLAH MAU KEKITA

Kupersembahkan karya ku ini untuk kedua orangtua,  
kakak-kakakku, dan kelima adikku yang selalu mendoakan  
serta untuk semua orang yang berjuang gigih dalam menuntut  
ilmu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat sehat jasmani dan rohani, penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terimakasih yang terdalam penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dan do'anya yang memberikan semangat lebih untuk menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Peran Pemerintah Kota Cilegon terhadap dampak pembangunan dari PT Krakatau Posco”. Dalam Penyusunan skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Untuk itu, peneliti sampaikan rasa terima kasih kepada kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;



4. Imam Mukhrohman, S.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Listyaningsih, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Riswand Ph.D, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Ibu Arenawati, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan saran selama perkuliahan;
9. Bapak Leo Agustino, Ph.D, Dosen Pembimbing I skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang tiada terkira selama proses penyusunan skripsi;
10. Ibu Riny Handayani, M.Si., Dosen Pembimbing II skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang tiada terkira selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi;
11. Semua dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih atas ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
12. Kepala Bidang Prasarana dan pengembangan wilayah Bappeda Kota Cilegon, semua pegawai Kominfo Pemerintah Kota Cilegon, Kepala Bidang data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Terimakasih atas kesediaannya membantu dan memberikan informasi dalam proses penelitian selama ini

13. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Ka BLK Kota Cilegon, Kabid Pariwisata Disbudpar Kota Cilegon, Terimakasih atas kesediaannya membantu dan memberikan informasi selama proses penyusunan skripsi;
14. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Kota Cilegon dan Kabid Kominfo Imigrasi Kota Cilegon yang telah mengizinkan dan memberikan peneliti data dalam proses penelitian ini;
15. Sekretaris Dinas Sosial Kota Cilegon, Sekretaris Kecamatan Ciwandan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, terimakasih atas kesediaannya membantu dan memberikan informasi selama proses penelitian.
16. Masyarakat di Kecamatan Ciwandan, terimakasih atas kesediaannya membantu selama proses penelitian
17. PT. Angkasa Pura II yang sempat menjadi cahaya dikala gelap selama tiga tahun awal perkuliahan
18. Kedua orang tuaku
19. Kakak (Ufuwan & Euis) dan kelima adik-adikku tercinta, (Aini, Faiz, Asep, Iis dan Iyos) yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
20. Sahabat-sahabat tersayang, Bayinah, Mukarromatun Nisa, Mariah, Siti Rohmah Nurjanah. Terimakasih atas persahabatan, bantuan, dan motivasi yang begitu besar kepada peneliti selama proses perkuliahan, khususnya selama proses penelitian.
21. Sahabat seperjuangan, Asep, Hany, Rizki, Wahyu, dan Wenny,terimakasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan dan menjadi tempat bertanya bagi peneliti seputar penelitian.

22. Saudara-saudara seperjuangan FoSMaI Fisip, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, perjuangan, dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
23. Saudara-saudara seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2009, khususnya kelas C Reguler, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, perjuangan, dan perkuliahan;
24. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Tidak lupa juga peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan Skripsi ini. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Serang, Februari 2016

Afifatun Nisa

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... v**

**DAFTAR TABEL..... viii**

**DAFTAR GAMBAR..... ix**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2 Identifikasi Masalah dan pembatasan Masalah ..... 14

1.3 Batasan Masalah ..... 14

1.4 Perumusan Masalah ..... 14

1.5 Tujuan Penelitian..... 15

1.6 Manfaat Penelitian ..... 15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran ..... 17

2.1.2 Konsep Koordinasi ..... 26

2.1.3 Konsep Pembangunan..... 30

2.1.3.1 Analisis Dampak Pembangunan .....	31
2.1.3.2 Indikator Keberhasilan Pembangunan .....	32
2.1.3.3 Pemberdayaan Masyarakat .....	36
2.1.3.4 Indikator Keberdayaan .....	40
2.1.3.5 Perubahan Sosial .....	41
2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
2.3 Kerangka Berpikir .....	45
2.4 Asumsi Dasar .....	46

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	47
3.2 Ruang Lingkup .....	48
3.3 Lokasi Penelitian .....	48
3.4 Variabel Penelitian	
3.4.1 Definisi Konsep .....	49
3.4.2 Definisi Operasional .....	49
3.5 Instrumen Penelitian .....	51
3.6 Informan Penelitian .....	52
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	58
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data .....	60
3.10 Jadwal Penelitian .....	61

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Cilegon .....	63
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Ciwandan .....	64
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Cilegon .....	65
4.1.4 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja .....	70
4.2 Deskripsi Data	
4.2.1 Daftar Informan Penelitian .....	71
4.2.2 Deskripsi Data penelitian .....	72
4.3 Pembahasan .....	109

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	130
5.2 Saran .....	131

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>x</b>
----------------------------	----------

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pendapatan Domestik Bruto Daerah .....	3
Tabel 1.2	Kewarganegaraan Asing yang bekerja di Kota Cilegon .....	6
Tabel 1.3	Jumlah PSK Kota Cilegon .....	7
Tabel 1.4	Penyelenggaraan Hiburan Karaoke.....	8
Tabel 1.5	Jumlah Tenaga Kerja PT Krakatau Posco .....	11
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	54
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara.....	57
Tabel 3.3	Rencana Kegiatan Penelitian.....	68
Tabel 4.1	Kodefikasi <i>Key Informan</i> Penelitian .....	71
Tabel 4.2	Kodefikasi <i>Secondary Informan</i> Penelitian .....	72
Tabel 4.3	Lowongan Pekerjaan PT. KP Februari-Juli 2014 .....	77
Tabel 4.4	Ijin Tinggal Terbatas berdasarkan Sponsor .....	84
Tabel 4.5	Daftar Kewarganegaraan Asing yang bekerja di Kota Cilegon .....	84
Tabel 4.6	Hasil Penilaian atas Dimensi Stabilisator .....	114
Tabel 4.7	Hasil Penilaian atas Dimensi Inovator .....	120
Tabel 4.8	Hasil Penilaian atas Dimensi .....	125
Tabel 4.9	Pembahasan dan Hasil Temuan Lapangan .....	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian.....	46
Gambar 3.1 Proses Analisis Data.....	58
Gambar 4.1 Demo Kubangsari .....	86
Gambar 4.2 Berdirinya Bangunan Ruko .....	87





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan perkapita sering kali menjadi tolak ukur atas pembangunan suatu bangsa, hal tersebut dikarenakan istilah pembangunan juga belum mampu menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi (Listiyarningsih, 2014:44) seperti yang paparkan oleh Todaro (2003) dimana pembangunan tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan

mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah terdapat pendapatan daerah, diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Kota Cilegon dalam perkembangan telah memperlihatkan kemajuan yang pesat diberbagai bidang baik bidang fisik, sosial maupun ekonomi. hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi perlunya memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kota Cilegon merupakan kawasan industri, hal tersebut dapat terlihat pada kontribusi Industri pengolahan terhadap Pendapatan Daerah, sebagaimana tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (Harga Konstant )**  
**Kota Cilegon**

sektor/lapangan usaha	Kontribusi PDRB (persen)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	2,52	2,42	2,3	1,71	1,61
Pertambangan	0,09	0,09	0,09	0,07	0,13
Industri Pengolahan	62,99	61,99	60,57	72,47	72,47
Listrik dan Air bersih	8,76	8,26	8,01	5,57	5,38
Bangunan	0,45	0,45	0,45	0,33	0,33
Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,77	14,00	15,42	11,45	11,73
Angkutan/Komunikasi	8,24	8,38	8,41	5,07	4,98
Bank/Keu/Perum	2,76	2,89	3,08	2,22	2,24
Jasa	1,43	1,52	1,64	1,12	1,13
Total	100	100	100	100	100
Laju Pertumbuhan	-	5	5	48	7

(Sumber: <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/ekonomipdrb.php?ia=3672&is=3>,  
 jum'at 17 mei 2013)

Dari tabel 1.1 Industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB. Dimana 70%an PDRB disumbang oleh Industri pengolahan. Pada tahun 2007 hingga 2011 mengalami kenaikan hampir 10 % hanya pada rentang 5 tahun, yang sebelumnya berkontribusi sebesar 62,99 menjadi 72,47 %, sedangkan sektor yang lain hampir sebagian besar mengalami penurunan pada kontribusi PDRB. Sektor industri menjadi prioritas, hal tersebut tertuang dalam Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 yaitu “Masyarakat Cilegon Sejahtera melalui Daya Dukung Industri, Perdagangan dan Jasa”.

Visi pembangunan Kota Cilegon tahun 2011-2015 adalah Masyarakat Cilegon sejahtera melalui daya dukung industri, perdagangan dan jasa. Salah satu misi Kota Cilegon adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui daya dukung sektor

industri, perdagangan dan jasa. Sehingga diharapkan Kota Cilegon menjadi sejahtera dengan ke tiga daya dukung tersebut.

PT Krakatau Steel merupakan industri yang melingkupi pabrik-pabrik baja hilir bersekala besar. Tujuan dari pendirian PT Krakatau Steel yaitu untuk membangun industri baja nasional yang mampu berperan sebagai salah satu unsur utama penunjang pertumbuhan industri baja pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Tujuan idiil yang harus dicapai oleh PT Krakatau Steel adalah menjadi salah satu pusat keunggulan dibidang industri baja, dalam arti bisa menjadi tulang punggung dalam rangka memenuhi kebutuhan besi dan baja nasional dengan kemampuan sendiri.

Perusahaan baja POSCO (Pohang Steel Cooperation) yang didirikan tahun 1968, telah bertumbuh menjadi perusahaan papan atas di industri baja dunia dalam tempo tiga decade, POSCO memproduksi sekitar 28 juta ton baja setiap tahunnya dan digunakan di lebih dari 60 negara. Perusahaan ini telah menggunakan teknologi otomatis pada pabrik-pabrik bajanya yang berlokasi di kota pelabuhan Pohang dan Gwangyang di Korea Selatan, sebagai jaringan produksi berbagai jenis produk termasuk *hot rolled coil, cold rolled sheet, plate, wire rod, electrical steel, dan stainless steel*.

Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan baja nasional maupun internasional, maka kedua perusahaan baja ini bermitra dan mendirikan sebuah Industri Baja Terpadu dengan nama PT Krakatau Posco. Industri ini bergerak dalam bidang *integrated steel plant*.

Pembangunan industri PT. Krakatau Posco akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Kota Cilegon. Dari segi ekonomi akan memberikan stimulan bagi perekonomian Kota Cilegon dan Banten, baik dalam menciptakan lapangan kerja, kesempatan-kesempatan usaha baru maupun meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Surat BKPM Nomor 231 /1/IP/PMA/2010 Pembangunan PT. Krakatau Posco diperkirakan akan memberikan dampak positif dengan Nilai Investasi pembangunan untuk tahap pertama sebesar US\$ 2.844.000.000,00 dengan total investasi mencapai 6 USD dan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.146 dari 1.717 laki-laki dan 429 perempuan.

PT. Krakatau Posco tidak hanya memberikan perubahan ekonomi saja pada Kota Cilegon, namun menimbulkan perubahan dari segi kependudukan, sosial budaya maupun lingkungan hidup. Permasalahan sosial Pada segi kependudukan mulai banyaknya penduduk asing yang tinggal di Kota Cilegon, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Kewarganegaraan Asing**  
**yang bekerja Di Kota Cilegon**

No.	Nama Negara	2012	Jan 2013-Mart 2014
1	Amerika Serikat	2	2
2	Argentina	-	2
3	Australia	-	2
4	Austria	42	20
5	Belanda	-	1
6	Belgia	5	7
7	Britania Raya	-	2
8	China	9	390
9	Filipina	11	31
10	India	36	114
11	Inggris	12	5
12	Iran, Republik Islam	-	3
13	Italia	1	12
14	Jepang	141	326
15	Jerman	16	40
16	<b>Korea Selatan</b>	<b>447</b>	<b>1.342</b>
17	Kroasia	1	-
18	Malaysia	14	50
19	Mesir	-	2
20	Perancis	2	2
21	Polandia	9	2
22	Republik Ceko	-	1
23	Rumania	-	4
24	Rusia	7	7
25	Singapura	7	11
26	Slovenia	-	2
27	Spanyol	-	1
28	Taiwan	3	23
29	Thailand	3	5
30	Turki	-	16
31	Ukraina	1	5
32	Vietnam	-	9
<b>TOTAL</b>		<b>769</b>	<b>2439</b>

(Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2014)

Dari tabel 1.2 Korea Selatan merupakan Jumlah warga terbanyak yaitu 447 pada tahun 2012 dan melonjak menjadi 1.342 orang hingga pada 13 Maret 2014 dibandingkan warga berkebangsaan lain. Hal tersebut dapat dikarenakan PT. Krakatau Posco yang 70% sahamnya dipegang oleh Pohang Iron Steel Company

Korea Selatan (Posco). Sehingga adanya kekhawatiran perubahan sosial budaya dengan adanya kebijakan warga negara asing yang tinggal berbaur dengan penduduk setempat (Wawancara dengan tokoh pemuda Cigading, Mukhlis, link. Kelurahan Tegal Ratu Kec. Ciwandan, pada 11 September 2014 pukul 14.40 WIB). Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Sabtu, 12 April 2014, 15.20 WIB dengan sopir Taxi, bahwa sopir taxi sering mendapatkan penumpang Wanita Tuna Susila dan yang memberikan biaya transportasi Taxi tersebut adalah warga negara Korea, hal ini membuktikan keberadaan warga negara asing terutama warga negara Korea di Kota Cilegon memberikan dampak moral pada masyarakat Kota Cilegon. Meskipun secara statistik jumlah PSK hampir semakin menurun, seperti data berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pekerja Seks Komersial Kota Cilegon**

Kecamatan	Tahun				
	2009	2010	2011	2013	2014
Ciwandan	-	-	-	8	8
Citangkil	-	9	9	1	1
Pulomerak	89	185	160	11	11
Purwakarta	-	-	-	8	8
Grogol	56	-	-	2	2
Cilegon	1	-	-	1	1
Jombang	-	15	15	9	9
Cibeber	-	-	-	-	-

(Sumber: diolah oleh peneliti dari Cilegon Dalam Angka)



Karaoke sebagai salah satu sarana hiburan dikala jenuh akan rutinitas menjadi alternatif, sehingga mulainya bermunculan beberapa pusat lipuran di Kota Cilegon.

**Tabel 1.4**  
**Penyelenggaraan Hiburan Karaoke**

No	Nama Perusahaan	Nomor SIUK
1	Hana Restoran	556.1/914/Disperindag/2001
2	Kenkoo Restoran	556.1/Kep.21/XI/Bidpar/2009
3	Mandiri Restoran	556.1/193-SK/Bidpar/2013
4	Planet Restoran	556.1/37/Bidpar/2011
5	Premiere Restoran	556.1/18/Bidpar/2013
6	Vizta Nusantara	556.1/21/Bidpar/2009
7	Sombrero (Restoran Meksiko)	55.1/141-26/DBP/VI/2009
8	Shatsuki Restoran	556.1/1841/SIUK/2001
9	Rumah makan Evann	556.1/27/Bidpar/2013
10	PT. Nano Food Indonesia	556.1/624-SK/Bidpar/2013
11	Grand Krakatau Hotel	556.1/13-SIUK/DISBUDPAR/2010
12	Merpati Hotel	556.1/142-SIUK/DISBUDPAR/2009
13	New LM Hotel	556.1/25/XII/PAR/2008
14	Regent Hotel	556.1/205/SIUK/2002
15	Surabaya Ismi Hotel	556.1/917/DISPERINDAG/2001
16	Rockystar Family	556.1/16/Bidpar/2013
17	Rocky Imperium Makmur	556.1/24/Bidpar/2013
18	Dynastie	556.1/34/Bidpar/2011
19	The Royal Krakatau Hotel	556.1/10-SIUK/Bidpar/2011
20	Bintang laguna	556.1/014/VIII/DISPERINDAG/2005
21	Empat mata	-
22	Parahyiangan	-
23	Family	-
24	Ojo Lali	-
25	Bole Bole	-
26	Nagoya	-
27	Kumhwa	-
28	Lafagan	-
29	Mix master	-

(Sumber: Diolah dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon tahun 2014)

Dari Tabel 1.4 di atas, pada tahun 2013 berdirinya 6 tempat usaha karaoke dengan 9 yang belum memiliki izin. Munculnya beberapa tempat hiburan seperti karaoke tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan sekaligus berdampak sosial. Seperti dikarenakan banyaknya restoran yang tidak sesuai fungsinya, yaitu dijadikan tempat prostitusi. (<http://www.nusationews.co.vu/2014/03/prostitusi-karaoke-berkedok-restoran.html> diakses pada rabu, 9 Juli 2014 pukul 10.45 wib).

Pemerintah yang selaku modernisator, memang memiliki peran untuk menciptakan negara Indonesia menjadi modern yang dalam hal ini lingkup lebih kecil, yaitu Kota Cilegon dengan cara Industrialisasi. Adanya PT. Krakatau Posco memicu industri-industri bermunculan, yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial di atas. Pemerintah yang selaku modernisator semestinya tidak hanya memodernkan Kota Cilegon, namun dengan tidak menghilangkan jati diri sosial budayanya.

Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan Pemerintah Pusat dalam pengembangan industri baja di Indonesia, Pemerintah Kota Cilegon mendukung *Joint Venture* antara PT. Krakatau Steel dengan Pohang Iron Steel Company (Posco), (Wawancara dengan Kepala Bidang Prasarana dan pengembangan wilayah Bappeda, Sabri, pada 03 Maret 2014 pukul 12.20 WIB). Kota Cilegon yang merupakan daerah otonom, diberikan wewenang dalam mengurus rumah tangganya, termasuk dalam mengelola permasalahan yang disebabkan adanya pembangunan PT. KP (Krakatau Posco). Dari pengamatan awal, maka peneliti menemukan permasalahan sebagai berikut:

Pertama, minimnya pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang aman sehingga adanya keresahan masyarakat karena dengan keberadaan warga negara asing semakin marak pula prostitusi di Kota Cilegon. Hal ini berdasarkan pernyataan supir Taxi bahwa sering mendapatkan penumpang PSK, yang memberikan biaya transportasi Taxi tersebut adalah warga negara Korea (Wawancara dengan sopir Taxi Bluebird pada Sabtu, 12 April 2014, 15.20 WIB).

Kedua, minimnya persiapan pemerintah terhadap keimanan dan ketakwaan masyarakat. Sehingga dengan adanya WNA yang tinggal berbaur di pemukiman penduduk lokal, menimbulkan keresahan, hal tersebut dikhawatirkan penduduk lokal yang tidak dapat membentengi diri akan terjadi pencampuran budaya secara negatif (Wawancara dengan tokoh pemuda Cigading, Mukhlis, link.Kel.Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan, pada 11 September 2014 pukul 14.40 WIB). Sehingga Pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai stabilisator perlu menciptakan lingkungan sosial yang nyaman, dan perlunya kesiapan agar tidak terjadi asimiliasi, agar kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik dan kegiatan-kegiatan akan berjalan dengan lancar namun dengan tidak meninggalkan jati diri dari Kota Cilegon itu sendiri.

Ketiga, Kurangnya komunikasi dari dinas tenaga kerja mengenai ketenaga kerjaan. Dimana pemerintah Kota Cilegon yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon kurang tegas dalam mendapatkan informasi lowongan apa yang dibutuhkan oleh PT. Krakatau Posco, Sehingga pemerintah Kota Cilegon belum dapat menyiapkan *skill* yang dibutuhkan (Wawancara dengan

Kepala Bidang Penempatan tenaga kerja, Dudus S. Maman, pada 27 Juni 2013 pukul 14.30 WIB), selain itu pihak Dinas tenaga kerja merasa hal tersebut diluar kehendaknya dan tidak dapat dipaksakan karena perusahaan atau PT. Krakatau Posco tersebut bukan miliknya (wawancara dengan fungsional pengantar kerja Dinas tenaga kerja Kota Cilegon, Chandra, pada 02 Juli 2014 pukul 12.30 WIB). Adanya kecemburuan tersebut dikarenakan sedikitnya jumlah karyawan lokal yang bekerja di Krakatau Posco sedangkan yang berasal dari luar Kota Cilegon lebih dominan (Wawancara dengan penduduk Link. Cigading Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan, Zenal, pada minggu, 09 juni 2013 16.03 WIB.) Pada data kumulatif pencari kerja dan pekerja Kota Cilegon dari Disnaker Kota Cilegon, pegawai yang bekerja di PT. Krakatau Posco per Mei 2013 berjumlah 23 orang saja, sedangkan jumlah pencari kerja di Cilegon berjumlah 12.680 jiwa.

**Tabel 1.5**

**Jumlah Tenaga Kerja PT. Krakatau Posco**

Uraian	Jiwa
Lokal (Kumulatif per mei 2013)	23
WNA	290
Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan	388

(Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber, 2014)

Jika melihat Tabel 1.5 adanya kesenjangan dari segi kuantitas antara warga lokal (Cilegon) dengan Warga Negara Asing (WNA), dimana pekerja dari Cilegon sendiri berjumlah 23 orang sedangkan Warga Negara Asing sebanyak 290 orang. Sedangkan dalam melaksanakan hubungan industrial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah

memiliki fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sehingga adanya kesenjangan antara pribumi dengan warga asing memerlukan peran Pemerintah Kota Cilegon untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Adapun *locus* penelitian ini berada di Kecamatan Ciwandan yang mana PT. Krakatau Posco berdiri merupakan jumlah keluarga sejahtera terbanyak untuk kategori sangat miskin di Kota Cilegon. berdasarkan data Cilegon Dalam Angka 2013, jumlah keluarga sejahtera di Kecamatan Ciwandan kategori Hampir miskin 695, miskin 932, dan sangat Miskin 1.019. Padahal jika merujuk pada misi Kota Cilegon adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui daya dukung sektor industri, perdagangan dan jasa. Sehingga diperlukan peraturan yang lebih jelas, maupun inovasi baru dari pemerintah kota Cilegon dalam penciptaan *Skill* bagi pribumi agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya terjadi ketidak stabilan sosial suatu wilayah maupun ketimpangan sosial.

Masalah sosial di atas tidak terlepas dari dampak industrialisasi, sehingga perlu adanya peran serta pemerintah, karena proses pembangunan memang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, meskipun demikian pemerintah memainkan peranan yang lebih dominan dalam proses pembangunan nasional, dimana menurut Siagian (listyaningsih, 2014:70) dalam rangka pembangunan nasional pemerintah

memiliki peranan sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor. Pemerintah yang telah dimandatkan oleh warga untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan perkotaan diharapkan memiliki peran untuk mewujudkan lingkungan layak huni. Adanya konsep *Green City*, *Livable city*, dan *Cybernology* diharapkan adanya peran pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang baik.

Minimnya peran pemerintah sehingga masyarakat menjadi gundah, yang menyebabkan masyarakat di wilayah Cilegon sering melakukan demo terkait permasalahan yang timbul akibat pembangunan PT. Krakatau Posco, salah satunya disebabkan lingkungan sosial, sehingga perlu adanya peran Pemerintah Kota Cilegon untuk menangani permasalahan yang terjadi. Hal itu dikarenakan pemerintah sebagai stabilisator maupun *disturbance handle* yang pada kenyataannya kurang berperan, sehingga permasalahan yang terjadi terkait dampak pembangunan Krakatau Posco kurang tertangani. Dengan demikian negara mempunyai kewajiban mengelola segala bentuk sumber daya yang ada secara optimal dengan tetap memperhitungkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tentunya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pencapaian kesejahteraan dan memperoleh lingkungan sosial yang memadai maupun tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari perekonomian nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Peran pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi**

## **dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco di Kecamatan Ciwandan”**

### **1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang aman sehingga adanya keresahan masyarakat karena dengan keberadaan warga negara asing semakin marak pula prostitusi di Kota Cilegon
2. Minimnya persiapan pemerintah terhadap keimanan dan ketakwaan masyarakat
3. Kurangnya komunikasi dari dinas tenaga kerja mengenai ketenaga kerjaan sehingga adanya kesenjangan

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mempermudah peneliti dalam proses kajian penelitian dan memiliki keterbatasan, oleh karena itu, dampak sosial dalam penelitian ini adalah, ketenagakerjaan, dan ketegangan sosial.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi dan Pembatasan Masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana peran Pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco?”

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Kota Cilegon terhadap dampak Sosial atas pembangunan dari PT. Krakatau Posco.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **i. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi peneliti.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan tersendiri bagi perkembangan teori-teori ilmu sosial khususnya mata kuliah administrasi pembangunan.

### **ii. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti mengenai bagaimana kondisi sosial Kota Cilegon dengan adanya pembangunan PT. Krakatau Posco dan peran pemerintah.

#### **2. Bagi Instansi**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pentingnya peranan Pemerintah Kota Cilegon, dan PT. Krakatau Posco.

#### **3. Bagi Pihak lain**

Pihak lain di sini bisa masyarakat, dosen maupun mahasiswa lainnya serta pihak-pihak terkait. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kondisi nyata yang terjadi di lapangan



dan dapat dijadikan sebagai masukan positif bagi semua pihak terkait hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan kajian berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep maka peneliti akan memiliki konsep penelitian yang jelas.

Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti dalam melakukan analisis terhadap masalah sehingga dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang dirumuskan. Oleh karena itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu:

##### **2.1.1 Teori Peran**

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Status adalah kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut Tangkilisan (2007:43). Hal ini senada dengan pendapat Soekanto (2003:217) yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Stogdill (Sarwono,2002:203) konsep peran adalah prakiraan

tentang perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Suatu organisasi dalam menjalankan perannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi organisasi sehingga peran yang dimainkan oleh lembaga atau organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal atau tidak. menurut Blakely dalam Kuncoro (2004:113). Dalam pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator, dan stimulator

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

### 3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat dilakukan dengan pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan perbaikan peraturan.

### 4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan berusaha mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi kemungkinan terjadinya perkembangan. Disamping itu, pemerintah daerah harus menyediakan kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh swasta, dan selanjutnya pemerintah bertindak sebagai pembimbing dan pendorong pembangunan sesuai dengan falsafah manajemen Jawa yaitu bahwa menurut Suparmoko (2002:109) pemerintah harus melaksanakan hal-hal berikut: *ing ngarso sung tulado, ing madyo mangunkarso* dan *Tut wuri handayani* (di depan pemerintah memberikan contoh, di jalan pemerintah memberikan rencana dan jalan, serta di belakang pemerintah mengawasi dan ngemong)

Proses pembangunan memang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah memainkan peranan yang lebih dominan dalam proses pembangunan nasional. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran Menurut Siagian

(2009:142), dalam rangka pembangunan nasional pemerintah memiliki peranan sebagai berikut:

1. Stabilisator

Salah satu ciri negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu nalar yang sangat sederhana saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

(a) Stabilisator di bidang politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar negeri.

(b) Stabilitas ekonomi adalah iklim yang memungkinkan prekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga:

- a. Ekonomi tumbuh secara wajar,
- b. Suku bunga yang tidak tinggi,
- c. Rendahnya inflasi,
- d. Kesempatan usaha semakin luas,
- e. Proses industrialisasi berlangsung dengan baik,
- f. Kebijakan moneter dengan fiscal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

(c) Stabilitas sosial budaya yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembangunan dibidang sosial budaya ialah menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya.

## 2. Inovator

Inovasi merupakan salah satu produk dari kreatifitas berupa temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berfikir baru. Terdapat tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam melakukan inovasi yaitu,

- (a) Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu, melalui perubahan sistem kerja yang cepat, tepat, sederhana (tidak berbelit-belit), transparan, akuntabel, dan sebagainya.
- (b) Inovasi yang sifatnya konseptual, dengan menjadikan pemerintah sebagai sumber ide-ide baru. Inovasi system, prosedur dan metode kerja yang mengarah pada “problem solving” dan “action oriented”, artinya pemerintah bersedia meneliti dan mendiagnosa mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga terapi yang digunakan tidak hanya mampu mengobati gejala-gejala yang timbul, tetapi juga akan menghilangkan faktor-faktor penyebab sampai keakar masalahnya.
- (c) Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Dalam menyelesaikan masalah dan sikap, aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pendekatan legalistik

### 3. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, artinya negara yang kuat, mandiri dan sejajar dengan negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri pada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan dari negara lain secara de jure. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan:

- (a) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (b) Kemampuan dan kemahiran manajerial,
- (c) Kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi,
- (d) Sistem pendidikan nasional yang handal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif,
- (e) Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis,
- (f) Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan,
- (g) Rakyat yang diperdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “nasibnya”,
- (h) Kesiapan mengambil resiko,
- (i) Orientasi masa depan,
- (j) Bersedia menerima perubahan.

#### 4. Pelopor

Pemerintah berperan sebagai pelopor artinya pemerintah harus mampu menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Pentingnya peranan dimainkan secara efektif karena dengan kepeloporan tersebut warga negara akan relatif mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berfikir, cara bertindak, dan cara bekerjanya yang pada gilirannya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.

#### 5. Peran selaku pelaksana sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terjadi berbagai kegiatan yang tidak dapat diserahkan kepada swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Dari pengertian peran diatas, maka peran bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun masyarakat juga berperan dalam pembangunan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) dari 5 (lima) indikator dari peran pemerintah yang ditawarkan oleh Siagian. Sehingga keempat indikator tersebut dapat mewakili pemerintah dalam menjalankan perannya. karena dengan stabilisator gejolak maupun ketegangan yang akan maupun sedang terjadi dapat



mereda, inovator juga sebagai bentuk pemecahan masalah dan aksinya dalam menciptakan birokrasi yang baik dan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik. Modernisator juga diperlukan untuk menciptakan suatu negara yang dalam konteks ini adalah kota yang modern. Dari kesemuanya tersebut diperlukan pemerintah sebagai pelopor untuk mencapai kesejahteraan sosial yang diinginkan. Uraian lebih lanjut lihat gambar 2.2

Menurut Siagian (Sjafari, 2007:151) peran serta adalah keterlibatan langsung dari warga tanpa adanya dorongan yang kuat dari pihak luar. Dalam hal ini peran serta yang diharapkan tumbuh dan berkembang dari seluruh warga masyarakat hendaknya meliputi:

1. Peran serta dalam pemikiran, misalnya dalam identifikasi masalah-masalah yang perlu segera dibangun, membuat perencanaan pembangunan, dan sebagainya,
2. Peran serta dalam perhimpunan dana, misalnya memberikan sumbangan uang dan bahan-bahan guna pembangunan,
3. Peran serta dalam penyelesaian tenaga, misalnya turut serta dalam kegiatan kerja bakti melaksanakan pembangunan,
4. Peran serta menikmati hasil pembangunan, misalnya bila seorang penyuluh pertanian menganjurkan penanaman padi jenis unggul IR 26, maka penyuluh harus mau makan nasi jenis anjuran itu.

James Rosenau (1990) dalam jurnal *political Psychology*, Vol. 17, No. 4, 1996 mendeskripsikan peran yaitu:

*“attitudinal and behavioral expectations that those who relate to its occupant have of the occupant and the expectations that the occupant has*

*of himself or herself" in given situations (rosenau, 1990, p. 220; see also baarnett, 1993; Cottam, 1986; Holsti, 1970; Walker, 1987; and Wendt, 1992) roles then are synthesized phenomena, created by the combination of an actor's subjective"*

Dari definisi Rosenau mengenai peran, merupakan mempersatukan kejadian, menciptakan kombinasi dari beberapa subjek pelaku. Cadwallader dalam Sadyohutomo (2008:17) memaparkan bahwa peran pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah antara lain dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyedia service dan barang publik (*supplier of public goods and services*)
2. Mengatur dan memfasilitasi (*regulating and facilitating*)
3. Sebagai *social engineering*
4. Sebagai *arbiter*

Dapat disimpulkan dari keempat peran pemerintah yang dikemukakan oleh Cadwallader di atas bahwa pemerintah memiliki peran dari segala lini kehidupan dalam masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini memiliki peranannya pada tiap tataran di dalam masyarakat. keempat peranan yang dikemukakan oleh Cadwallader tersebut masuk dalam kajian ini. Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat memosisikan diri sebagai *policy maker, stabilisator, mediator, regulator*, Sjafari (2007:200) dari semua kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan. Tingkat peranan pemerintah terhadap perkembangan sosial-ekonomi yang dikemukakan Irving Sverdlow dalam Tjokroamindjojo (1984:26-28) yaitu:

1. *Operation* atau pelaksana operasi sendiri oleh pemerintah.  
Disini pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan sosial ekonomi. misalnya pembuatan jalan, pembangunan pabrik, pengurusan langsung produksi dan distribusi listrik, pembangunan dan operasi rumah sakit, dan lain-lain.
2. *Direc Control* atau pengendalian secara langsung.  
Peranan pemerintah juga dapat diberikan dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengendalian secara langsung. Hal

ini misalkan dilakukan melalui pemberian izin, penentuan kuota, tarif, dan lain-lain guna menggerakkan kegiatan masyarakat.

3. *Indirec Control* atau pengendalian secara tidak langsung.

Pemerintah dapat pula melakukan campur tangan dalam rangka mengarahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui penggunaan berbagai ketentuan, kriteria yang merupakan aturan dan kondisi (rules and conditions) yang harus dilaksanakan atau ditaati.

4. *Direc influence* atau pemengaruhan secara langsung.

Dalam hal ini pemerintah melakukan peranan dengan mempengaruhi secara langsung atau memberikan prajoyana (motivasi) supaya masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi tertentu. Contoh dalam hal ini misalnya adalah pemengaruhan supaya masyarakat gemar menabung. Cara pemengaruhan dapat dilakukan melalui pemberian perangsang-perangsang tertentu.

5. *Indirec influence* atau pemengaruhan secara tidak langsung.

Ini adalah peran pemerintah yang paling ringan dalam mengarahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Cara yang dipakai hanya memberi informasi/penerangan sehingga orang bersedia mengikuti kehendak atau petunjuk pemerintah.

Dari pernyataan di atas, maka pemerintah dalam melakukan peranannya dengan cara mengendalikan atau dengan cara mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung.

### 2.1.2 Konsep Koordinasi

Koordinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi juga menurut Syafrudin (1993:268) dalam Pasawahan (2009) dapat dimaknai: “Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”

sedangkan Leonard D. White dalam Sutarto (2006:141) koordinasi yaitu:

*“Coordination is the adjustmen of the parts to each othr, and of the movement and operation of part in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole” (koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain,dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan.)*

Jadi koordinasi dapat juga dimaknai suatu kumpulan bagian yang saling memberi sehingga menghasilkan secara maksimal. Koordinasi menurut Roger C. Heimer dalam Sutarto (2006:142)koordinasi yaitu:

*“Coordination is indispensible to the accumulation of the efforts of the many in order to effectuate the overall purpose. Coordination mak possible a uniting of the mental and physical efforts in such a manner as to create a surplus of coordinated effort over the sum of the individual effort of the participants” (Koordinasi harus ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar supaya pencapaian tujuan efektif. Koordinasi memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap karena menciptakan kelebihan usaha yang dikoordinasikan pada sejumlah usaha individu dari para peserta.)*

Sedangkan menurut Stoner dalam Djatmiko (2008: 62) koordinasi adalah Proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Koordinasi merupakan centripetal force atau kekuatan memusat di dalam administrasi. Pentingnya koordinasi dalam administrasi dapat ditandai dari pendapat barnard dalam Pasawahan (2009; lihat juga Suganda,1991:22) yang mengatakan bahwa *”The executive art is nine-tenths including those who have authority to use it in taking pertinent action.”* Selanjutnya kata Barnard, koordinasi yang dapat dicapai melalui leadership merupakan faktor yang paling vital bagi kelestarian organisasi. Karena itulah ia merumuskan leadership sebagai kualitas daripada sifat dan tanggung jawab yang

dapat mengikat, mempersatukan kehendak-kehendak daripada orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan di luar cita-citanya sendiri. Kegiatan untuk mencapai keselarasan dapat ditandai dari pendapat E.F.L. Brech yang mengatakan bahwa:

*“Balancing and keeping the team together, by ensuring a suitable allocation of working activities to the various members, and seeing that these are performed with due harmony among the members themselves”*

Jadi koordinasi dapat dimaknai menseimbangkan dan menggerakkan tim dengan memberikan alokasi kegiatan bekerja pada masing-masing anggota agar dilaksanakan dengan keselarasan pada para anggota sendiri. Dengan adanya keseimbangan, mengeratkan tim, pembagian alokasi kerja pada tim, terciptalah keselarasan. Menurut Sugandha (1991:47-48) dalam Pasawahan (2009), ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain :

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
5. Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
7. Adanya saling hormat terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Menurut Mary Parker Follet dalam Pasawahan (2009; lihat juga Suryawikarta,1996:3), koordinasi akhirnya bukan suatu kegiatan yang dilakukan

hanya oleh pemegang peranan khusus, tetapi merupakan proses yang berlangsung, yang melibatkan setiap orang dalam situasi kerja. Oleh karena itu Follet kurang peduli dengan cara-cara yang instrumental mengenai bagaimana melakukan koordinasi, tetapi lebih baik menjelaskan apa sebenarnya koordinasi itu. Secara konsisten follet mengabaikan keharusan-keharusan instrumental, dia lebih suka menjelaskan apa yang terlibat dalam proses koordinasi. Variasi dalam menentukan kebutuhan akan koordinasi menurut Thompson dalam Djatmiko (2008:63) yaitu:

1. Ketergantungan yang dikelompokkan (*Pooled interdependence*).
2. Ketergantungan sekuensial (*Sequential interdependence*).
3. Ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*).

Prinsip koordinasi akan efektif jika telah disinkronkan, diseimbangkan maupun diarahkan. Yang dinyatakan Herbert G. Hicks dalam Sutarto (2006:145) yaitu:

*“The principle of coordination explain the effective organization performance is achieved when all person and resources are synchronized, balanced, and given direction” (prinsip koordinasi menerangkan bahwa pelaksanaan organisasi itu efektif apabila semua orang dan sumber disinkronkan, diseimbangkan, dan diberikan pengarahannya.)*

Jadi koordinasi adalah suatu usaha, rangkaian kegiatan pada setiap anggota dengan cara menyeimbangkan, mengarahkan agar tercipta hasil akhir yang selaras. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya.

### 2.1.3 Konsep Pembangunan

Meier Dalam Kuncoro 2004:63 , pembangunan yaitu:

*“ ... perhaps the definition that would now gain widest approval is one that defines economic development as that process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time subject to the stipulation that the number of people below an „absolute poverty line” does not increase, and that the distribution of income does not become more unequal.”*

Dengan kata lain, pembangunan tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Hal tersebut hampir senada dengan yang diungkapkan oleh **Midgley** (2005:3) mengenai pembangunan, yaitu lebih pada proses perubahan sosial dan ekonomi.

“Bagi sebagian orang, pembangunan berkonotasi pada sebuah proses perubahan ekonomi yang dibawah oleh proses industrialisasi. Istilah ini juga mengandung arti sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Selanjutnya, istilah ini juga memiliki konotasi kesejahteraan yang menawarkan bahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereka, memperbaiki kondisi pemukiman dan kesehatan mereka. Akan tetapi dari pengertian yang berbeda tersebut di atas, konsep pembangunan seringkali diasosiasikan dengan perubahan ekonomi. Bagi sebagian besar orang, pembangunan berarti kemajuan ekonomi.”

Sedangkan menurut **Rongers** mendefinisikan pembangunan sebagai berikut:

“Suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yang dinilai tinggi yang lainnya) bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya”.

Goulet (Harun, 2011:215) yang melihat pembangunan yaitu

“Membebaskan manusia dari perbudakan alam, dari keterbelakangan ekonomi dan institusi-institusi teknologis opresif, dari struktur-struktur kelas yang tidak adil dan para pengeksploitasi politik, dari merampas fisik

dan budaya-ringkasnya, dari semua perantara kehidupan yang tidak manusiawi”.

### **2.1.3.1 Analisis dampak pembangunan**

Dalam suatu pembangunan diperlukan adanya analisis akan dampak, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip dalam analisis dampak tersebut, sebagaimana dijelaskan Gibson dalam Suparmoko (2002:45) yang menyatakan bahwa analisis dampak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut secara bersama-sama:

1. Prinsip pendekatan terpadu. Pembangunan harus dilihat dampaknya pada skala lokal, nasional dan internasional. implikasinya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan dapat dihilangkan. Implikasi penggunaan sumber daya alam secara besar harus terkendali sehingga tetap memiliki daya dukung yang kokoh terhadap kehidupan manusia. Mengkaji pula implikasi sosial-budaya, ekonomi dan moral jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang.
2. Semua bentuk pembangunan harus ramah lingkungan. Baik pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat maupun swasta. Prinsip ini berarti bahwa kebijakan, program, dan proyek pembangunan harus melalui analisis dampak.
3. Analisis dampak harus menekankan pada identifikasi kemungkinan terbaik. Artinya tujuan dan keunggulan relatif dari alternatif pembangunan harus dikaji secara kritis dan mendalam
4. Analisis dampak harus berdasarkan hukum, spesifik dan wajib harus dapat diterapkan. Artinya analisis dampak harus dapat membawa perubahan positif.
5. Proses, analisis, dan pengambilan keputusan harus terbuka, partisipatif, dan adil. Prinsip ini merefleksikan konsep persamaan, pemberdayaan dan keadilan merupakan hakekat pembangunan.
6. Harus ada petunjuk pelaksanaan. Kondisi dan syarat penerimaan harus dapat dijalankan. Kapasitas juga harus ada untuk memantau efek dan penataan terhadap aturan pelaksanaan. Artinya harus tetap komitmen.
7. Analisis dampak harus menekankan prinsip efisiensi. Berbagai cara harus disusun secara sistematis untuk menghubungkan analisis dampak dengan pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

Analisis dampak pembangunan mengadaptasi pada analisis kebijakan yang dikemukakan Dunn (2003:51-54), yaitu sebagai berikut:



1. Model analisis prospektif

Merupakan bentuk analisis pembangunan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi pembangunan sebelum suatu pembangunan tersebut diterapkan. Model ini bersifat prediktif, sering melibatkan teknik-teknik peramalan untuk memprediksi kemungkinan yang akan muncul akibat dari adanya pembangunan.

2. Model *restospektif*

Merupakan bentuk analisis pembangunan yang dilakukan terhadap akibat-akibat pembangunan setelah pembangunan tersebut dilaksanakan. Model ini disebut model evaluative, karena banyak menggunakan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan.

3. Model interaktif

Merupakan bentuk perpaduan analisis dampak pembangunan dari kedua model tersebut diatas. Model ini disebut analisis komperhensif atau holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi pembangunan yang mungkin muncul, baik sebelum maupun sesudah suatu pembangunan diimplementasikan.

### **2.1.3.2 Indikator Keberhasilan Pembangunan**

Kuncoro (2004:114) berdasarkan survey literatur, beberapa sasaran fundamental pembangunan yang berusaha dicapai oleh banyak daerah adalah:

1. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah
2. meningkatkan pendapatan perkapita
3. mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Indikator keberhasilan dalam pembangunan menurut Tikson (2005:32), merupakan penggunaan indikator dan pengukuran keberhasilan (variable) yang memiliki nilai tersendiri sesuai dengan masyarakat, dan dapat berbeda-beda di setiap negara di dunia. Di negara-negara yang tergolong tertinggal atau miskin ukuran kemajuan dan ukuran pembangunan mungkin masih berkuat pada kebutuhan-kebutuhan dasar seperti harga makanan pokok, dan layanan kesehatan yang dapat dikatakan minim. Sebaliknya, di negara-negara yang telah mampu memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan bergeser pada faktor-faktor sekunder dan tersier. Jumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita, struktur perekonomian, urbanisasi dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu dengan indeks Kualitas Hidup (IKH), dan Indeks pembangunan Manusia (Human Development Index). Berikut menurut Tikson (2005: 28) terdapat enam indikator dalam penentu keberhasilan pembangunan, diantaranya:

1. Pendapatan perkapita  
pendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun dalam PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. dalam perspektif makro-ekonomi indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makro-ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara Selatan dan negara dunia ketiga di dunia. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan perkapita (pertumbuhan ekonomi). walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak

mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur ekonomi  
telah terjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan perkapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan perkapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan perkapita terus menurun.
3. Urbanisasi  
Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara berkembang proporsi terbesar berada di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.
4. Angka tabungan  
Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Financial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana yang terjadi Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.
5. Indeks Kualitas Hidup (IKH)  
IKH atau Physical Quality of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel

ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

#### 6. Indeks pembangunan Manusia

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge, attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya

### 2.1.3.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut **Eddy Ch. Papilaya** (Zubaedi, 2007:41) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut **Chambers** (Zubaedi, 2007:41), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut **Jim Ife** (Zubaedi, 2007:42), konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dalam dua konsep pokok, yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”) pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif, yaitu: *perspektif pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, dan memahami bagaimana bekerjanya system (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu dalam bagaimana bersaing didalam peraturan (*how to compete within the rules*)

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elit seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain. Selain itu, juga untuk membentuk aliansi dengan kalangan elit. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elit terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang, karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi . umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas social, gender, ras, atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan,perubahan structural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan merubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualis ketimbnag aktivitas, aksi, atau praktis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya pengembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Sedangkan menurut **Suharto** (2010:57) secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia.

Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan Suharto( 2010:58):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995)
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya(Parson, 1994).

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut Ife (Suharto, 2010) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan masyarakat.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang



bersifat fisik,ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu mempunyai aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalkan persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalkan ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas,gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

#### **2.1.3.4 Indikator Keberdayaan**

Menurut **Kieffer** (Suharto, 2010: 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Dan menurut **Parsons** juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar,
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang yang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

### **2.1.3.5 Perubahan Sosial**

Manusia merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi dari orang lain, karena sekecil apapun pasti membutuhkan orang lain. Konsep sosial menurut Philip Wexler mengartikan Sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia. Engin Fahri mengartikan sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walau masih diperdebatkan. Sedangkan menurut Lewis, Sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sosial adalah sesuatu yang ada dalam diri individu itu sendiri dalam suatu interaksi manusia.

Menurut Prof.Dr. Koentjaraningrat mengatakan bahwa sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan kasus dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya pada Enda M.C sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan (Sukanto:2005:44) Kingsley Davis memberikan pengertian tentang perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan Gillin memberikan pengertian tentang perubahan sosial dikatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu perisai dari cara-

cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik oleh karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, idiologi, ekonomi maupun karena adanya divusi inovasi (penemuan baru) dalam masyarakat (Susanto:1979:67). Midgley (2005:3) mengartikan Perubahan sosial juga dapat disebabkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern, dan prilaku masa kini.

Dampak sosial adalah dampak-dampak yang mencakup semua konsekuensi sosial dan budaya atas suatu kelompok manusia tertentu yang diakibatkan setiap tindakan publik atau swasta yang merubah cara-cara bagaimana orang menjalani kehidupan, bekerja, bermain, berhubungan dengan orang satu sama lain, mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka, dan secara umum berupaya menjadi anggota masyarakat yang layak.

## **2.2 Penelitian terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan adanya penelitian ilmiah mengenai PT. Krakatau Posco, tetapi adanya beberapa penelitian dengan hampir persamaan kasus, penelitian tersebut seperti yang diteliti pada:

2013. Oleh Ima Magfiro dkk, dengan judul Analisis Peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang) dimana permasalahan limbah industri pabrik gula Tjoekir di Jombang yang menimbulkan permasalahan lingkungan yang memicu konflik masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan teori dari Siagian yaitu modernisator, dinamisator, katalisator, stabilisator, dan pelopor. Dengan menggunakan metodologi

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil kesimpulan bahwa adanya pabrik gula tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti limbah cair, padat, maupun gas yang kurang sesuai dengan pengelolaannya, sehingga limbah yang dihasilkan dirasa merugikan warga masyarakat. Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat diperlukan agar tidak memperparah keadaan yang telah ada. Seperti tidak membuang sampah di sungai, tetapi ada program bank sampah. Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha harus mampu menjaga komunikasi secara berkala. Pemerintah harus mempunyai *political will* yang kuat dan political budget yang tinggi dan aturan yang jelas dan tegas dalam upaya mengatasi limbah industri yang menyebabkan pencemaran.

2012. Oleh Mitha Miftahul Hikmiah dengan judul Peran Satuan Pamong Praja dalam implementasi peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon. Dimana adanya permasalahan seperti kurangnya personil Satpol PP, Komunikasi yang dilakukan hanya bersifat persuasif, kurangnya anggaran untuk penertiban, adanya lempar tanggung jawab antara *stakholder* terkait. Dengan tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan menggunakan teori Implementasi dari George C. Edward III meliputi Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi (sikap), Struktur Birokrasi. Dengan menggunakan metode Kualitatif, di mana dengan hasil menunjukkan bahwa peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon belum berjalan maksimal. Sehingga perlu memaksimalkan personil dengan cara koordinasi, komunikasi persuasif perlu diimbangi dengan komunikasi *preventif* dan *represif*, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi personil Satpol PP disesuaikan dengan anggaran, Koordinasi antar *stakholder* pihak terkait, dan revisi perda hiburan.

Peneliti saat ini juga meneliti peran pemerintah namun lokasi dan fokus penelitian yang agak berbeda, pada peneliti saat ini, peneliti meneliti peran pemerintah Kota Cilegon terhadap dampak pembangunan dari PT. Krakatau Posco, dimana adanya PT. Krakatau Posco memicu konflik sosial, bukan hanya pada lingkungan saja, maupun permasalahan sosial seperti maraknya tempat-tempat lipuran yang memicu masalah sosial lainnya. peneliti saat ini menggunakan teori Siagian, peneliti saat ini point-point yang dijadikan acuan dalam teori ini yaitu Stabilisator, Inovator, Modernisator, dan pelopor dengan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dengan adanya temuan tersebut, diharapkan dalam penelitian kali ini pemerintah Kota Cilegon memiliki *political will* yang kuat dan aturan yang jelas dalam menangani dampak sosial dari adanya pembangunan PT Krakatau Posco.

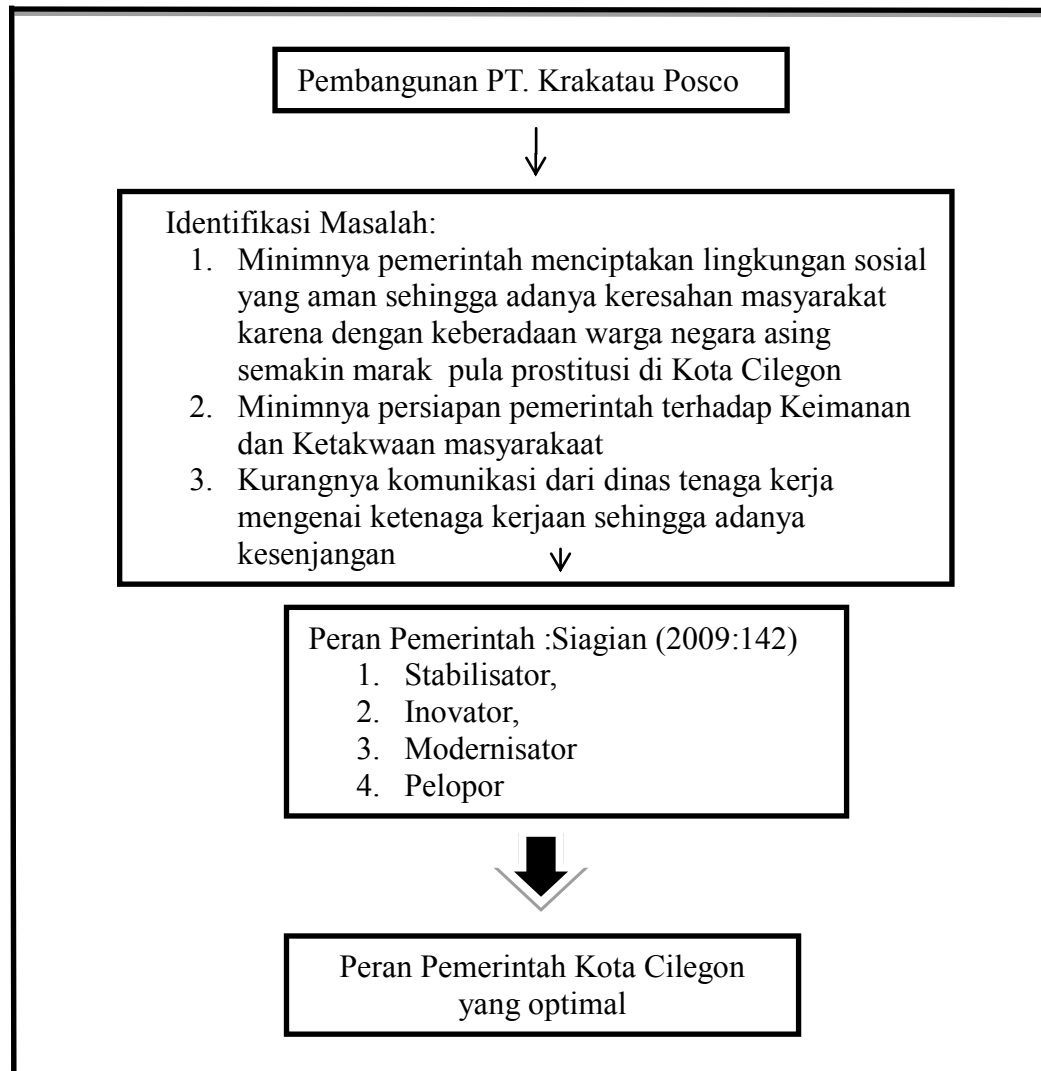
### 2.3 Kerangka berfikir

Penelitian ini akan meneliti tentang peran pemerintah Kota Cilegon terhadap dampak pembangunan dari PT. Krakatau Posco. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik. Dalam suatu pembangunan, adakalanya menimbulkan masalah karena ketidak sesuaian apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga dapat memicu terjadinya konflik sosial yang berujung pada ketidak stabilan sosial.

Peran pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas adanya PT. Krakatau Posco yang terjadi di Kecamatan Ciwandan di temukan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Minimnya pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang aman sehingga adanya keresahan masyarakat karena dengan keberadaan warga negara asing semakin marak pula prostitusi di Kota Cilegon (2) Minimnya persiapan pemerintah terhadap keimanan dan ketakwaan masyarakat. (3) Kurangnya komunikasi dari dinas tenaga kerja mengenai ketenaga kerjaan sehingga adanya kesenjangan. Merujuk pada topik penelitian ini peneliti menggunakan teori peran pemerintah dari Siagian (2009:142). Yang terdiri dari (1) Stabilisator, (2) Inovator, (3) Modernisator dan (4) Pelopor. Mengacu pada landasan teori tersebut, dimensi-dimensi tersebut dianalisis sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat diketahui peran pemerintah Kota Cilegon yang optimal yang berujung pada kestabilan sosial.

Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis membuat sebuah kerangka pemikiran yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**GAMBAR 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



(Sumber: peneliti, 2016)

#### **2.4 Asumsi dasar**

Merujuk pada observasi awal dan penelitian terdahulu, yang telah dipaparkan terhadap fokus penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa peran pemerintah Kota Cilegon terhadap dampak pembangunan dari PT. Krakatau Posco belum optimal.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Menurut Usman (2009:49), metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Jadi metode penelitian ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tehnik deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kiek & Miller dalam Moleong (2007:4) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin medeskripsikan persoalan-persoalan yang ada. Deskripsi menurut James dan Dean (2009:6) adalah mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada.

Penelitian kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif lebih tertarik pada dinamika terjadinya proses atau peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya suatu hasil tertentu. Tujuan penelitian kualitatif



adalah memahami makna yang berada dibalik fakta-fakta. Pemahaman yang mendalam terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial merupakan hal yang penting. Objek dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen, yaitu *place* (tempat) dimana intraksi dalam situasi sosial berlangsung, *actor* (pelaku) atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, dan *activities* (aktivitas) atau kegiatan yang telah dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kata, kalimat, dan gambar dengan mendeskripsikan fenomena sosial yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti bermaksud menggambarkan atau menjelaskan dampak sosial dari adanya pembangunan PT. Krakatau Posco dari sudut pandang peran pemerintahnya

### **3.2 Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai peran yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon atas dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya PT.Krakatau Posco, sehingga dapat di ketahui sejauh mana tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah atas dampak sosial tersebut terutama yang terjadi di Kecamatan Ciwandan, dan faktor pendukung dan penghambat dari peran tersebut.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Ciwandan, dikarenakan yang dijadikan lokus penelitian dalam dampak sosial Kota Cilegon yaitu di Kecamatan Ciwandan dan PT. Krakatau Posco terletak di kecamatan

tersebut dan uniknya kecamatan tersebut termasuk keluarga sejahtera terbanyak untuk kategori sangat miskin di Kota Cilegon. Berdasarkan data Cilegon Dalam Angka tahun 2013, jumlah keluarga sejahtera di Kecamatan Ciwandan kategori Hampir miskin 695, miskin 932, dan sangat Miskin 1.019.

### **3.4 Fenomena yang diamati**

#### **3.4.1 Definisi Konsep**

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian berkaitan dengan Peran Pemerintah terhadap dampak sosial PT. Krakatau Posco di Kota Cilegon, khususnya di Kecamatan Ciwandan

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Siagian (2004) yang berisi lima pokok dimensi peran pemerintah, namun yang dipakai dalam penelitian ini berisi empat, yakni (1) Stabilisator, (2) Inovator, (3) Modernisator dan (4) Pelopor. Sehingga dapat diketahui peran pemerintah berjalan dengan optimal yang berujung pada kestabilan sosial. Dengan kondisi sosial yang stabil akan tercipta kesejahteraan yang merata.

#### **3.4.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator penelitian. Biasanya menggunakan tabel matriks, indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasionalnya akan dikemukakan fenomena-fenomena

penelitian yang tentunya dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan menurut Siagian (2009) seperti yang telah dijelaskan di dalam definisi konsep sebelumnya.

Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan, kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Siagian (2004) dengan beberapa indikator dan sub indikatornya dalam peran pemerintah. Adapun indikatornya :

1. Stabilisator yang memiliki tiga sub indikator yaitu
  - a. dibidang Ekonomi, dengan cara preferensial dibidang pelatihan, lapangan pekerjaan.
  - b. dibidang Sosial Budaya, dalam mewujudkan perubahan agar tidak terjadi gejolak sosial, adapun peran tersebut dapat terwujud dengan beberapa cara diantaranya:
    - a) Kemampuan selektif yang tinggi
    - b) Proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif
    - c) Melalui pendidikan
    - d) Pendekatan yang persuasif
    - e) Pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Inovator
  - a. Inovasi di lingkungan birokrasi, meliputi cara bekerja dengan cepat, tepat, sederhana, transparan, akuntable.

- b. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Mengarah pada *problem solving* dan *action oriented*.
3. Modernisator. Adapun sub indikatornya
  - a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
  - b. Rakyat yang diperdayakan, meliputi dapat bersaing, dan dapat mengambil keputusan yang rasional
  - c. Bersedia menerima perubahan, sehingga dengan kesediaan menerima perubahan yang berorientasi pada kemajuan akan mempermudah pembangunan dan mengurangi gejolak akibat perbedaan pandangan, namun dengan tetap tidak meninggalkan jati diri bangsa.
4. Pelopor
  - a. Panutan

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen menurut KBBI v1.1 adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Jadi instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2007:59). Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya dilapangan. Untuk itu peneliti dituntut memiliki

pemahaman metode penelitian, penguasaan wawasan, dan kesiapan peneliti dalam memasuki objek penelitian.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. dikarenakan sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Selain itu dalam melakukan penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya (Irawan, 2006: 5.5). Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Seorang peneliti kualitatif bisa mendapatkan data-data primer dengan cara melakukan wawancara atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah) atau seseorang memperoleh informasi dari orang lain.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dan observasi di tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi, seseorang yang mendapatkan informasi dari orang lain, dan studi pustaka terkait dengan sosial pembangunan industri.

### **3.6 Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif sampelnya disebut sebagai nara sumber atau informan (Sugiyono, 2007:54). Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena berangkat dari kasus tertentu sehingga hasil kajiannya tidak akan

digeneralisasikan ke populasi, tetapi dapat diterapkan ke tempat lain apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti.

Teknik penentuan informan sumber data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah secara *Purposive* dan *Snowball*. *Purposive* yaitu teknik penentuan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu atau paling menguasai objek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit karena dirasa belum memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama makin besar (Sugiyono, 2009:53-54).

Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pemilihan informan dengan secara *purposive* dan *Snowball*. *Purposive* yakni penentuan informan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini digunakan untuk informan yang dianggap lebih tahu mengenai fokus permasalahan penelitian. Adakalanya, peneliti juga memilih informan berdasarkan *Snowball* yang digunakan untuk menentukan kategori *secondary informan*.

Adapun informan dalam penelitian ini yang dengan cara *purposive* yang biasanya adalah dijadikan *key informan* diantaranya yaitu sekretaris Dinas Sosial Kota Cilegon, Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagian. Kominfo Setda, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan sipil,

Pihak Kantor Kecamatan Ciwandan. Sedangkan *secondary informan* diantaranya yaitu masyarakat sekitar PT.KP. serta informan lain yang dianggap perlu sampai dengan jenuhnya informasi (*redundancy*) yang diberikan oleh informan. Dari penjelasan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikannya melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

<b>Kode Informan</b>	<b>Informan</b>	<b>Keterangan</b>
I <sub>1</sub>	Pihak Dinas Sosial Kota Cilegon: 1. Sekretaris dinas Sosial	<i>Key Informan</i>
I <sub>2</sub>	Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon: 1. Kepala Bidang Penempatan tenaga kerja 2. Kepala Seksi latihan dan Produktifitas 3. Fungsional Penempatan Kerja 4. Koordinator Pengawas K3 5. Kepala BLK	<i>Key Informan</i>
I <sub>3</sub>	Pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon: 1. Kepala Bidang Prasarana dan pengembangan wilayah	<i>Key Informan</i>
I <sub>4</sub>	Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: 1. Kepala Bidang Pariwisata	<i>Key Informan</i>
I <sub>5</sub>	Pihak: 1. Kepala sub bagian data elektronik sanditel dan dokumentasi bag. Kominfo	<i>Key Informan</i>
I <sub>6</sub>	Pihak: 1. Kepala Seksi bidang data Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	<i>Key Informan</i>
I <sub>7</sub>	Pihak Kantor Kecamatan Ciwandan: 1. Sekretaris Kecamatan 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	<i>Key Informan</i>
I <sub>8</sub>	Masyarakat	<i>secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2016)

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di lapangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Black (2009:285) Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipatif. Partisipasi yang dilakukan peneliti berupa partisipasi pasif, dimana peneliti mendatangi tempat kegiatan orang yang diamati, kemudian mengamati perilaku dan mencari makna dari perilaku tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan orang yang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap literatur-literatur, catatan-catatan, buku-buku, laporan –laporan yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber lain yang sesuai (internet, Koran, dan lain-lain) Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, jurnal ilmiah, maupun artikel atau yang memuat konsep maupun teori, dokumen maupun gambar yang dibutuhkan terkait dengan topik penelitian.



### 3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan baik secara langsung (*face to face*) maupun tidak langsung seperti wawancara melalui telepon, media internet, atau bisa juga dilakukan dalam bentuk wawancara tertulis melalui surat dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik dalam penelitian.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, sehingga peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, melainkan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam mengenai objek yang diteliti dengan lebih banyak mendengarkan apa yang diungkapkan oleh informan. Wawancara tak struktur sering juga disebut wawancara mendalam (Mulyana, 2006:180)

Adapun kisi-kisi wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini tidak berupa daftar pertanyaan, melainkan hanya poin-poin pokok yang akan dipertanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan pada penelitian kualitatif. Adapun poin-poin pokok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

No	Dimensi Penilaian	Sub Dimensi Penilaian	Informan
1	<b>Stabilisator</b>	a. dibidang Sosial Budaya - Proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif - Melalui pendidikan - Pendekatan yang persuasif - Pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub> ,
2	<b>Inovator:</b>	a. Inovasi di lingkungan birokrasi. - bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan, dan cara berfikir pada pelayanan b. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. - Pendekatan situasional - Problem solving, action oriented	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub>
3	<b>Modernisator:</b>	a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi - Kesiapan/ kemampuan IPTEK memadai  b. Rakyat yang diperdayakan - Pemberdayaan masyarakat	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub>
4	<b>Pelopor</b>	a. Panutan	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub>

(Sumber: Peneliti, 2016)

#### 4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yakni setiap bahan tertulis, ataupun film, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.

Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui

bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian (Fuad, 2012:89).

Selanjutnya alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini terdiri dari: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan buku catatan.

1. Kamera

Berfungsi untuk memotret pembicaraan dengan sumber data atau mengambil gambar hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

2. Alat perekam

Berfungsi untuk merekam semua percakapan.

3. Buku catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

### **3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif adalah yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti wawancara atau catatan laporan, bacaan dari buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan, 2006:5.19).

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan. mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka analisa dilakukan sejak data pertama sampai penelitian terakhir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Prasetya Irawan yakni sebagai berikut:

Gambar 3.1  
Proses Analisis Data



(Sumber: Irawan, 2006: 5.27)

Adapun penjelasan dari proses analisis data di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data mentah

Analisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data mentah, misalnya dengan wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka.

#### 2. Transkrip data

Pada tahap ini peneliti merubah data yang diperoleh baik dari hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapih ke dalam bentuk tertulis.

#### 3. Pembuatan koding

Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkrip data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga menemukan kata kunci yang kemudian akan diberi kode. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasikan data.

#### 4. Kategorisasi data

Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori tertentu.

#### 5. Penyimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah dikategorikan sebelumnya.

#### 6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

#### 7. Penyimpulan akhir

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

### **3.9 Teknik Uji Keabsahan Data**

Data hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan uji keabsahan data. Ada berbagai macam kriteria untuk menguji keabsahan data, salah satunya melalui uji kredibilitas data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Namun peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan melalui dua teknik pemeriksaan, yaitu triangulasi serta *member check* yaitu:

#### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* and *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya (Irawan, 2006:5.34). sedangkan menurut

Sugiyono (2011:273) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, berbagai waktu, seperti yang dijelaskan berikut:

- a. Triangulasi Teknik,  
yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- b. Triangulasi Sumber,  
yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- c. Triangulasi Waktu  
yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

## 2. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2011:276). Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

### **3.10 Jadwal Penelitian**

Pelaksanaan Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2014 dan direncanakan akan selesai hingga bulan Januari 2016. Rencana kegiatan penelitian skripsi sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rencana Kegiatan Penelitian**

<b>Kegiatan</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
<b>Observasi awal</b>			
<b>Penyusunan proposal</b>			
<b>Seminar proposal</b>			
<b>Revisi proposal</b>			
<b>Penelitian ke lapangan</b>			
<b>Pengelolaan dan analisis data</b>			
<b>Siding skripsi</b>			
<b>Revisi sidang</b>			

(Sumber: Peneliti, 2016)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Cilegon**

Secara astronomis Kota Cilegon berada di bagian barat Pulau Jawa, terletak pada koordinat 5052'24"-6004'07" Lintang Selatan dan 105054'05"-106005'11" Bujur Timur. Terletak pada posisi geografis cukup strategis yang sebelah barat Selat Sunda, utara Kabupaten Serang, timur Kabupaten Serang, selatan Kabupaten Serang.

Kota Cilegon merupakan kota Otonomi yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 15/1999. Sebagai kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Luas kota Cilegon 175,5 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 8 kecamatan 43 kelurahan. Berdasarkan RTRW Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008), Kota Cilegon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai Kota Pusat utama untuk Kawasan Andalan Bojonegara – Merak – Cilegon, dimana sektor unggulan kawasan ini adalah industri, pariwisata, pertanian, perikanan dan pertambangan. Kota Cilegon dikenal sebagai Kota industri. Sebutan lain dari Kota Cilegon adalah Kota Baja. Pada akhir tahun 2010, Krakatau Steel sebagai perusahaan plat merah menggandeng perusahaan asal Korea Selatan, POSCO untuk melaksanakan *joint venture* di kawasan Industri Krakatau.



Penduduk Kota Cilegon berdasarkan Siak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Desember 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Cilegon adalah 429.751 orang yang terdiri dari 221.474 laki-laki dan 208.276 perempuan. Dengan sebagian besar penduduk dengan usia produktif antara 25-29 tahun 43.462 orang (10%) dan antara 30-34 tahun 42.088 orang (10%).

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Ciwandan**

Wilayah Kecamatan Ciwandan berada di bagian timur laut Pulau Jawa, secara astronomi terletak pada garis  $5^{\circ} 59' 48.6''$ -  $6^{\circ} 03' 35.2''$ LS dan  $105^{\circ} 55' 17.9''$ - $106^{\circ} 00' 18.2''$  BT. Sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang, dan sebelah barat dengan Selat Sunda. Luas daratan Kecamatan Ciwandan adalah  $51,8 \text{ Km}^2$  atau 29,52% dari total wilayah Kota Cilegon, dan memiliki 1 (satu) pulau kecil yaitu Pulau Ular.

Kecamatan Ciwandan secara administrasi terdiri atas 6 Kelurahan. Enam Kelurahan tersebut terbagi habis ke dalam 28 Rukun Warga (RW) dan 119 RT serta 75 lingkungan. Jumlah RT terbanyak berada di Kelurahan Randakari sebanyak 28 RT dan paling sedikit adalah Kelurahan Kubangsari dengan jumlah 13 RT.

Menurut hasil proyeksi Penduduk 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Ciwandan berjumlah 45.888 Jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 23.633 jiwa dan perempuan sebanyak 22.255 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2013-2014 sebesar 1,45% dengan kepadatan penduduk per  $\text{Km}^2$  mencapai 886

jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan penduduk terbesar berada di Kelurahan Tegalratu sebesar 10.472 jiwa atau sekitar 22,82% dari total penduduk di Kecamatan Ciwandan.

Sarana pendidikan dilihat dari jenjang pendidikannya TK sebanyak 8 unit, SD sebanyak 20 unit, SMP sebanyak 15 unit, SMA 13 unit. Sementara untuk pondok pesantren tersebar di Kecamatan tercatat sebanyak 14 unit dengan santri sebanyak 1.369 pada tahun 2014.



#### **4.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Cilegon**

Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Sosial Kota Cilegon yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

Dinas Sosial Kota Cilegon berlokasi di wilayah Kecamatan Jombang. Dengan Visi “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. Guna

mewujudkan Visi tersebut, maka Dinas Sosial Kota Cilegon menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pemberdayaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)
3. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, jaminan sosial, dan penggulangan bencana.
4. Terwujudnya peningkatan kinerja kelembagaan SKPD untuk mendukung pelayanan sosial.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Cilegon, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - a. Sub bagian Program dan Evaluasi
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
  - a. Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
  - a. Seksi Bantuan Sosial
  - b. Seksi Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan dan Nilai-nilai Sosial
  - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial
6. Kelompok Jabatan Sosial
  7. UPTD

Tugas dari Kepala Dinas, Sekretariat dan masing-masing bidang sebagaimana susunan organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi

Perumusan pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional dan administratif di bidang sosial, penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan operasional dan administratif di bidang sosial, penyelenggaraan dan pembinaan aparatur pada dinas, pembinaan dan pengendalian tugas unit pelaksana teknis dinas di lingkungan dinas, pengkoordinasian di bidang sosial dengan instansi terkait, penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) dan kinerja dinas.

2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi

Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada sekretariat, pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, penghimpunan rencana kerja, penyelenggaraan visi misi, penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dinas, penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan dinas, pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas sub bagian pada sekretariat, pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program dan kegiatan tiap-tiap bidang pada dinas, penyusunan laporan pertanggung

jawaban (akuntabilitas) dan kinerja dinas, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sekretariat.

3. Bagian program dan evaluasi, menyelenggarakan fungsi

Pelaksanaan penyusunan perencanaan sub bagian program dan evaluasi, pelaksana penyusun visi dan misi, pelaksana penghimpunan rencana kerja sekretariat dan bidang, pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, dan evaluasi program dan kegiatan, pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan, penyusunan rencana strategis, pengumpulan dan pengelolaan data laporan hasil kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja dinas, pelaksanaan kordinasi dengan instansi / pihak terkait di bidang program dan evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub bagian program dan evaluasi.

4. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi

Penyelenggaraan program kegiatan, dan pengendalian anggaran, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, pengkordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap seksi pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bidang pelayanan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

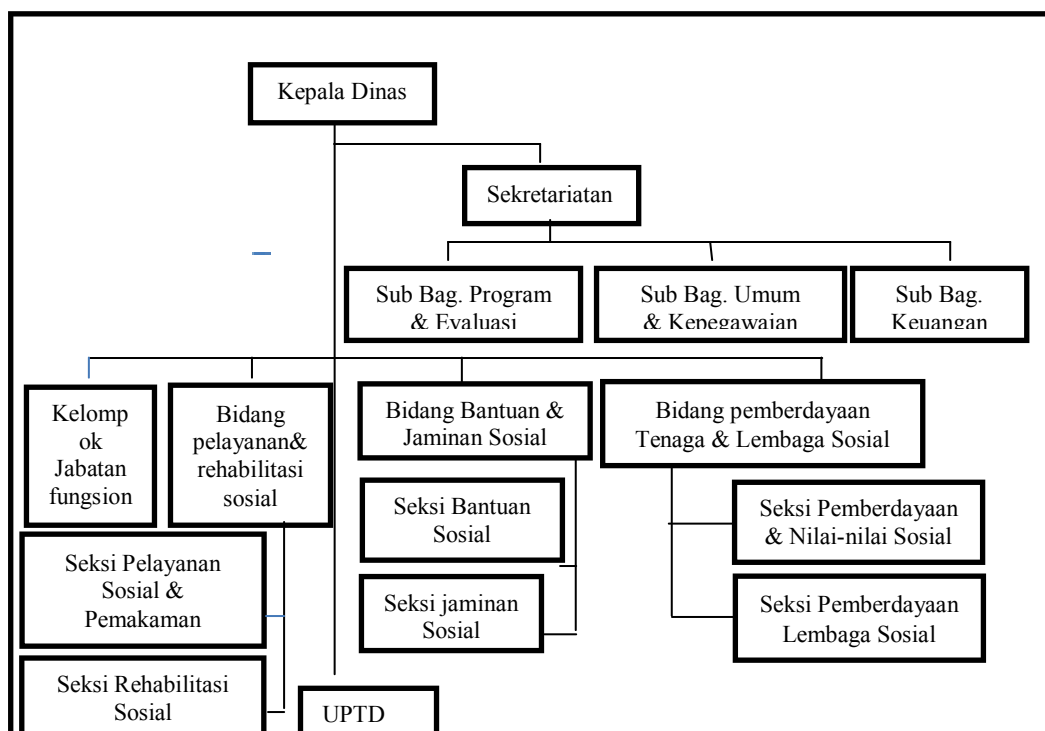
5. Bidang bantuan dan jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi

Penyelenggaraan program, kegiatan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan di bidang bantuan dan

jaminan sosial, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang bantuan dan jaminan sosial.

6. Bidang pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial menyelenggarakan fungsi

Penyelenggaraan program, kegiatan, pengendalian anggaran, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap seksi, penyelenggaraan bidang pemberdayaan tenaga dan lembaga sosial, penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di bidang pemberdayaan tenaga dan lembaga sosial, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan tenaga dan lembaga sosial.



#### **4.1.4 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon**

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Cilegon, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - a. Sub bagian Program dan Evaluasi
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub bagian Keuangan
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja
  - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas
  - b. Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja
4. Bidang Hubungan Industrial
  - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial
  - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
  - c. Seksi Norma Kerja
  - d. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian yang berkaitan dengan bidang seksi pelatihan dan produktivitas.

## 4.2 Deskripsi Data

### 4.2.1 Daftar Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul Peran Pemerintah Kota Cilegon Dalam Mengatasi dampak Sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco, peneliti menentukan informan secara teknis *purposive* dan *snowball*. Teknis *purposive* digunakan dalam penentuan *key informan* yang merupakan pihak yang memiliki dan informasi dan kewenangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan *snowball* digunakan dalam penentuan informan yang lebih mengetahui Kondisi dampak sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan PT. Krakatau Posco di Kecamatan Ciwandan, yaitu masyarakat Kecamatan Ciwandan.

Adapun kodefikasi *key informan* penelitian, dapat dilihat penjelasannya pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Kodefikasi Key Informan Penelitian**

NO	KODE	NAMA/USIA	KETERANGAN
1.	I <sub>1</sub>	Romli Rohani (47)	Sekretaris Dinas Sosial Kota Cilegon
2.	I <sub>2-1</sub>	Dudus S. Maman	Kepala Bidang Penempatan tenaga kerja, di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
3.	I <sub>2-2</sub>	Wawan	Kepala Seksi latihan dan Produktifitas, di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
4.	I <sub>2-3</sub>	Chandra Djono	Fungsional Penempatan Kerja, di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
5.	I <sub>2-4</sub>	Mustahal	Koordinator Pengawas K3 di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
6.	I <sub>2-5</sub>	Syarifudin	Kepala Balai Latihan Kerja Kota Cilegon
5.	I <sub>3</sub>	Sabri	Kepala Bidang Prasarana dan pengembangan wilayah, di Bappeda



6.	I <sub>4</sub>	Utami	Kepala Bidang Pariwisata, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	I <sub>5</sub>	Hendra	Kepala sub bagian data elektronik sanditel dan dokumentasi bag. Kominfo di Setda Kota Cilegon
8.	I <sub>6</sub>	Jamhuri	Kepala Seksi bidang data Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Cilegon
9.	I <sub>7</sub>	Sufendi Satim (52)	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, di Kecamatan Ciwandan

(Sumber: Peneliti, 2015)

Sedangkan kodifikasi *secondary informan* penelitian, dipaparkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kodifikasi *Secondary Informan* Penelitian**

NO	KODE	NAMA/USIA	KETERANGAN
1.	I <sub>8-1</sub>	Nurul Azhar (27)	Masyarakat sekitar K.Posco Kec. Ciwandan/Karyawan
2.	I <sub>8-2</sub>	Zaenal	Masyarakat sekitar K.Posco Kec. Ciwandan/Wiraswasta
3.	I <sub>8-3</sub>	MR. Z	Masyarakat Kota Cilegon/Sopir Taxi
4.	I <sub>8-4</sub>	MR.X	Masyarakat Kecamatan Ciwandan
5.	I <sub>8-5</sub>	Mukhlis	Toko pemuda Kecamatan Ciwandan/Wiraswasta
6.	I <sub>8-6</sub>	Abdul Muhit (45)	Masyarakat Kecamatan Ciwandan/Wiraswasta
7.	I <sub>8-7</sub>	Spendi	Masyarakat Kecamatan Ciwandan/Wiraswasta
8.	I <sub>8-8</sub>	Untung (58)	Masyarakat sekitar K.Posco Kec. Ciwandan/RT

(Sumber: Peneliti, 2016)

#### 4.2.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak

sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco menggunakan jenis dan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat yang berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian, observasi partisipasi pasif di lapangan serta dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Siagian (2009), di antaranya yaitu: Peran Selaku Stabilisator, Peran selaku Inovator, Peran selaku Modernisator, dan Pelopor.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti, serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu bab 3 pada metodologi penelitian, Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, diantaranya pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah, baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka serta studi dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa adanya (*verbatim*). Langkah ke dua yaitu transkrip data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu

membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal yang penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.

Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan beberapa kode sebagai berikut:

1. Kode Q menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A menunjukkan item jawaban
3. Kode I<sub>1</sub> menunjukkan informan dari pihak Dinas Sosial
4. Kode I<sub>2-1</sub>-I<sub>2-5</sub> menunjukkan informan dari pihak Dinas Tenaga Kerja
5. Kode I<sub>3</sub> menunjukkan informan dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kode I<sub>4</sub> menunjukkan informan dari pihak Dinas Budaya dan Pariwisata
7. Kode I<sub>5</sub> menunjukkan informan dari pihak Kom.info
8. Kode I<sub>6</sub> menunjukkan informan dari pihak Disdukcapil
9. Kode I<sub>7-1</sub>-I<sub>7-2</sub> menunjukkan informan dari pihak Kecamatan Ciwandan
10. Kode I<sub>8-1</sub> – I<sub>8-8</sub> menunjukkan informan dari pihak Masyarakat

Hasil pengkodean yang telah dilakukan kemudian langkah selanjutnya adalah kategorisasi data, yaitu peneliti untuk menyederhanakan dengan cara mengikat kata-kata kunci dalam satu besaran yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses *check and recheck* (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut

sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya akan memunculkan ketumpang tindihan (*redundant*).

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian kualitatif yang sangat identik dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu banyaknya informasi yang diperoleh, karena wawancara yang berkembang selama proses observasi. Dengan banyaknya informasi yang didapat, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan teori peran pemerintah menurut Siagian (2009), Adapun hasil wawancara yang telah dipilih adalah sebagai berikut:

### **1. Stabilisator**

Dimensi Stabilisator merupakan salah satu hal yang penting, karena labilnya situasi baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya mengancam terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan, sehingga perlu dimainkan oleh pemerintah.

*Pertama*, di bidang Sosial budaya. Dalam mewujudkan perubahan agar tidak berubah menjadi gejolak perlu adanya stabilisator di bidang sosial budaya, yang dalam penelitian ini adalah adanya pembangunan PT. Krakatau Posco. Ada berapa cara yang dilakukan dalam menyikapi beberapa hal yang menyebabkan adanya gejolak, seperti melalui proses sosialisasi, pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

Adanya pembangunan PT. Krakatau Posco memicu dampak baik dari segi lingkungan maupun gejolak sosial atau ketegangan sosial, yang dalam penelitian ini mengenai gejolak yang terjadi akibat ketegangan

sosial. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penilaian, aspek tenaga kerja, dan ketegangan sosial.

Untuk informasi adanya lowongan tenaga kerja, adanya ketidakmerataan informasi kepada seluruh masyarakat, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh I<sub>8-8</sub> dimana pihak Kelurahan tidak mensosialisasikan kepada RT selaku perangkat yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya.

*“Tempatnya paling deketkan, tapi kenapa ga ada yang kerja gitu. Pernah pak Ikbil bilang, katanya uda ada di Kelurahan padahal kan yang tahu warganya kan RT. Kelurahan panggil dong RT nya kalau memang ada panggilan gitu, tapi kenyataannya mana, ga ada yang kerja di Posco, padahal pabriknya keliatan gitu, seharusnya kalau misalkan nilainya mesti 6, tapi dapetnya 5,5 oh, karena tinggalnya di sini jadi dinaikin jadi 6.”* (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB)

Sedangkan I<sub>7</sub> mengakui bahwa sebelumnya memang adanya pihak yang menampung dalam penerimaan PT. Kratakatau Posco, namun saat ini sudah terpusat, yaitu KS sebagai pihak penyeleksi. Berikut pernyataan I<sub>7</sub>:

*“Yah awalnya memang jauh-jauh hari pemerintah dalam hal ini Kecamatan, banyak masyarakat, ada seseorang yang menampung, setelah ditegor artinya gak boleh seperti itu, tapi harus satu badan, pada waktu itu akhirnya di KS lah selaku orang yang menerima lamaran untuk ditaroh di Posco.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

I<sub>2-2</sub> juga memaparkan bahwa dalam menyeleksi merupakan kewenangan dari perusahaan. Sehingga masyarakat bisa langsung mendaftar ke perusahaannya jika ada informasi lowongan. Seperti berikut yang disampaikan oleh I<sub>2-2</sub>:

*“Kalau mengenai perusahaan yang menerima karyawan acuannya aturan, undang-undang, kewajibannya apa, kalau menyeleksi karyawan kewenangannya ada diperusahaan, bukan dikita. Kita itu Cuma mengumumkan kalau perusahaan itu wajib kalau mau merekrut karyawan harus melapor ke sini. Kalau ada perusahaan anu, ada lowongan, silahkan mendaftar ke sana. Pertanyaannya masih umum, lagi pula mereka untuk menangani gejolak itukan mereka biasanya make istilah ring 1, nah, itu yang jadi salah satu kebijakan, kewenangan ada diperusahaan, kita tidak mempunyai kewenangan kesitu. Sebenarnya jawaban saya itu hanya sebagai warga Cilegon, jadi saya menjawab yang saya tahu.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

Adapun laporan lowongan pekerjaan PT. Krakatau Posco untuk februari sampai Juli 2014 seperti berikut:

**Tabel 4.3**  
**Lowongan Pekerjaan PT. Krakatau Posco**  
**Februari-Juli 2014**

No.	Nama Jabatan / Pekerjaan	Jumlah tenaga Kerja yang dibutuhkan pada tiap-tiap jabatan	Pendidikan Formil	Keterampilan Keahlian Khusus	Gaji permulaan
1.	Supervisor dan/ Spesialis	30	S1	Inggris TOEFL 475, Program Komputer Microsoft	5.000.000
2.	Foreman, Teknisi, Analis, dan / officer	9	D3	Inggris TOEFL 475, Program Komputer Microsoft	4.000.000
3.	Operator	40	SMK	Kemampuan Teknis	3.000.000

(Sumber: diolah dari Disnaker, 2014)

I<sub>2-2</sub> juga menambahkan bentuk sosialisasinya berupa himbuan kepada perusahaannya agar memprioritaskan warga Kota Cilegon terlebih dahulu dalam merekrut karyawan, namun tetap dengan kualifikasi yang sesuai. Berikut pernyataan I<sub>2-2</sub> :

*“Yah itu tadi, menganjurkan agar menerima warga Cilegon yang lebih banyak, tapi tetap harus sesuai juga kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Tapi kalau ada yang dari Cilegon, jangan ngambil dari luar, misalkan kualifikasi apa nih, butuhnya apa, cari dulu di Cilegon, kalau ga dapet boleh dari luar.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB)

I<sub>7</sub> juga menambahkan bahwa Disnaker belum memiliki Website tersendiri, sehingga jika ada lowongan agak menghambat informasi publik. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>5</sub>: *“...Cuma, Disnaker belum punya website, jadi mereka hanya lewat papan pengumuman yang ada di Disnaker itu ...”* (Wawancara dengan Kepala sub bagian data elektronik sanditel dan dokumentasi bag. Kominfo Setda Kota Cilegon, Hendra, pada 20 Februari 2014 pukul 14.15 WIB).

Namun I<sub>2</sub> juga menambahkan bahwa beberapa hari sebelumnya Disnaker telah mengadakan *Job fair* sebagai media sosialisasi publik. Berikut pernyataan I<sub>2-2</sub>: *“...tau kan jum'at kemarin ada Jobfair yang di SKI? Nah, kaya kemarin itu cara ngasih tau kemasyarakatnya”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

Bentuk sosialisasi yang diberikan BLK yaitu dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara formal maupun non formal. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-5</sub> adalah sebagai berikut:

*“(berfikir sejenak) intinya kalau kita, untuk peserta pelatihan, kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui jalur surat resmi, ke kelurahan, kita juga lewat web, di facebok jg ada, termasuk untuk pendaftar juga ada disitu, karena kita memakai*

*sistem online, gitu pendaftarannya, kita juga di gratiskan, jadi tidak dikenakan anggaran untuk tiap peserta, uda di jamin sama pemerintah daerah, di APBDN.”* (Wawancara dengan Kepala BLK, Syarifudin, pada 01 April 2016 pukul 11.20 WIB).

Dari pernyataan di atas, peneliti menganalisis sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon mengenai ketenagakerjaan masih minim, hal tersebut karena masih belum meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai adanya jatah lowongan tenaga kerja di Kelurahan. Dinas Tenaga kerja juga di awal, belum memilikinya website resmi, sehingga informasinya masih hanya sebatas di papan pengumuman Disnaker saja.

Pendidikan merupakan salah satu stabilisator sosial yang memiliki keterkaitan juga dengan aspek pemberdayaan pada dimensi modernisator yang akan dibahas selanjutnya. Aspek pendidikan ini peneliti pertanyakan kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

*“Iya, memang kuncinya adalah pengembangan keterampilan pada masyarakat tertentu. Pengembangan keterampilannya seperti tata boga, kecantikan. Secara khusus di kecamatan tidak ada. Artinya secara umum seluruh 8 kecamatan kita programkan itu, terutama mereka yang masuk pada sasarannya.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Dari wawancara di atas, mengidentifikasi belum adanya pendidikan secara khusus dalam menyikapi adanya pembangunan PT. Krakatau Posco. Ketika peneliti menanyakan pendidikan maupun pelatihan, I<sub>8.8</sub> mengatakan bahwa belum adanya pendidikan maupun pelatihan, sebagai berikut: *“Belum ada.”* (Wawancara dengan tokoh RT



Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

Sedangkan pernyataan berbeda diungkapkan oleh I<sub>8-6</sub> yang menyatakan bahwa adanya pelatihan yang berada di BLK: *“Kalau itu mah lewat BLK itu yah, itu juga ada, Cuma gak sepenuhnya, hanya gak seberapa, itu aja, memang ada pelatihan-pelatihan.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB). Selanjutnya ketika peneliti menanyakan siapa saja yang boleh mengikuti pelatihan, I<sub>8-6</sub> menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman industri lain dengan merekrut pegawai yang berminat. Berikut pernyataan I<sub>8-6</sub>: *“Biasanya direkrut, kalau yang bekerja di KBS ditarik dari beberapa kelurahan, siapa nih yang mau mendaftar pelatihan, kita undang.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB). Dari pernyataan di atas, artinya pendidikan melalui upaya pelatihan diberikan pada saat sudah bekerja pada suatu industri. Pernyataan yang hampir senada pun di ungkapkan oleh I<sub>7</sub> yang mengungkapkan bahwa yang bekerja di K. Posco mendapat pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaannya, berikut pernyataan I<sub>7</sub>:

*“Oh ada, itu balai latihan di BLK, jadi rata-rata pekerja K.Posco di BLK kan dulu, ada yang di Koreanya, di Jakarta, ada yang di Serang, jadi apa sih pekerjaannya yang harus dikerjakan? Itu contoh, itu khusus, bagian ngelas yah ngelas, listrik, yah listrik, bagian administrasi yah administrasi, gitu BLKnya, tapi karena rata-rata untuk industri yah yang diterima jurusan anak STM atau*

*Insinyur lah, yah karena mereka ngerti dibidangnyanya.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Adapun I<sub>2</sub> menyatakan pendidikan yang diberikan berupa pelatihan di Latas lebih kepada menjahit dan sekuriti, namun secara keseluruhan adanya pelatihan operator maupun komputer:

*“Yaitu tadi, kita Cuma baru bisa melaksanakan itu kalau di latas, tapi secara umum kita juga ada pelatihan, itu salah satunya operator, biar muda terserap di Latas juga ada komputer juga ada, itu kalau di Disnaker. Kalau dilatas kan Cuma sekuriti ama menjahit, kalau pemagangan itu bukan pelatihan, tapi yang di BLK kita magangkan.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

I<sub>2</sub> juga menambahkan belum adanya kesesuaian pelatihan yang ada dengan kebutuhan industri dalam memberikan pelatihan yang tepat karena terkendalanya fasilitas baik dari segi tenaga ahlinya, berikut pernyataan I<sub>2</sub>:

*“Cuma itu tadi, di Cilegon itu lembaga pelatihannya masih belum menemukan sesuai kebutuhan, lebih banyaknya itu mereka itu menjahit, komputer, rias pengantin. Sedangkan Cilegon itu industri kimia, pelatihannya pelatihan apa? Belum banyak, dan biasanya perusahaan itu juga punya pelatihan atau training sendiri. Cuma dikita fasilitas atau pelatihan dan orang kimianya seperti itu kita belum ada.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB)

Hal senadapun diungkapkan oleh I<sub>2.5</sub> yang menyatakan belum memadainya sarana dan prasarana di BLK:

*“yah karena sarana dan prasarana kita juga belum memadai (setelah itu tertawa kecil) gitu, yah itu juga kan alat-alat berat, jadi kita belum sampai kesana, paling kita baru bisa memilih kebutuhan-kebutuhan apa yang sesuai, baru kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di BLK. Kita juga harus memikirkan antara sarananya, dananya, yah kan SDM kita punya, tapi sarana gak punya, atau sarana kita punya, tapi SDM ga ada, yah percuma.”*

(Wawancara dengan Kepala BLK, Syarifudin, pada 01 April 2016 pukul 11.20 WIB).

Ketika peneliti menanyakan salah satu cara pendidikan di bidang keagamaan, I<sub>2</sub> menyatakan sebagai berikut: *“Ada di sini, paling di pak RT.”* (Wawancara dengan masyarakat Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalaratu Kecamatan Ciwandan, Spendi, pada 03 September 2015, pukul 17:00 WIB).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai stabilisator sosial melalui pendidikan, peneliti menganalisis, pelatihan sebagai upaya pendidikan masih belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan PT. Krakatau Posco, meskipun ada beberapa yang memang dibutuhkan, seperti pelatihan operator. Namun hal tersebut masih dirasa kurang. Adapun pelatihan yang diberikanpun berasal dari industri masing-masing.

Selanjutnya aspek Pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif merupakan ajakan secara halus agar sesuai dengan keinginannya. Ketika adanya aksi yang dilakukan masyarakat, pemerintah melakukan pendekatan, seperti memberikan masukan dengan menurunkan aparat, agar meredam aksi pendemo. I<sub>8</sub> menyatakan sebagai berikut:

*“... kalau itu masukan-masukan, kalau tidak ditangani pemerintah mah pada waktu itu masyarakat beneran macem-macemlah. Tapi alhamdulillah karena menurunkan aparat-aparat juga jadi akhirnya setelah diberikan masukan-masukan oleh pemerintah atau aparat, dalam hal ini kepolisian, jadi masyarakat juga menyadari.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB)

I<sub>7</sub> juga menambahkan diberikannya pemahaman kepada yang mengikuti aksi bahwa yang akan menyeleksi adalah orang-orang ahli dari KS, berikut pernyataan I<sub>7</sub>:

*“Artinya bahwa melakukan anarkis itu hal yang tidak baik, yah kita harus duduk bersama seperti apa, sampai mereka memahami, jadi dari koordinator itu lah mereka yang menyampaikan kesemua warga, atau kesemua masyarakat sekitar pabrik atau kesemua pelamar, bahwa lamaran akan diseleksi oleh KS. Dan yang menyeleksi bukan sembarangan, orang-orang ahli dibidang industri.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Sedangkan pendekatan persuasif yang dilakukan I<sub>2</sub> lebih kepada industrinya, ajakannya berupa anjuran kepada industri agar melaporkan ke Disnaker jika ada lowongan pekerjaan. Berikut Pernyataan I<sub>2</sub>: *“Yah itu tadi, caranya kalau ada lowongan yah anjurannya harus lapor kekita, itu juga salah satu biar masyarakat umum yang bukan ring 1 juga bisa ikut biar ada pendapatan juga.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

Adanya industri yang dalam hal ini adanya pembangunan PT. Krakatau Posco memicu mobilitas penduduk, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat dengan maraknya WNA. Adapun industri yang berkaitan dengan PT. Krakatau Posco seperti berikut:

**Tabel 4.4**  
**Ijin Tinggal Terbatas berdasarkan Sponsor**

No.	Penjamin	Jumlah		
		L	P	L+P
1.	Krakatau Posco PT.	63	34	97
2.	Krakatau Posco PT.	0	1	1
3.	PT. Krakatau Pos-Chem DONG-Suh Chemical	5	1	6
4.	PT. Krakatau Posco	222	68	290
5.	PT. Krakatau Posco Chemtech Calcination	5	5	10
6.	PT. Krakatau Posco Energy	7	2	9
7.	PT. Krakatau Posco Power	1	0	1
8.	PT. Krakatau Poscopower	1	0	1
9.	PT. Posco ICT Indonesia	4	0	4
10.	PT. Posco Mtech Indonesia	2	1	3
11.	PT. Posco Plantec	1	0	1
12.	PT. Posco E&C Indonesia	28	4	32
13.	PT. Posco ICT Indonesia	159	9	168
14.	PT. Posco ICT Indonesia	8	1	9

(Sumber: diolah dari Imigrasi, 2014)

Selanjutnya pendekatan persuasif yang dilakukan pemkot yang dalam hal ini Dinsos dalam menyikapi permasalahan sosial yaitu bekerjasama dengan para ulama. Berikut pernyataan I<sub>1</sub>: *“Emm.. pendekatan persuasif itu memang secara khusus kita kerja samalah dengan ustad, kiyai, ulama-ulama di Kota Cilegon.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

**Tabel 4.5**  
**Daftar Kewarganegaraan Asing**  
**Yang bekerja di Kota Cilegon**

No.	Nama Negara	2012	Jan 2013-Mart 2014
1	Amerika Serikat	2	2
2	Argentina	-	2
3	Australia	-	2
4	Austria	42	20
5	Belanda	-	1
6	Belgia	5	7

7	Britania Raya	-	2
8	China	9	390
9	Filipina	11	31
10	India	36	114
11	Inggris	12	5
12	Iran, Republik Islam	-	3
13	Italia	1	12
14	Jepang	141	326
15	Jerman	16	40
16	<b>Korea Selatan</b>	<b>447</b>	<b>1.342</b>
17	Kroasia	1	-
18	Malaysia	14	50
19	Mesir	-	2
20	Perancis	2	2
21	Polandia	9	2
22	Republik Ceko	-	1
23	Rumania	-	4
24	Rusia	7	7
25	Singapura	7	11
26	Slovenia	-	2
27	Spanyol	-	1
28	Taiwan	3	23
29	Thailand	3	5
30	Turki	-	16
31	Ukraina	1	5
32	Vietnam	-	9
<b>TOTAL</b>		<b>769</b>	<b>2439</b>

(Sumber: diolah dari Imigrasi, 2014)

Terkait secara ekonomi warga berkebangsaan Korea memiliki ekonomi lebih, memicu kekhawatiran akan berbaurnya WNA dengan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh I<sub>7</sub> sehingga adanya penyampaian kewaspadaan agar tidak dekat dengan WNA, karena dikhawatirkan sama dengan Zina jika menikah namun tidak menjalankan rukun islam yang ke dua, yaitu sholat. Berikut pernyataan I<sub>7</sub>:

*“Yah tadi tu, paling dari kita menyampaikan kewaspadaan itu. Memang ada sih, karena memang dengan mereka pinter-pinter dengan bahasa mereka itu, “wis aje parek-parek wong bule”, bagaimanapun itu tetep bukan orang islam, apa lagi, mohon maaf,*

*masyarakat itu yang terhadap perempuan-perempuan matrealistis, karena orang Korea tebal, gajinya 300 juta perbulan, itu kekhawatiran pemerintah itu takutnya orang-orang kita nanti berbaur dengan orang Korea, akhirnya menikah, dengan syarat masuk islam boleh-boleh aja kalau ngucapin dua kalimat syahadat, tapi kalau sholat enggak, apa tetep itu namanya zina, karena orang korea bukan ahli kitab.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Dari penjelasan beberapa informan di atas, peneliti menganalisis untuk dari pendekatan persuasif dari aspek ketenagakerjaan kepada masyarakat cukup diterima oleh masyarakat, dan ajakan yang dalam hal ini diwakili oleh disnaker ditujukan kepada perusahaannya.

Sedangkan untuk menyikapi ketegangan sosial yang disebabkan maraknya WNA seperti yang diungkapkan oleh I<sub>8-5</sub>:

*“... lingkungan jadi kacau, sosial budaya masyarakat Korea yang dengan budaya kita berbeda, kaya minum apa, mabuk, kaya gitu kan, terus ngomong kasarnya goda-godain perempuan di sini, yang gak jelas kaya gitu, mereka kaya gimana sih, bebas sama perempuan, kalau budaya kita kan hati-hati. Tapi perempuannya kita sendiri juga yang kurang dibentengi sama akhlak, sehingga yang dilihat banyak duitnya, itu dampak-dampak seperti itu mengerikan, jika sewaktu-waktu punya anak, mesti dijaga tauhidnya.”* (Wawancara dengan tokoh pemuda Link. Cigading, kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Mukhlis, pada 11 September 2014 pukul 14.40 WIB)

Pemerintah Kota Cilegon yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial memonitoring tempat-tempat hiburan, namun hal tersebut berkoordinasi dengan Dinas kebudayaan dan pariwisata, berikut pernyataan I<sub>1</sub>: *“Bukan menyeleksi, tetapi memonitoring, membina semua tempat hiburan, restoran, dan sebagainya, itu di Pariwisata yah,, tetep berkoordinasilah dengan semua aparat yang ada di Kota Cilegon.”* (Wawancara dengan

Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB). Selanjutnya I<sub>1</sub> menambahkan bahwa pendekatan bertahap tapi berkesinambungan yaitu menyatakan dengan tidak bosan namun dengan pola-pola yang berbeda, berikut pernyataan I<sub>1</sub>:

*“ Artinya kita tidak boleh bosan. dimana terus saja dengan pola-pola yang berbeda. Terus memang PSK kurang lebih begitu yah,, apakah hobi atau suatu pekerjaan, kita tidak tau, itu dari jaman dulu ampe sekarang juga gak abis-abis gitu. Ampe pemerintah Kota Cilegon melarang lokalisasi. Tapi kok tempat tersembunyi tetep ada. Dimanapun tempat pasti ada.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Atas dasar itulah diadakannya suatu operasi untuk meminimalisir adanya tunasusila, karena tidak adanya lokalisasi: *“Sebenarnya memang di Cilegon tidak boleh adanya suatu lokalisasi untuk PSK. Tapi tidak menuntut kemungkinan mereka tetep ada pada tempat-tempat tertentu. Maka diadakanlah suatu operasi.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Namun I<sub>1</sub> memberikan pernyataan berbeda bahwa keberadaan PSK sudah ada dari sebelum K.Posco berdiri. Berikut pemaparan I<sub>1</sub> *“yah.. sejak jaman dulu sebelum adanya Posco juga suda ada itu. Kalau tentang sudah ada industri, tidak lah,,”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Dari wawancara di atas, peneliti menilai bentuk pendekatan bertahap namun berkesinambungan yang dilakukan pemkot dalam menyikapi penyakit sosial yaitu dengan dengan diadakannya “operasi”,



namun hal tersebut juga diperlukan secara berkala dan perlunya tahapan-tahapan selanjutnya untuk meminimalisir penyakit sosial tersebut.

## 2. Inovator

Dalam memainkan peranan sebagai Inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru, baik temuan baru, metode baru, sistem baru, dan cara berfikir baru. dari dimensi inovator ini, peneliti membaginya dalam tiga aspek penilaian, yaitu inovasi dilingkungan birokrasi, inovasi yang sifatnya konseptual, dan inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Dari kesemuanya itu saling berkaitan.

*Pertama*, inovasi dilingkungan birokrasi. Yaitu lebih kepada sikap dari aparturnya, yang mana aparturnya mampu bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana, dan transparan dan cara berfikir pada pelayanan. Aspek inovasi ini peneliti pertanyakan kepada I<sub>1</sub> yang menyatakan bahwa adanya kerjasama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih kepada CSR:

*“Emm.. tentunya pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon tidak berjalan sendiri, tetapi mereka bermitra dengan industri-industri termasuk PT. Krakatau Posco, baik penerimaan pegawainya, dan hal-hal lain, termasuk didalamnya ada CCSR, artinya memang mengajak pada masyarakat sekitarnya.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Sedangkan I<sub>2</sub> mengatakan bahwa tidak adanya kaitan antara inovasi birokrasi dengan adanya PT. Krakatau Posco, berikut pernyataannya:

*“Kayanya gak ngaruh dengan adanya Posco, itu mah dari pimpinan kitanya, dari pertama pimpinan di level kabid, ada dari walikota, peraturan berapa nih tentang pelayanan, ga ada pengaruh dari Posco, kalau inovasi, dari dalem kita sendiri.”*

(Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

Mengenai transparansi dan ketanggapan, I<sub>8-6</sub> menyatakan bahwa pemerintah sudah cukup transparan dan cukup tanggap. Berikut pernyataannya:

*“Saya pikir transparan, karena saya pikir dari awal disosialisasikan kewarga, tentu pemerintah juga sudah memberi informasi mengenai dampaknya ini-ini.. gitu. Yah memang cepet tanggap, memang jika ada keluhan dari masyarakat langsung ditangani.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB).

Namun I<sub>8-8</sub> memaparkan bahwa adanya kompensasi yang diberikan oleh Posco kepada Kelurahan untuk masyarakat, namun pihak kelurahan tidak disampaikannya hal tersebut kepada masyarakat, yang mana pihak RT tidak dilibatkan:

*“Tempatnya paling deketkan, tapi kenapa ga ada yang kerja gitu. Pernah pak Ikbil bilang, katanya uda ada di Kelurahan padahal kan yang tahu warganya kan RT. Kelurahan panggil dong RTnya kalau memang ada panggilan gitu, tapi kenyataannya mana, ga ada yang kerja di Posco, padahal pabriknya keliatan gitu, seharusnya kalau misalkan nilainya mesti 6, tapi dapetnya 5,5 oh, karena tinggalnya di sini jadi dinaikin jadi 6. Waktu itu juga pernah ngebul asap itu, keluar api, yah ledakan “pak, terus kalau dilihat dari radiusnya setengah kilo ga ada, sangat berat loh pak kompensasinya”, “oh uda di Kelurahan” tapi dari Kelurahan ga ada kompensasinya, saya panggil dong sebagai ketua RT, “ada jatah dari Posco, begini-begini..” nanti saya mengintruksikan kewarganya.”* (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

I<sub>8-8</sub> juga menambahkan: *“Iya memberikan segala sesuatunya ke Kelurahan”* (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar,

Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

Ketika peneliti menanyakan pengaruh atau dampak dari adanya WNA, I<sub>8-8</sub> menyatakan bahwa tidak ada pengaruh, namun I<sub>10-8</sub> memaparkan adanya insiden pemukulan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mabuk yang memicu perkelahian yang terjadi yang terletak tidak jauh dari PT. Krakatau Posco, seperti yang diungkapkan berikut :

*“Enggak, hanya sebatas dijalan-jalan. (pembicaraan sempat teralihkan dengan menanyakan asal peneliti dan pembahasan tentang warung yang jual minuman bekerja sama dengan instansi disuatu daerah luar Cilegon dengan membayar 300 ribu perbulan), kayak disitu juga ada warung-warung yang jual minuman, kemarin ada kejadian yang kerja di KBS lagi belanja dari Jublin, lewat, distop ama itu, dipukulin, yang mukulin kan mabok, kan kalau minum banyak mudhorotnya itu banyak.”* (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

Berdasarkan dari beberapa wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa penerapan inovasi di lingkungan birokrasi masih kurang baik, hal tersebut karena masih adanya ketidak transparan dalam pemberian kompensasi maupun informasi lowongan pekerjaan di Posco.

**Kedua**, inovasi yang sifatnya konsepsional. Inovasi konsepsional artinya pemerintah harus menjadi sumber ide, sumber saran, dan sumber pendapat tentang keputusan-keputusan. Dari aspek penilaian inovasi konsepsional, menurut I<sub>2</sub> menyatakan inovasi secara konsepnya akan ada pembinaan pelatihan-pelatihan kerja di lembaga swasta. Berikut yang disampaikan oleh I<sub>2</sub>:

*“Kalau disetujui, ada sih pembinaan, itu kalau disetujui, Cuma belum, baru. Seperti pelatihan-pelatihan kerja, tempat-tempat kursus menjahit, tata boga, itu rananya kita, jadi masyarakat juga ikut pelatihan bukan hanya di Disnaker aja, di Lembaga swasta juga bisa untuk meningkatkan kualitasnya. Intinya sih tadi, hubungannya dibidang penempatan dan pelatihan, jadi biar masyarakat umum gak bergejolak, perusahaan itu kalau mau merekrut harus lapor kita biar masyarakatnya tau. Kalau gejolaknya yang perselisihan di bidang tadi, bidang perselisihan, kalau dikita Cuma penempatan, karena bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Kalau dari masyarakat yah bisa ngerti, biar mereka ngerti untuk mengurangi gejolak masyarakat karena mereka kalah bersaing.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB)

I<sub>8-6</sub> menyebutkan adanya rekomendasi untuk yang akan bekerja di Krakatau Posco oleh instansi setempat, entah dari Kelurahan ataupun dari Kecamatan. Adapun pernyataan tersebut sebagai berikut:

*“Memang pernah ada dari Kelurahan atau Kecamatan misalkan “nih orang yang menganggur di Kelurahan Tegalratu, tolong diterima” memang ada sebagian yang diterima, tapi ada juga yang lain yang mendaftarkan sendiri.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB).

Namun pernyataan berbeda diungkapkan oleh I<sub>8-8</sub> yang menyatakan tidak adanya informasi dari Kelurahan akan rekomendasi tersebut, berikut pernyataan I<sub>8-8</sub>:

*“ ... tapi kenapa ga ada yang kerja gitu. Pernah pak Ikbal (HRD Posco) bilang, katanya uda ada di Kelurahan, padahal kan yang tahu warganya kan RT. Kelurahan panggil dong RT nya kalau memang ada panggilan gitu, tapi kenyataannya mana, ga ada yang kerja di Posco ...”* (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

I<sub>8-8</sub> juga menambahkan hanya ada satu orang warganya yang bekerja di Posco: *“Ada, hanya satu orang, Cuma saya gak tau bagian*

apa.” (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalaratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

Namun I<sub>7</sub> diawal mengatakan ketidak tahuan saran apa yang diberikan, berikut yang disampaikan oleh I<sub>7</sub>:

*“Saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari masyarakat sekitar pabik? Yah gak tau. Paling duduk bersama, paling itu aja. Antara pemerintah Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota, Disnaker duduk bersama, itu cara penanggulangannya.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB)

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai maraknya WNA, I<sub>1</sub> menyatakan bahwa belum ditemukannya kasus seperti yang di khawatirkan oleh masyarakat tersebut, seperti berikut:

*“Selama ini belum ditemukan kasus-kasus atau operasi. Iya artinya Kembali pada masyarakatnya itu bisa memilah antara yang positif dan yang negatif. Salah satunya dengan melanjutkan pendidikan, pendekatan-pendekatan pada masyarakat terutama yang ring 1 dari Ciwandan dan Citangkil melalui kegiatan keagamaan.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Dari wawancara di atas, artinya pemerintah sebagai sumber saran yang dalam hal ini Dinsos adalah dengan melanjutkan pendidikan dan melalui kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat memilah antara positif dan negatif.

Pernyataan hampir senada juga di sampaikan oleh I<sub>7</sub> yaitu dengan memberikan himbauan agar tidak terpengaruh dengan adanya warga

kebangsaan Korea yang *notabennya* pada industri lain banyak yang menikah dengan pribumi.

*“Memang pemerintah sendiri pernah menghimbau, artinya tidak terpengaruhlah, karena mohon maaf ini mah, banyak orang-orang Korea selain yang berada di Posco itu atau yang orang Posconya ada yang menikah dengan orang pribumi, tapi bukan di sini. Ada di wilayah anyer, karena mesnya banyak. Orang Korea ini di Wulandira ama di Bojong anyer. Mereka banyak yang kawin karena mereka bisa bahasa Indonesia, yang pada akhirnya mereka menikah dengan orang anyer. Ada sih WNA di Randakari, ada beberapa, tapi enggak berbaur, kadang-kadang mereka berempat, bertiga dengan bahasa dia ngobrolnya.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Pun sama, I<sub>10-6</sub> juga mengatakan perlunya pemahaman agama dari dini agar tidak terpengaruh budaya luar. Berikut pernyataan I<sub>8-2</sub>:

*“Diberikan pemahaman agama sejak dari kecil, supaya tidak terpengaruh dengan budaya luar, selama ini kan pemerintah ngarahinnya kesana, gitu. Berikan pendidikan agama sedini mungkin, agar ada pengaruh dari luar juga tidak tergodanya. Tapi kalau pendidikan agamanya kurang yah begitulah, tergodanya, jadinya terpengaruh nantinya.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB).

Lalu I<sub>8-8</sub> mengatakan perlunya kewaspadaan agar tidak bebas jika ada yang mengontrak masuk ke peloksok, selain itu juga adanya saran ketika Posco masih tahap kontruksi dari Walikota agar dibuatkannya mes. Seperti berikut:

*“Harus waspada, kalau sudah masuk ke peloksok jangan bebas, artinya begini, orang Korea kan ngontrak di rumah warga, pak Walikota juga meminta dibuatkan dimeskan, jadi biar khusus satu kampung orang Korea semua, jadi tidak menyebar kemana-mana, itu namanya orang asingkan, apalagi non muslim, yang dikhawatirkan itu tadi, makanya pak Walikota menghimbau, itu sebelum Posco operasional, kalau tidak salah sebelum personalia, baru dibangun. Alhamdulillah sekarang mereka sudah punya mes*

*sendiri, yah tidak kececeran ke pelosok, tergantung individunya, kalau kesini jangan mau. Tapi saya belum pernah liat, orang Korea hanya sebatas jalan, ada orang Korea juga yang di PDSU, tenaga ahlinya atau apa, dia punya mes sendiri.”* (Wawancara dengan tokoh RT Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Untung, pada 03 September 2015, pukul 17:24 WIB).

Dari wawancara di atas, artinya sebagai sumber ide dan pendapat, pemkot memberikan ide maupun `saran berupa permintaan agar dibuatkan mes, walaupun dalam dokumen amdal di paparkan bahwa tempat tinggal Warga Korea berbaur dengan masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kecemburuan sosial.

Inovasi secara konsepsional yang diberikan Disnaker yaitu adanya rencana yang jika disetujui akan dibuat pembinaan pelatihan. Selain itu juga adanya rekomendasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan setempat untuk dipekerjakan di PT. Krakatau Posco. Hanya saja dalam menyikapi permasalahan sosial seperti kekhawatiran akan WNA, Dinsos belum menemukannya kasus tersebut selama operasi. Namun saran yang diberikan Dinsos adalah dengan melanjutkan pendidikan dan melalui kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat memilah antara positif dan negatif.

**Ketiga**, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Bukan suatu keanehan aparaturnya bekerja secara legalistik. yang sering terlihat pada perwujudannya yaitu pendekatan dalam menyelesaikan masalah dan sikap. Pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat *problem solving* dan *action oriented*, yaitu kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis

mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya. Untuk mempermudah, peneliti membaginya pada dua aspek, yaitu pendekatan legalistik dan pendekatan situasional.

Adapun pendekatan legalistik mengenai permasalahan sosial, peneliti pertanyakan kepada I<sub>1</sub> yang mengatakan bahwa:

*“Oh,, yang pasti sistem kerja di Kota Cilegon terutama Dinsos terus berupaya, agar dari tahun ketahun tetap lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu. Dengan formula-formula baru karena kita punya yang namanya evaluasi kerja, terus penilaian kinerjanya itu salah satu dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

I<sub>7</sub> mengatakan adanya pembatasan waktu buka untuk tempat hiburan.

*“Yah pada waktu itu pernah terjadi di Krenceng, yah di Kubang sepat, yang akhirnya sampai shubuh, yang akhirnya dibatasi oleh pemerintah Kota Cilegon sampai jam 10 atau 11 malem gitu, pada waktu itu bulan puasa, gak tahu sekarang apakah berjalan atau enggaknya, soalnya pak haji gak pernah ngeluyur kalau masalah hiburan. Memang bener masalah hiburan yah, tapi banyakan orang-orang Korea sedikit berkurang yah, gak tau lah.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh I<sub>4</sub> yang menyatakan adanya penutupan tempat penyelenggara hiburan diskotik sebagai berikut:

*“Untuk saat ini ditutup dari 14 maret 2014, penutupan tempat penyelenggara hiburan, alasannya dilarang diskotik. Tapi saya tidak tahu apakah yang ke sana itu pekerja Posco atau bukan”* (Wawancara dengan Kepala bidang Pariwisata Disbudpar, Utami, pada 2014 pukul WIB).



Ketika peneliti menanyakan mengenai aturan tentang jumlah prioritas warga lokal untuk bekerja di PT. Krakatau Posco, I<sub>10-6</sub> menyatakan ketidaktahuannya secara langsung mengenai aturan tersebut: *“Kalau aturan secara undang-undang saya belum pernah baca yah, tapi memang kesepakatannya semacam itu, harusnya 60-40, 60% dari warga sekitar, 40% baru luar.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB). Ketidaktahuan akan peraturan mengenai tenaga kerja dirasakan juga oleh I<sub>8-7</sub>: *“Belum.”* (Wawancara dengan Masyarakat Link. Komplek Sinyar, Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan, Spendi, pada 03 September 2015, pukul 17:00 WIB).

Perda Nomor 02 Tahun 2009 merupakan sebagai acuan legal yang berisi memprioritaskan warga lokal untuk bekerja pada industri yang berada di Kota Cilegon, termasuk PT. Krakatau Posco, namun I<sub>2</sub> juga menegaskan harus sesuai kualifikasi. Seperti berikut:

*“Perda No.2 Tahun 2009, namun dengan catatan yang memenuhi kualifikasi, jadi kalau tidak memenuhi jangan dipaksakan, kita juga, perusahaan juga pengen berkembang maju, masa diisi sama orang-orang yang tidak berkualitas.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB)

Dalam dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) PT. Krakatau Posco, sebagai berikut: *“upaya pengelolaannya yaitu menyarankan pengelolaan industri atau unit kegiatan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal dan atau tenaga kerja yang telah cukup lama tinggal di Cilegon.*

I<sub>2</sub> juga menambahkan akan harapan tidak adanya nepotisme:

*“Sudah jalan, mudah-mudahan ga adalah yang ini, biasanya adakan, mau rekrut, mau ini, perusahaan itu, kita ngomong secara real, bikin laporan, bikin ini, yang ngelamar sampai ratusan, ribuan, “ada gak saudara yang lulusan ini” yang karyawannya mereka aja yang di dalemnya.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

Dari wawancara di atas peneliti menilai adanya indikasi nepotisme dalam rekrumen tenaga kerja. Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh I<sub>6</sub>, menyatakan adanya indikasi titipan untuk bekerja di Posco oleh anggota dewan: *“... yang kerja di Posco itu banyakan titipan orang dewan...”* (Wawancara dengan Sekretaris bidang data Disdukcapil, Jamhuri, pada 07 Juli 2014 pukul 11.03 WIB).

Sistem, prosedur, dan metode kerja yang diungkapkan oleh I<sub>7</sub> adalah mengundang Posco dan pemerintah untuk mengatasi gejolak yang terjadi, dan adanya pendekatan kepada masyarakat, yaitu:

*“Dari pemerintah waktu itu tetep mengundang Posco dan pemerintah dalam menyikapi, artinya dalam penerimaan buruh Posco, dalam penanggulangan bencana pada waktu itu pemerintah sempat mengadakan .. (mengingat-ingat), itu mah diantaranya sempat mengadakan (mengingat-ingat), Posco juga sempat mengadakan simulasi dulu, itu sempat dari pemerintah dan masyarakat sempat kaya pemadam kebakaran pada waktu itu, yang dari pemdanya itu. Dan untuk penanggulangan (berfikir), masalah karyawan udah, melakukan pendekatan-pendekatan kemasyarakat, ya alhamdulillah terus penerimaan buruh banyak buruh-buruh, kaya klining servis putra daerah. Angkutan juga banyak orang-orang sini, kontraktor juga orang-orang sini.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Ketika peneliti mempertanyakan pendekatan situasional mengenai tenaga kerja, I<sub>2</sub> menyatakan tergantung pada perusahaannya. Adapun pernyataannya seperti berikut: *“Balik lagi ke sana lagi, jadi balik lagi ke perusahaannya, bagaimana tenaga kerja dari Posco.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB). I<sub>2</sub> juga menambahkan:

*“Lapor, tapi ada juga yang mengungga via online, melaporkan setelah diterima. “ada penempatan nih”, kalau uda begini kita arahkan “pak, bu, kalau sebelum bimbingan, sebelum pas penempatan, pas mau pembukaan, laporkan kekita” itukan salah satunya untuk menekan gejolak tadi.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).

Adapun I<sub>9</sub> menyatakan adanya alih prosedur dalam rekrutmen atau adanya kebijakan baru, kebijakannya yaitu KS sebagai penyeleksi dalam penerimaan untuk jenis pekerjaan berat, berikut yang diungkapkan oleh I<sub>5</sub>:

*“Nah, yang akhirnya pendekatan-pendekatan yang memang awalnya didrop oleh tenaga-tenaga ahli, Cuma disini karena K.Posco, jadi pekerja-pekerja berat yang bisa di handle oleh orang kita melalui KS. Pada waktu itu pemerintahannya. Posco menyerahkan ke KS waktu menyeleksi lamaran putra daerah.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Dalam meminimalisir tingkat prostitusi yang terjadi, karena Kota Cilegon merupakan Kota yang strategis, baik untuk industri maupun singgah, sehingga tingkat mobilitas di Kota Cilegon tinggi. Pemkot yang dalam hal ini Dinsos sebagai unsur penyelenggara melakukan “operasi” dengan waktu situasional. Berikut pemaparan I<sub>1</sub>:

*“Secara rutin memang tidak dijadwalkan seperti sebulan sekali atau berapa kalinya, tapi tetap kita lakukan lah itu, tergantung pada situasi di lapangan, tidak terlepas dari pada pengaduan masyarakat, termasuk aparat-aparat kita yang ada di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Dibulan ini ada 4 kali. Yang oleh Dinsos saja sudah 2 kali.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh I<sub>9</sub>, adanya pendekatan situasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi insiden yang dipicu dari penyimpangan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh I<sub>7</sub>:

*“Ada pengawasan dari satpol PP, mana yang tempat hiburan, dimonitoring gitu, nanti ada laporan gitu “di sana ada tempat hiburan”, contoh kejadian kemarin yang depan pom, larinya ke warung-warung biasa, awalnya di Gunung, di Krenceng di stop, larinya ke sini, akhirnya wah meraja lela. Yah warung kopilah, warung remang-remang lah, warung malam. Yah karena banyak pengunjung jadi jual bir lah, karena merasa laris jadi jual terus. yah itu mabok-mabokan, itu yang mabok bukan orang Korea, orang kita. Sehingga lupa ingatan, lupa pikiran, jadi akhirnya berantem kan gitu, kebetulan berantemnya dengan orang kita yang digebukin, ditonjokin, itu lapor ke RT, lapor ke Kelurahan, yaudah bertindak, lapor ke Kecamatan disuratin, membandel ya udah. Terlambat, dieksekusi.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Dari wawancara tersebut, artinya adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemkot dalam menyikapi masalah sosial melalui pendekatan situasional. Adapun sikap yang dilakukan adalah mengeksekusi warung remang-remang maupun adanya operasi.

### **3. Modernisator**

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai peran pemerintah dalam pembangunan dengan perspektif yang ditawarkan oleh Siagian adalah setiap negara ingin menjadi negara yang modern, artinya negara yang kuat,

mandiri, dan sederajat oleh negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan, dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri dalam artian tidak menggantungkan diri kepada negara lain, sederajat dalam artian perolehan pengakuan *de jure*. Yang dalam hal ini lingkup kota, yaitu Kota Cilegon. Sehingga untuk mewujudkannya diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional.

**Pertama,** Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari aspek penilaian mengenai kesiapan atau kemampuan IPTEK yang memadai I<sub>1</sub> menyatakan kesiapan IPTEK yaitu dengan mempercanggih pelayanan secara online. Berikut pernyataannya: *“Itu tadi, mempercanggih pelayanan dalam bentuk online.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Namun disnaker menunjukkan respon yang berbeda ketika peneliti mempertanyakan mengenai kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan adanya PT. Krakatau Posco. Berikut pemaparan dari hasil wawancara peneliti bersama I<sub>2</sub>:

*“Dalam hal apa? Tadi kita lari-lari ke birokrasi, kita ga ada hubungannya dengan Posco, bukan hanya Posco yang dilayani, semua perusahaan. Kita mau pelayanan birokrasinya seperti apa, cepat, tepat itu kan gak ngaruh ke sana, bukan karena Posconya, tapi dipengaruhi dari atas, terus didukung juga dari sumber daya di sini, kita mau membina apa nih, tapi tidak terpengaruh Posco. Kita secara umum yah masyarakat umumkan. Posco itu Korea, otomatis tenaga kerjanya itu banyak orang-orang Korea, kita harus siap. Mereka yang harus kita ijin-ijin mereka, legal gak, itu di sini, bidang ini, ada pemeriksaan, bener gak tinggalnya disini,*

*itu dibidang sini.” (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).*

I<sub>2</sub> juga menambahkan bahwa masih adanya yang gagal peka teknologi (gaptek). Sehingga adakalanya masyarakat Cilegon tidak mengetahui informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan dari PT. Krakatau Posco.

*“Karena merekrut via online, kita gak tau yang lamar dari mana, dan mohon maaf, biasanya ada, tapi sekarang warga Cilegon uda gak gaptek yah, ada yang mereka uda tau, ada yang lewat koran, lewat sini. Untuk menekan gejala tadi biar warga Cilegonnya dikasih kesempatan. Terkadang dari Jakarta, Jogja, Bandung banyak yang melamar kitanya mah gak tau ada lowongan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi latihan dan Produktifitas Disnaker, Wawan, pada 15 Juni 2015 pukul 11.20 WIB).*

Disnaker juga belum memanfaatkan teknologi yang ada, seperti pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>5</sub>: *“...Cuma, Disnaker belum punya website, jadi mereka hanya lewat papan pengumuman yang ada di Disnaker itu ...” (Wawancara dengan Kepala sub bagian data elektronik sanditel dan dokumentasi bag. Kominfo Setda Kota Cilegon, Hendra, pada 20 Februari 2014 pukul 14.15 WIB).*

Dari beberapa wawancara di atas, artinya masih belum meratanya kepekaan akan teknologi yang seharusnya teknologi informasi yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan positif, yang dalam hal ini mengenai informasi lowongan tenaga kerja. Namun dari wawancara di atas juga mengindikasikan bahwa Disnaker masih belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Cilegon maupun sebagai media koordinasi dengan PT. Krakatau Posco.

Jika I<sub>9</sub> mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh individu tersebut. Berikut yang disampaikan oleh I<sub>7</sub>:

*“Makanya berbicara masalah ilmu, memang orang-orang yang terjun ke Posco itu sesuai dengan ilmu yang dimiliki, jadi otomatis orang yang ia terima memang sesuai dengan ilmu yang ia miliki. Kalau memang itu insinyur, insinyur apa namanya, sipil, tentunya di sipil, kalau otomotif, di otomotif, kalau dimesin produksi, yah di produksi, adapun masalah bagaimana caranya yah tergantung individunya yah, gak mungkin orang akan menempatkan seseorang kalau tidak sesuai dengan ilmunya, in the right man in the right job.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Adapun I<sub>10-6</sub> ketika peneliti menanyakan mengenai IPTEK, mengatakan bahwa perlunya pemberdayaan baik oleh pemerintah maupun pengusaha karena sumber daya manusianya sudah cukup baik. Berikut yang dipaparkan oleh I<sub>8-6</sub>: *“Saya pikir sumber daya manusia sudah bagus, cuma memang belum diberi kesempatan oleh pemerintah atau oleh pihak pengusaha sendiri gitu.”* (Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB).

**Kedua**, rakyat yang diberdayakan. Artinya diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya. Mengenai aspek ini peneliti mempertanyakannya kepada I<sub>1</sub> yang menyatakan bahwa pemberdayaannya yaitu melalui usaha keluarga: *“Pemberdayaan melalui usaha-usaha keluarga atau usaha masyarakat, kita memberi bantuan bahan-bahan bakunya dan alat-alat produksinya dikasih.”* (Wawancara

dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Adapun I<sub>7</sub> mengatakan pemberdayaannya adalah adanya prioritas. Berikut yang disampaikan oleh I<sub>7</sub>: *“Artinya untuk masyarakat setempat, artinya untuk daerah Kubangsari yah, memang ada cara-cara tertentu, ada masuk prioritas, gitu untuk masyarakat sekitar pabrik itu. Udah (sambil mengangkat telapak tangan dan meminta pertanyaan selanjutnya).”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB). Ketika peneliti mempertanyakan jumlah yang diprioritaskan, I<sub>9</sub> menyatakan ketidak tahuannya. Berikut pemaparannya:

*“Pak haji tidak dapat menentukan, tapi setahu pak haji begitu, jadi artinya untuk sekitar pabrik ada skala prioritas, yang artinya agar tidak ada gejolak sosial yang tidak diinginkan makanya kata pak haji tadi, masyarakat sekitar situ “gelem ore sire neng anuh” walaupun sebagai kontraktor, pada dasarnya dia mau. Ada yang lewat kontraktor, ada yang langsung ke Posconya. Tapi Posconya pinter, tidak menerima buruh secara langsung, jadi para kontraktor itulah yang merekrut tenaga kerja masyarakat sekitar pabrik.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ciwandan, Sufendi Satim, pada 04 September 2015 pukul 13.39 WIB).

Namun kenyataan berbeda dialami oleh pihak masyarakat yang menyatakan bahwa belum adanya pemberdayaan. Berikut pemaparan dari hasil wawancara peneliti bersama I<sub>8-6</sub>: *“Kalau itu sih belum ada kayanya, pemberdayaan yang dari Posco si belum ada, tapi yang dari KS, KBS, memang sudah ada, kalau bantuan mah ada, Posco itu misalkan ada banjir dia bantu-bantu segala macem.”* (Wawancara dengan tokoh



masyarakat kampung Lijajar, Kelurahan Tegal ratu Kecamatan Ciwandan, Abdul Muhit, pada 05 maret 2015, pukul 17:40 WIB).

Dari beberapa wawancara di atas, peneliti menilai pemberdayaan yang diberikan lebih mengenai pada peningkatan ekonomi. Baik melalui usaha keluarga, maupun yang diberdayakan oleh pengusaha lokal untuk bekerja di PT. Krakatau Posco.

#### 4. Pelopor

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai peran pemerintah dalam pembangunan adalah pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor, maka aparat pemerintah harus menjadi panutan (*“role model”*) bagi seluruh masyarakat. Adapun pernyataan yang berkaitan mengenai kepeloporan dapat dinyatakan oleh I<sub>2-4</sub> yang menyatakan kepeloporannya lebih kepada pengawasan terhadap keselamatan kerja, seperti pernyataan berikut:

*“itu.. kalau kita itu sifatnya melakukan mengawasi peraturan-peraturan kerja. Satu kegiatan kita itu melakukan sosialisasi pada saat pembangunan atau tahap kontruksi, kemudian kalau ada dampak kecelakaan kerja, kita melakukan identifikasi tenaga kerja ee.. kita pasti dateng tuh, untuk mengetahui penyebabnya apa.”* (Wawancara dengan Koord. Pengawas K3 Disnaker, Mustahal, pada 01 April 2016 pukul 11.02 WIB).

I<sub>2-4</sub> juga menambahkan yang lebih prioritas dalam merubah pandangan masyarakat adalah komunitas tertentu, berikut pernyataan I<sub>2-4</sub>:

*“kalau pemerintahkan jadinya masyarakat menunggu, ga maksimal. Itu komunitas-komunitas tertentu sekarang biar maksimal. Pemerintahkan memang harus jadi pendorong, kalau disnaker itu perannya sebagai .. (percakapan terputus karena ada yang masuk dan menerima telepon).”* (Wawancara dengan Koord.

Pengawas K3 Disnaker, Mustahal, pada 01 April 2016 pukul 11.02 WIB).

Ketika peneliti mempertanyakan mengenai kepeloporan dalam menyikapi tenaga asing dan ketidak merataan informasi lowongan tenaga kerja, I<sub>2-4</sub> menyatakan bahwa hal tersebut pada bidang lain. Berikut pernyataan yang disampaikan:

*“Siapa yang mengatakan? Memang kondisi-kondisi tertentu di dominasi tenaga asing, tapi secara keseluruhan justru lebih banyak bukan orang asingnya. lingkungan ada, tapi lingkungan apa. Masalahnya di penempatan, kalau disini lingkungan, K3. Ada beberapa kasus, misalkan pencemaran. Datanya di pak muhibin. Kalau disini kesejahteraan.”* (Wawancara dengan Koord. Pengawas K3 Disnaker, Mustahal, pada 01 April 2016 pukul 11.02 WIB).

I<sub>2-5</sub> juga menyatakan yang sesuai dalam memberikan pernyataan adalah Disnaker, namun yang mendasari mengenai model alat berat yang digunakan merupakan pihak perusahaannya. Berikut yang dinyatakan oleh I<sub>2-5</sub>:

*“Bukan bidang sini, yang sesuai memang di sana (sambil menunjuk ke arah luar pintu), Disnaker. Disini untuk memberikan pelatihan, karena ada pencari kerja yang untuk usaha mandiri, seperti wirausaha, karena ditempatnya tidak ada pabrik, haaaha (tertawa), tapi kalau model alat-alat beratkan itu kan orientasinya ke perusahaannya.”* (Wawancara dengan Kepala BLK, Syarifudin, pada 01 April 2016 pukul 11.20 WIB).

Untuk mengetahui pelopor dari pemerintah Kota Cilegon, maka peneliti menganalisis dengan cara ada tidaknya sertifikasi yang dilakukan, sebagai salah satu produk yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah selaku panutan. I<sub>2-4</sub> tidak menjelaskan, namun disarankan pihak lain yang dapat menjawab hal tersebut.

*“oh, ada untuk alatnya, sebelum di pakai di sertifikasinya di sini, alatnya boleh jalan atau enggaknya, jadi ada dokumennya, bahwa alatnya aman sebelum digunakan. (setelah mengetahui sertifikasi untuk masyarakat) oooh.. nanti di pak muhibin, atau BLK nanti data wawancaranya di pak muhibin yah,,”* (Wawancara dengan Koord. Pengawas K3 Disnaker, Mustahal, pada 01 April 2016 pukul 11.02 WIB).

Ketika peneliti mengkonfirmasi ke BLK, di BLK belum adanya sertifikasi yang diberikan untuk bidang peleburan baja maupun yang berkaitan dengan industri berat. Berikut ini yang disampaikan oleh I<sub>2-5</sub>:

*“belum ada kalau di kita, itu kan industri berat, kita kan belum mampu, tapi kalau kedepan kita ada pengembangan, (sambil mengingat-mengingat) kita ada pengembangan jurusan baru. eeeeeee (sambil mengingat), jurusan mekanik, eh, teknik, ke teknologi, ini bubut, kita juga akan mengadakan jurusan bangunan, gitu. Itu juga kedepan karena ada permintaan untuk bidang bangunan.”* (Wawancara dengan Kepala BLK, Syarifudin, pada 01 April 2016 pukul 11.20 WIB).

Adapun dalam memberikan panutan dalam menyikapi kesenjangan di masyarakat, justru BLK melempar bahwa hal tersebut yang lebih berwenang adalah Disnaker, berikut pernyataan I<sub>2-5</sub> :

*“(batuk sesaat).. kita mencetak itukan tenaga non skill yah, sebenarnya soal kebutuhan perusahaan kan kita gak tau kan, lowongan pekerjaan yang mereka kerjakan itu apa kan kita gak tau yah, tapi kalau .. harusnya memang ada di disnaker yah, pencari kerja kan urusannya ada disana, disnaker tuh. Kan ada data penerimaan, itu disnaker. Nah, di disnaker kan ada BLK, terkait ketenaga kerjaan kalau di disnaker ada bidang yang namanya bidang penempatan tenagakerja, data yang itu ada di kalau setelah mereka kemampuannya memadai, nah, baru itunya disini.”* (Wawancara dengan Kepala BLK, Syarifudin, pada 01 April 2016 pukul 11.20 WIB).

Adapun mengenai ketegangan sosial, Dinsos menyatakan bahwa dalam memberikan kepeloporannya sesuai dengan visinya, yaitu

terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, berikut yang disampaikan oleh I<sub>1</sub>:

*“Dinas Sosial Kota Cilegon sesuai dengan visinya, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, tentunya berupaya untuk (a) meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Cilegon, termasuk didalamnya Ciwandan, (b) memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kota Cilegon, misal meningkatkan peran serta karang taruna atau LSM maupun lembaga sosial lainnya di Kecamatan Ciwandan, (c) meningkatkan pelayanan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, termasuk PT. Krakatau Posco melalui program CSR dalam peningkatan kesejahteraan.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 01 Juni 2016 pukul 9.18 WIB).

I<sub>1</sub> juga menyatakan yang memelopori untuk CSR tertuang di dalam peraturan, berikut pernyataannya:

*“Yang memelopori berdasarkan (sambil mengingat-ingat), bapak lupa PP berapa, nanti download saja, tapi mengenai CSR di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban masyarakat yang di dalamnya lingkungan masyarakat, termasuk juga kewajiban perusahaan penanganan kesejahteraan sosial di wilayahnya.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 01 Juni 2016 pukul 9.18 WIB).

Mengenai kekhawatiran masyarakat akan prostitusi, sebagai salah satu ketegangan sosial yang terjadi, Dinsos selaku yang memelopori melakukan upaya yaitu meningkatkan ekonomi bagi para wanita-wanita PSK dan melakukan razia. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh I<sub>1</sub>:

*“Berupaya dari segi ekonomi bagi wanita-wanita itu (PSK) dengan pembentukan keterampilan bagi PSK Kota Cilegon yang bekerjasama di Jakarta, Pasar Rebo dalam rangka mengurangi. Dengan kegiatannya pertama, razia PSK setahun 4 kali bersama dengan kepolisian, Satpol PP dan TNI, dengan Dinsos sebagai pelopornya”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 01 Juni 2016 pukul 9.18 WIB).

ketika peneliti mempertanyakan siapa yang merencanakan pembuatan mes khusus untuk WNA, karena sebelumnya terdapat pernyataan mengenai mes pada dimensi inovator. Namun I<sub>1</sub> menyatakan bahwa hal tersebut berada pada dinas lain. Adapun pernyataannya sebagai berikut: *“(berfikir sejenak) kalau mengenai mes, itu Dinas Tata Kota, nanti bisa ditanyakan ke sana, kalau kita mengenai kesejahteraan”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 01 Juni 2016 pukul 9.18 WIB).

Dan salah satu ketegangan sosial yang lainnya yaitu kekhawatiran karena kurangnya Iman dan Takwa dengan masuknya berbagai pendatang, I<sub>1</sub> menyatakan bahwa hal tersebut yang lebih berwenang adalah kementerian agama. Berikut pernyataannya: *“kalau mengenai IMTAK, coba dateng ke Kementrian Agama, disitu pasti ada bagian-bagiannya, atau kalau tidak, ke Dinas Pendidikan aja.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 01 Juni 2016 pukul 9.18 WIB).

Adapun pernyataan yang dapat juga mewakili mengenai kepeloporan mengenai ketegangan sosial yang dilakukan oleh Dinsos dinyatakan oleh I<sub>1</sub> dengan cara melakukan operasi pada tempat-tempat tertentu, berikut pernyataan oleh I<sub>1</sub>:

*“Sebenarnya memang di Kota Cilegon itu tidak boleh adanya suatu lokalisasi yah, tidak adalah. Kota Cilegon tidak ada lokalisasi untuk PSK, tapi tidak menuntut kemungkinan mereka tetap ada di tempat-tempat tertentu, maka diadakanlah suatu operasi.”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 31 Maret 2015 pukul 10.14 WIB).

Selain itu I<sub>1</sub> juga menambahkan bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara metode dan formula yang diperbaharui. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1</sub>:

*“Ga ada yang lebih sederhana, justru semakin kesini permasalahan di masyarakat semakin rumit, tapi tugas kita bagaimana supaya melayani dengan baik dengan formula-formula dan metode yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya”* (Wawancara dengan Sekretaris Dinsos, Romli Rohani, pada 01 Juni 2016 pukul 9.18 WIB).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka peran pemerintah sebagai pelopor adalah masih terbatasnya pemerintah Kota Cilegon sebagai panutan atau printis, karena kepeloporan dalam menyikapi ketenaga kerjaan atau kesenjangan dimasyarakat masih adanya lempar-melempar oleh aparatur. Mengenai alat beratpun yang memelopori adalah dari pihak industri itu sendiri. Namun pemerintah Kota Cilegon sebagai bentuk pelopornya dalam menyikapi ketegangan sosial yaitu berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, termasuk melakukan kepeloporan untuk meminimalisir adanya PSK sebagai bentuk mengantisipasi dari banyaknya pendatang, yaitu dengan cara peningkatan ekonomi pada wanita-wanita pekerja dan mengadakan suatu operasi.

### **4.3 Pembahasan**

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian (2009:142) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan. Konsep, dimensi, dan strategi*. Dimana peran pemerintah merupakan proses dalam pembangunan.

Peran yang dalam hal ini peneliti gunakan ialah selaku stabilisator, selaku inovator, dan selaku modernisator. Selanjutnya dalam penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco di Kecamatan Ciwandan dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat dari aspek stabilisator, inovator, modernisator dari peran tersebut. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

### **1. Selaku stabilisator**

Kondisi sosial yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Pemerintah sebagai stabilisator dari aspek sosial budaya agar tidak berubah menjadi ketegangan sosial, maka peran pemerintah tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara, seperti proses sosialisasi. Untuk proses sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon dalam menyikapi ketenagakerjaan seperti mengenai informasi lowongan pekerjaan yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Padahal adanya undang-undang keterbukaan publik, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Sebelumnya adanya oknum atau pihak yang menerima lamaran pekerjaan untuk dipekerjakan di PT. K.Posco. Namun kini yang hendak bekerja tersebut mengajukan lamarannya melalui pihak KS, jadi pihak KS yang akan menyeleksi. Maka dengan adanya satu badan yang menerima rekrutmen pegawai tersebut bisa untuk meminimalisir konflik. Konflik tersebut dapat terjadi karena adanya kecemburuan sebagian masyarakat pada masyarakat atau warga yang diterima untuk dipekerjakan di industri (PT.KP) melalui oknum tertentu. Disnaker juga

menyatakan bahwa tidak ada kewenangan untuk memaksakan PT. Krakatau Posco menerima warga Kota Cilegon yang tidak sesuai kualifikasi. Namun Disnaker berharap 50% sampai 60% untuk tenaga *non skill* atau jabatan operator diduduki oleh warga Kota Cilegon, meskipun persentase tersebut tidak tertulis dalam sebuah aturan. Berarti dari jumlah lowongan pekerjaan bagian operator pada bulan februari sampai juli 2014 adalah 24 orang dari 40 orang. Bentuk sosialisasi pemerintah yang dalam hal ini Disnaker adalah dengan mengadakan kegiatan *job fair* sebagai sarana untuk meminimalisir adanya gejolak tersebut.

Berdasarkan deskripsi data penelitian, stabilisator sosial melalui pendidikan masih belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan PT. Krakatau Posco, meskipun ada beberapa yang memang dibutuhkan, seperti pelatihan operator. Namun hal tersebut masih dirasa kurang. Karena bentuk pelatihannya lebih kepada pengembangan keterampilan seperti tata boga, menjahit dan kecantikan (rias pengantin). Adapun pelatihan yang diberikanpun berasal dari industri masing-masing ketika sudah masuk di industri tersebut sesuai dengan bidang pekerjaannya, termasuk PT. Krakatau Posco. Belum adanya pendidikan atau pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan PT. Krakatau Posco karena terkendalanya fasilitas, baik fasilitas fisik maupun tenaga ahlinya. Adapun pendidikan mengenai keagamaan agar secara sosial tidak menimbulkan gejolak akibat pengaruh industrialisasi pemerintah Kota Cilegon yang dalam hal ini pihak Kecamatan Ciwandan terbilang lebih menyerahkan pada individu masing-masing.

Sedangkan pendekatan persuasif pemerintah Kota Cilegon dalam stabilitas sosial tersebut sudah cukup baik. Meskipun diawal adanya gejolak yang



diakibatkan kecemburuan mengenai tenaga kerja, karena saat itu masyarakat Ciwandan jarang yang diberi kesempatan untuk bekerja di PT.K.Posco, namun dengan pendekatan persuasif atau ajakan secara halus dengan memberikan pengertian, sehingga dapat mereda gejala tersebut, adapun pengertiannya yaitu pemberian pemahaman bahwa melakukan anarkis adalah hal tidak baik, selain itu adanya pemahaman bahwa yang akan menyeleksi adalah pihak yang ahli dibidang industri, meskipun saat ini gejala tersebut mulai muncul lagi. Adapun ajakan atau pendekatan persuasif yang dalam hal ini diwakili oleh disnaker ditujukan kepada perusahaannya, yaitu anjuran untuk melapor ke disnaker jika ada lowongan.

Adapun ajakan dalam menyikapi persoalan sosial yang dalam hal ini kekhawatiran masyarakat jika berbaur dengan WNA, karena adanya PT.K.Posco tidak menampik memicu industri-industri bermunculan. Dari beberapa industri yang berkaitan dengan Posco saja terdapat 14 perusahaan yang menjadi sponsor bagi WNA yang bekerja di Kota Cilegon. Sehingga dengan adanya industri tersebut mobilitas penduduk yang masuk menjadi tinggi. Perbedaan jumlah TKA cukup mencolok dari tahun 2012 dengan tahun 2013 sampai awal 2014. Pada tahun 2012 saja terdapat 769 orang, sedangkan pada tahun 2013 sampai awal 2014 tercatat 2.439 orang. Pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon sudah cukup baik, yaitu kerjasama dengan toko agama, meskipun lebih pada kewaspadaan diri sendiri. Karena benteng terbesar yaitu faktor internal pada individunya.

Pendekatan bertahap namun berkesinambungan atau secara terus menerus maupun keberlanjutan sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai stabilisator dibidang sosial budaya. Karena dalam pembangunan diperlukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) pun sama dalam menyelesaikan permasalahannya.

Tenaga kerja berkebangsaan Korea merupakan warga terbanyak dibandingkan dengan berkebangsaan lain. Perbedaan budaya antara Indonesia dengan Korea dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dinsos juga melakukan tindakan secara terus menerus seperti menyeleksi, memonitoring semua tempat hiburan. merujuk pada deskripsi data penelitian, peneliti menilai bentuk pendekatan bertahap namun berkesinambungan yang dilakukan Pemkot dalam menyikapi penyakit sosial yaitu dengan diadakannya “operasi”, namun hal tersebut juga diperlukan secara berkala dan perlunya tahapan-tahapan selanjutnya untuk meminimalisir penyakit sosial tersebut.

Ketegangan sosial yang awalnya disebabkan karena kekhawatiran masyarakat dengan adanya WNA kini sudah semakin memudar, hal tersebut karena sikap dari para WNA yang mulai tidak mengganggu masyarakat dan hanya sebatas jalan-jalan saja.

Untuk mempermudah pemahaman peneliti, maka peneliti membuat tabel hasil penilaian atas dimensi stabilisator sebagai berikut:

Tabel 4.6

## Hasil Penilaian atas Dimensi Stabilisator

Kriteria Penilaian	Hasil penilaian
Bidang Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah, atas informasi lowongan kerja kurang tersebar merata</li> <li>- Pendidikan atau pelatihan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri</li> <li>- Pendidikan bidang agama pemerintah menyerahkan pada individu masing-masing</li> <li>- Pendekatan persuasif untuk mereda gejolak sudah baik, yaitu melalui pemberian pemahaman bahwa anarkis adalah tidak baik dan pemahaman bahwa yang akan menyeleksi adalah orang yang ahli dibidang industri</li> <li>- Ajakan pada persoalan sosial sudah cukup baik, yaitu bekerja sama dengan toko agama</li> <li>- Pendekatan bertahap sudah cukup berkesinambungan, Dinsos dengan mengadakan “operasi” tempat hiburan</li> </ul>

(Sumber: Peneliti, 2015)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sementara mengenai dimensi Stabilisator bahwa Pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya jatah lowongan pekerjaan di PT. Krakatau Posco untuk masyarakat Kecamatan Ciwandan tidak secara menyeluruh, hanya pada orang-orang tertentu saja, padahal informasi tersebut sudah didelegasikan kepada Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga memicu kecemburuan terhadap pemerintah setempat, namun Pemerintah Kota Cilegon dapat meredam gejolak di masyarakat tersebut karena pemerintah melakukan pendekatan dengan meyakinkan bahwa mengenai lowongan tersebut akan diseleksi secara adil. Namun Pemerintah Kota Cilegon belum mampu memberikan pendidikan keterampilan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan industri, dimana industri PT. Krakatau Posco bergerak di pengolahan

baja, namun pelatihan yang diberikan oleh pemerintah yang mana BLK Kota Cilegon sebagai lembaga pelatihan hanya dapat memberikan pelatihan dalam skala rumah tangga, hal tersebut disebabkan masih terkendalanya Pemerintah Kota Cilegon mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan pelatihan untuk skala industri berat, karena selain karena anggaran, sumberdaya manusia, juga belum mendapatkan informasi secara akurat dari industri mengenai kebutuhan apa saja yang tepat.

Dalam mengatasi ketegangan sosial karena perbedaan budaya, pendekatan Pemerintah Kota Cilegon yang dalam hal ini Dinsos sudah cukup baik dengan bekerja sama dengan toko agama, sehingga melalui toko agama tersebut dapat secara langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai Keimanan dan Ketakwaan. Meskipun pihak Kecamatan Ciwandan mengenai pendidikan keagamaan menyerahkan kepada individu masing-masing. Selain secara personal, Dinsos juga melakukan pendekatan secara berkesinambungan yaitu dengan cara melakukan “operasi” tempat hiburan untuk menciptakan lingkungan sosial yang nyaman.

## **2. Inovator**

Inovator merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan, yang berarti dapat sebagai proses pemecah masalah bagi pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Dari dimensi inovator diketahui bahwa dalam inovasi di lingkungan birokrasi sudah cukup baik, terutama dalam mengatasi banjir. Menurut Pasolong (2011:68) Birokrasi merupakan lembaga pemerintah yang

menjalankan tugas pelayanan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Kemudian Pasolong menambahkan bahwa birokrasi pemerintahan dewasa ini, dimana para pejabat memainkan fungsi dan peran dengan menggunakan kekuasaan yaitu jabatan, kewenangan, dan legitimasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan objektif pemerintahan masa kini.

adanya ketidak transparan dalam pemberian kompensasi maupun informasi lowongan pekerjaan di Posco. Padahal di dalam dokumen RPL PT. Krakatau Posco, pada bagian pendekatan sosial ekonomi, bantuan peran pemerintah meliputi penerimaan tenaga kerja lokal, dan perencanaan program *community developmen*. Pada penerimaan tenaga kerja lokal, langkah-langka yang ditempuh PT. Krakatau Posco dengan bantuan peran pemerintah tersebut yaitu menginformasikan kepada masyarakat sekitar tentang lowongan pekerjaan. Berarti birokrasi pemerintahan dalam sistem kerjanya belum mampu transparan.

Padahal dalam Sarundajang (2005:233-234) menjelaskan bahwa untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat, aparatur pemerintah daerah harus profesional baik dari segi teknis, administratif maupun manajerial. Sarundajang juga menambahkan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh aparatur pemda pada globalisasi ini adalah antara lain keterampilan mengidentifikasi masalah, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sebagai perantara strategis (*Strategic Broker skills*).

Pemerintah yang berperan sebagai inovator yang dalam hal ini inovator konsepsional harus menjadi sumber dari ide-ide baru. Inovasi secara konsepsional

yang diberikan Disnaker yaitu adanya rencana yang jika disetujui akan dibuat pembinaan pelatihan. Seperti pelatihan-pelatihan kerja, tempat kursus, menjahit, tata boga. Namun hal demikian dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu juga adanya rekomendasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan setempat untuk dipekerjakan di PT. Krakatau Posco. Meskipun pada diawal adanya gejolak masyarakat karena merasa ketidakadilan dan ketidakmerataan informasi jika ada lowongan. Menurut KBBI, Nepotisme merupakan perilaku atau kecenderungan untuk mengutamakan keuntungan sanak saudara sendiri. Padahal dengan adanya informasi keterbukaan publik berarti perlunya pemerataan informasi publik. Jika merujuk seperti yang diungkapkan oleh Parker dan Dunn (1972) dalam Severin (2011:306) bahwa apabila akses ke pelayanan informasi ini tidak tersedia secara universal di seluruh masyarakat, maka mereka yang telah “kaya informasi” bisa menuai manfaat sedangkan mereka yang “miskin informasi” secara relatif menjadi miskin. Pelebaran “kesenjangan informasi ini” bisa menyebabkan ketegangan sosial yang meningkat.

Menurut Soekanto (2003) migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Sedangkan masalah sosial menurut Soekanto (2012:311) merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Dalam menyikapi ketegangan sosial seperti kekhawatiran akan WNA, Dinsos belum menemukannya kasus tersebut selama operasi. Namun saran yang diberikan Dinsos adalah dengan melanjutkan pendidikan dan melalui kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat memilah antara positif dan negatif. Akan tetapi korelasi antara pendidikan dengan situasi saat ini dirasa kurang sesuai, karena adanya WNA atau mobilitas penduduk yang cukup pesat dalam rentang waktu yang cepat. Saran merupakan pendapat, usul, anjuran, atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Maka saran yang merupakan makna lain dari inovasi konseptual, yaitu adanya saran dari pemerintah Kota Cilegon untuk membuat mes yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal WNA.

Dari segi inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja pemerintah Kota Cilegon cukup baik. Karena dalam inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja maka pendekatan yang diperlukan adalah pemecahan masalah dan bagaimana *action oriented*. Dimana memerlukan legalitas dan pendekatan situasional sebagai bentuk pemecahan dan aksinya.

Namun Dinsos dalam memberikan inovasi untuk menyikapi ketegangan sosial yang diakibatkan atas pembangunan PT. Krakatau Posco belum secara tepat, karena belum dapat memberikan informasi secara detail inovasi seperti apa yang dimaksud. Adapun adanya pendekatan secara situasional sebagai bentuk inovasi seperti menutup tempat hiburan tertentu, karena adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon yaitu Kota Cilegon dilarang adanya tempat diskotik atau hiburan malam. Dimana secara legalitas tertuang dalam SK

Walikota 300/Kep.145.Disbudpar/2014 Tentang penutupan penyelenggaraan hiburan malam.

Jika mengenai tenaga kerja, tidak adanya inovasi secara legalitas, namun tetap pada acuan yang ada, yaitu Perda Nomor 02 Tahun 2009 yang berisi memprioritaskan warga lokal. Namun dengan catatan harus yang sesuai dengan kualifikasi. Di dalam dokumen RKL juga dipaparkan adanya bantuan peran pemerintah mengenai tenaga kerja yang akan memprioritaskan tenaga lokal atau yang sudah cukup lama tinggal di Cilegon. Dengan adanya prioritas tersebut menyebabkan ketegangan dimasyarakat, baik yang disebabkan adanya indikasi titipan orang-orang dewan, maupun ketidak merataan informasi ketika ada lowongan tenaga kerja yang diprioritaskan untuk warga sekitar PT.KP dimana pihak pemerintah setempat merekomendasikan warganya yang belum bekerja untuk dipekerjakan di PT.KP. Merujuk pada wawancara di disnaker, mengindikasikan adanya nepotisme dalam rekrutmen, karena dalam pernyataan disnaker adanya harapan Perda tersebut dapat berjalan dengan baik, dan menjelaskan kebiasaan nepotisme dalam dunia nyata untuk menghindari kerepotan perusahaan.

Oleh karena itu, adanya pengambilan sikap yang dilakukan untuk menekan gejolak tersebut dengan cara mendelegasikan KS sebagai pihak yang menerima dan menyeleksi karyawan untuk dipekerjakan di PT.KP.

Untuk mempermudah pemahaman peneliti dalam menilai dimensi inovator, maka peneliti membuat tabel hasil penilaian tersebut sebagai berikut:



**Tabel 4.7**  
**Hasil Penilaian atas Dimensi Inovator**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Hasil penilaian</b>
Inovasi dilingkungan birokrasi	- Aparatur pemerintah kurang transparan atas informasi lowongan tenaga kerja
Inovasi Konsepsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan pelatihan kerja yang akan dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan industri</li> <li>- Saran atau rekomendasi tenaga kerja yang dilakukan kurang merata</li> <li>- Saran dinsos untuk melanjutkan pendidikan dan melalui kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat memilah antara positif dan negatif masih kurang sesuai dengan kondisi saat ini</li> <li>- Adanya saran oleh pemerintah untuk membuat mes bagi WNA PT.KP</li> </ul>
Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya sikap menutup tempat hiburan malam</li> <li>- Secara legalitas pemerintah mengeluarkan SK Walikota 300/Kep.145.Disbudpar/2014 Tentang penutupan penyelenggaraan hiburan malam.</li> <li>- Adanya legalitas mengenai tenaga kerja, namun mengacu pada peraturan yang ada</li> <li>- Rekomendasi untuk dipekerjakan di PT.KP belum efektif</li> <li>- Adanya gejolak dari masyarakat, namun Pemerintah sudah mengatasi dengan cara memberikan pemahaman dan mendelegasikan KS sebagai pihak penyeleksi untuk dipekerjakan di PT.KP</li> </ul>

(Sumber: Peneliti, 2015)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas mengenai dimensi Inovator. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa aparatur belum sepenuhnya transparan dalam keterbukaan informasi mengenai adanya lowongan tenaga kerja di PT. Krakatau Posco, karena masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan informasi tersebut, sehingga informasi tersebut hanya sampai di Kelurahan, bahkan pihak RT pun selaku pihak yang lebih mengenal karakteristik masyarakatnya juga tidak mendapatkan informasi tersebut, selain itu juga karena

informasi tersebut tidak ditunjang melalui teknologi yang ada untuk pemerataan informasi. Hal tersebut juga karena secara konsepsional pemerintah masih kurang dalam mengatasi dampak sosial. Adapun secara konsepsional inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon yang dalam konteks ini adalah Disnaker akan membuat pembinaan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, namun inovasi yang akan dibuat adalah pembinaan keterampilan skala kecil, seperti akan adanya pembinaan pelatihan seperti kursus menjahit dan tata boga, hal tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketidak transparan industri, terbatasnya sumber daya manusia untuk dijadikan pelatih, dan terbatasnya anggaran, karena jikapun mengadakan pelatihan yang sesuai dengan industri maka diperlukan biaya yang cukup besar, beberapa hal tersebut merupakan hambatan pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan pelatihan yang sesuai dengan industri berat.

Cara atau metode yang dilakukan oleh Disnaker untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja yaitu dengan cara merekomendasikan masyarakat yang belum bekerja untuk dipekerjakan di PT. Krakatau Posco tidak begitu efektif, karena aparaturnya yang tidak memanfaatkan teknologi sebagai penunjang penyebaran pemerataan informasi, sehingga kecemburuan tersebut masih terjadi. Sehingga metode selanjutnya yaitu dengan cara mendelegasikan pihak ketiga, yaitu Kratau Steel sebagai pihak yang menyeleksi sebelum bekerja di PT. Krakatau Posco. Hal tersebut sudah cukup baik, hanya saja peraturan legalitas yang digunakan oleh pemerintah mengacu pada peraturan yang sudah ada sebelumnya, tanpa adanya legalitas hukum yang baru, sehingga kurang sesuai

dengan situasi terkini, karena di dalam peraturan yang lama tidak tercantum secara jelas mengenai prioritas tenaga kerja lokal.

Kemudian saran yang diberikan Dinsos yang berupa saran untuk masyarakatnya melanjutkan pendidikan agar dapat berfikir secara mandiri juga kurang sesuai dengan kondisi saat ini, karena mobilitas penduduk yang cukup pesat dalam tempo yang cepat, sehingga kesadaran untuk mengenyam pendidikan tinggi sebagai bentuk saran yang diberikan dalam mengatasi ketegangan sosial kurang efektif. Sehingga dengan pemerintah memberikan saran pembuatan mes khusus dan adanya legalitas peraturan pemerintah dalam bentuk SK Walikota merupakan langkah yang baik, karena hal tersebut cukup efektif untuk mereda ketegangan dimasyarakat.

### **3. Modernisator**

Dari dimensi modernisator, diketahui bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dapat disebut juga IPTEK bagi pemerintah masih kurang memadai. Kesiapan Dinsos akan IPTEK dengan cara mempercanggih pelayanan dalam bentuk online dirasa sudah cukup baik, hanya saja dalam penggunaannya belum tepat. Meskipun untuk Disnaker merasa tidak ada kaitan antara dengan berdirinya Posco dengan pelayanan rutinitas. Padahal dengan semakin berkembangnya industrialisasi maka semakin kompleks juga masalah. Merujuk pada wawancara sebelumnya, artinya masih belum meratanya kepekaan akan teknologi yang seharusnya teknologi informasi yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan positif, yang dalam hal ini mengenai informasi lowongan tenaga kerja. Selain itu juga mengindikasikan bahwa Disnaker masih belum memanfaatkan

teknologi yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Cilegon maupun sebagai media koordinasi dengan PT. KP, karena pada wawancara sebelumnya Disnaker merasa tidak mendapatkan informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT.KP. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Setiadi dkk (2006:173) bahwa dalam menghadapi era teknologi modern dan industrialisasi dituntut untuk menggunakan, mengelola, dan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Sehingga kegagalan akan kepekaan teknologi (gaptek) tidak lagi menjadi alasan untuk tidak menjadikan negara yang modern.

Mengingat PT. Krakatau Posco merupakan *joint venture* antara Posco dengan PT. KS. Dimana Posco yang *notabene*nya perusahaan Korea, biasanya perusahaan induknya akan membawa pekerja yang berasal dari negara dimana perusahaan tersebut berasal. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Siagian (2009:144) bahwa masalah yang ditimbulkan dari negara maju yang menanamkan modalnya ke negara miskin atau berkembang seperti repatriasi keuntungan kenegara sendiri, tidak terjadinya alih pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja lokal yang tidak ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya dan sistem imbalan yang digunakan bersifat diskriminatif.

Dari uraian tersebut maka diperlukan pemberdayaan dengan diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya. Pemberdayaan menurut Papilaya dalam Zubaedi (2007:41) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Selanjutnya pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Berkaitan dengan aspek penilaian pemberdayaan tersebut dari hasil wawancara sebelumnya pemerintah dalam pemberdayaannya sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya sesuai. Adapun pemberdayaan yang diberikan lebih pada peningkatan ekonomi. Baik melalui usaha keluarga, maupun yang diberdayakan oleh pengusaha lokal untuk bekerja di PT. Krakatau Posco.

Meskipun demikian, karena tujuan pemberdayaan masyarakat adalah agar mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, maka ketika terjadinya gejolak di Kecamatan Ciwandan dapat juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan, karena adanya usaha untuk memberdayakan atas nasibnya ketika merasa adanya ketidakadilan atau ketika adanya tekanan maupun ketidakberdayaan. Meskipun pemberdayaan memiliki kesan hampir sama dengan pendidikan atau pelatihan, namun memiliki perbedaan. Meskipun pelatihan terjadi jika adanya pemberdayaan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman peneliti dalam menilai aspek dimensi modernisator, maka peneliti membuat tabel hasil penilaian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Penilaian atas Dimensi Modernisator**

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian
Penguasaan IPTEK	- Pemanfaatan teknologi kepada masyarakat mengenai lowongan tenaga kerja kurang
Rakyat yang diberdayakan	- Pemberdayaan lebih pada peningkatan ekonomi

(Sumber: peneliti,2015)

Dari uraian pembahasan dan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT.KP masih kurangnya memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dengan industri, sehingga pemerintah yang dalam hal ini Disnaker kurang mendapatkan informasi dari PT. Krakatau Posco mengenai data pekerja dan informasi akan kebutuhan *skill* yang diperlukan pihak industri. Sehingga akan mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Pemanfaatan teknologi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya lowongan tenaga kerja juga tidak dilakukan, hal tersebut karena Disnaker belum mengoptimalkan *website*.

Kemudian pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat lebih pada peningkatan ekonomi, yaitu dengan cara memberikan bantuan bahan baku untuk usaha skala keluarga, dan memberikan prioritas khusus kepada masyarakat lokal untuk dipekerjakan di PT. Krakatau Posco melalui pengusaha lokal.

#### **4. Pelopor**

Pemerintah dalam menjalankan perannya selaku inovator, maka pemerintah dapat juga menjalankan perannya selaku pelopor. Dalam dimensi

pelopor diketahui bahwa masih kurangnya pemerintah memainkan peranan, yang dalam hal ini disnaker memberikan kepeloporan pada keselamatan kerja. sanksi yang diberikan pun hanya berupa teguran ketika terjadinya kecelakaan kerja. Agustino (2008:158) mengatakan bahwa salah satu strategi yang sering digunakan oleh aparatur administrasi atau aparatur birokrasi dalam upayanya untuk memenuhi implementasi kebijakan publik, ialah dengan cara menghadirkan sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya. PT.Krakatau Posco sebagai industri baja terpadu yang bergerak dalam bidang *integrated steel plant*, sudah sepatutnya tunduk pada peraturan keselamatan dan kesejahteraan kerja. Selain itu juga aparatur birokrasi juga semestinya dapat memberikan panutan kepada masyarakat dengan kepeloporan dalam mengambil tindakan tegas kepada industri yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Adapun yang memberikan pelatihan untuk alat berat yang mempelopori adalah dari industri itu sendiri, sehingga BLK sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas masih belum dapat memberikan keterampilan kerja secara optimal, padahal salah satu fungsi BLK adalah penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja. Hal tersebut dikarenakan selain faktor belum adanya kesiapan atau kemampuan dari BLK sendiri, dapat juga karena koordinasi yang kurang terjalin dengan baik dalam menyikapi ketenaga kerjaan.

Ketegangan sosial yang merupakan rasa kekhawatiran maupun kecemasan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sehingga Dinsos sebagai salah satu aparatur negara memberikan kepeloporan atau panutan dalam menyikapi

ketegangan sosial yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan peningkatan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Adapun untuk mewujudkan kesejahteraan, Dinsos dengan cara memberikan keterampilan kepada wanita yang bekerja pada dunia malam atau tepatnya PSK, karena diharapkan dengan peningkatan ekonomi dapat mencegah aktifitas prostitusi. padahal, peningkatan ekonomi tidaklah serta merta dapat mengatasi permasalahan sosial. Seharusnya antara pembangunan ekonomi sejalan juga dengan pembangunan sosial. Kurangnya kesiapan akan keimanan dan ketakwaan menimbulkan keresahan dengan adanya WNA yang tinggal berbur di pemukiman masyarakat. Pada dimensi sebelumnya, yaitu inovator, adanya pernyataan mengenai adanya kebijakan yaitu dengan pembuatan mes khusus untuk WNA. Namun Dinsos pada pernyataan dideskripsi data bahwa hal tersebut yang lebih mengetahui adalah instansi lain. Dinsos juga tidak memprioritaskan mengenai Iman dan Takwa, karena hal tersebut kewenangan kementerian keagamaan.

Dari pernyataan diatas tersirat bahwa aparat pemerintah memiliki peran yang cukup penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nugroho (2004:11), bahwa peran setiap negara dalam arti pemerintah semakin penting dalam membangun daya saing global. Dalam konteks ini adalah Kota Cilegon. Sehingga pentingnya pemerintah memelopori penguatan individu, jika pemerintah sendiri kurang mengapresiasinya, maka sulit mengharap masyarakat untuk dapat menaruh perhatian pada kemajuan pengetahuan yang berimbas pada kesejahteraan



masyarakat atau kenyamanan hidup. karena masyarakat pada dasarnya menginginkan kelayakan hidup, baik dari segi ekonomi, sosial, seperti yang diungkapkan oleh Hermanto dan Winarno (2013:194) bahwa Hidup manusia dalam lingkungan sosialnya, pada dasarnya menginginkan terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, damai, tentram, dan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agar penjelasan di atas mengenai penilaian atas dimensi pelopor dapat mudah dipahami lebih jelas, maka peneliti mencoba menguraikannya ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini:

**Tabel 4.9**

**Hasil Penilaian atas Dimensi Pelopor**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Hasil penilaian</b>
Bidang Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ekonomi pada PSK yang dilakukan oleh Dinsos Kota Cilegon</li> <li>- Dinsos tidak memprioritaskan dalam memberikan panutan mengenai kesiapan keimanan dan ketakwaan (IMTAK)</li> <li>- Ketidak tahuan Dinsos mengenai siapa yang memelopori pendirian mes khusus untuk WNA</li> <li>- Pelatihan industri berat dipelopori oleh pihak industri</li> <li>- Yang memelopori keselamatan kerja adalah semua pihak</li> </ul>

(Sumber: Peneliti, 2016)

Berangkat dari hasil pembahasan serta tabel di atas, maka dapat peneliti simpulkan sementara mengenai dimensi Pelopor bahwa masih kurangnya pemerintah Kota Cilegon memelopori mengenai mempersiapkan daya saing global, baik melalui kurangnya kesiapan mental dan skill. Meskipun adanya upaya

dengan memberikan peningkatan ekonomi kepada PSK, karena dengan meningkatnya kesejahteraan PSK diharapkan bergantinya profesi sehingga tercipta lingkungan sosial yang baik. Namun Dinsos tidak memprioritaskan mengenai kesiapan Keimanan dan Ketakwaan masyarakat, karena kewenangan tersebut berada di Kementerian agama dan di Dinas Pendidikan, Dinsos juga tidak mengetahui mengenai pelopor yang mendirikan mes khusus untuk WNA.

Kemudian pemerintah tidak memelopori pelatihan maupun sertifikasi industri berat, namun dilakukan oleh pihak industri, hal tersebut disebabkan karena ketidak tersediaan dana yang memadai untuk menunjang sarana dan prasarana, sehingga tidak adanya fasilitas untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kota Cilegon sebelum bekerja. Namun untuk keselamatan kerja dipelopori oleh semua pihak, baik industri, mitra industri, pekerja itu sendiri dan juga pemerintah, yaitu dengan cara mendatangi industri dan diberikannya pemahaman mengenai keselamatan kerja.

Dari pembahasan hasil penelitian atas keempat skema penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat memberikan informasi bahwa peran pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT. Krakatau Posco belum berjalan dengan optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka penyimpulan akhir tentang Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam mengatasi dampak sosial atas pembangunan PT.Krakatau Posco dikatakan belum optimal. Adapun secara dimensi sebagai berikut:

Peran pemerintah dalam hal stabilisator belum optimal, sebab prioritas tenaga lokal tidak terpenuhi. Meskipun adanya upaya untuk mengatasinya, seperti diberikannya pemahaman kepada masyarakat oleh pemerintah baik mengenai ketegangan sosial maupun ketegangan yang terjadi akibat prioritas tenaga kerja yang tidak terpenuhi.

Peran pemerintah dalam hal Inovator dapat dikatakan relatif cukup, sebab pihak KS yang menyeleksi tenaga lokal, dikeluarkannya SK Walikota 300/Kep.145.Disbudpar/2014 Tentang penutupan penyelenggaraan hiburan malam maupun dibuatnya mes khusus untuk WNA. Meskipun informasi mengenai rekomendasi tenaga kerja yang tidak tersebar merata, akan ada pembinaan pelatihan keterampilan seperti tata boga, menjahit yang kurang sesuai.

Peran pemerintah dalam konteks modernisator belum optimal, sebab pelatihannya hanya seperti tata boga dan menjahit, dan pengumuman atau informasi mengenai lowongan tenaga kerja lewat papan pengumuman yang ada di disnaker.

Peran pemerintah dalam konteks pelopor belum optimal, karena masih kurangnya pemerintah Kota Cilegon mempelopori mengenai mempersiapkan daya saing global, seperti Dinsos tidak memprioritaskan dalam memberikan panutan mengenai kesiapan IMTAK, dan pelatihan industri berat dipelopori oleh pihak industri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran, yakni berupa rekomendasi seperti berikut ini:

1. Untuk menstabilkan dari dampak sosial yaitu diharapkan pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya rekomendasi lowongan tenaga kerja, membuat pelatihan atau pendidikan keagamaan kepada masyarakat 2 minggu sekali.
2. Penerapan e-Government dengan optimal, seperti memanfaatkan teknologi sebagai penunjang informasi kepada masyarakat dan kepada industri. dan diharapkan pemerintah lebih aktif mengoptimalkan pembinaan baik kepada aparaturnya seperti pelatihan bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik setiap 1 bulan sekali. Mempertegas peraturan mengenai ketenagakerjaan, khususnya mengenai tenaga kerja asing yang *non skill*.
3. Mengoptimalkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang diperuntukkan bagi masyarakat, seperti pelatihan proses pembuatan baja dengan melaksanakan sertifikasi, maupun membuat

papan pengumuman elektronik di tiap-tiap Kelurahan yang terintegrasi media internet yang diperuntukkan bagi masyarakat Ciwandan.

4. Untuk memelopori persiapan daya saing global dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelatihan kepada warga Kota Cilegon sebelum bekerja

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Black, James A. dan Dean J. Champion. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Penerjemah: E. Koswara, Dira Salam, Alfin Ruzhendi. Bandung: Refika Aditama.
- Djarmiko, Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto N. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Fisip Untirta Press.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: Rja Grafindo Persada.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Editor: Wisnu Chandra Kristiaji. Jakarta: Erlangga.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Editor: Khaeroni. Jakarta: Ditperta Depag.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, 2005. *Kybernology: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Sadyohutomo, mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanusi, bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sarwono, Wirawan sarlito . 2002. *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Setiadi, elly dkk. 2013. *Ilmu sosial budaya dasar*. Jakarta: prenadamedia
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjafari, 2007. *Pembangunan masyarakat*. Dalam sjafari (syunting), *Community Development sebagai Dasar Otonomi Daerah*. Bogor. CDI Press
- Soekanto, Soryono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Raja Grasindo.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grasindo.
- Sugiyono. 2007. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat (kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial)*. Bandung: Refiaka aditama.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi publik: untuk keuangan & pembangunan daerah edisi pertama*. Jogjakarta: Andi.
- Susanto, Astrid. 1979. *Komunikasi Pengendalian dan Komunikasi Pengawasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Tjokrokroamindjojo, bintoro. 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: Haris Munandar dan Puji A.L. Jakarta: Penerbit Erlangga

Usman, Husain dan Purnomo Setiady A. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara

Zubaedi. 2007. *Wacana pembangunan alternative, ragam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*. Jogjakarta: AR-Ruzmedia.

**Jurnal** : Rosenau, James. 1996. *political Psychology*, Vol. 17, No. 4.

**Dokumen** :

Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 231 /1/IP/PMA/2010

-2013. 14 Tahun Kota Cilegon Mewujudkan Program Pro Rakyat Menuju Cilegon Sejahtera

**Sumber Lain/ internet:**

<http://beritacilegon.com/index.php/berita-cilegon/cilegon-raya/5391-perotes-masalah-pencemaran-lingkungan,-warga-ciwandan-duduki-pintu-gerbang-pemkot-cilegon.html> , 09 Agustus 2014, 23.47 wib

<http://news.metrotvnews.com/play/2014/03/07/216734/pendemo-dan-polisi-bentrok-di-depan-pt-krakatau-posco>, 23 April 2014, 19.45 WIB

<http://news.cahayabanten.tv/hallo-banten/news/6047/demo-pt-krakatau-posco-bentrok/>, 12 November 2013, 14.46 WIB

<http://news.liputan6.com/read/371514/kota-cilegon-kembali-tergenang-banjir>, 14 November 2013, 16.07 wib

<http://www.nusationews.co.vu/2014/03/prostitusi-karaoke-berkedok-restoran.html> diakses, 9 Juli 2014, 10.45 WIB

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/ekonomipdrb.php?ia=3672&is=3> jum'at 17 mei 2013

Pasawahan. 2009. "Koordinasi".  
<http://aguspasawahan.wordpress.com/2009/10/01/koordinasi-2/> diakses pada tanggal agustus 2014 pukul 22.09 WIB.

Hermanto winarno 2013 194





# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Ploso (0294) 20130 Ext. 228, Fax. (0294) 201241 Palangkaraya Serang Banten  
url: <http://www.fkip-untra.ac.id>, Email: [kemah@fkip-untra.ac.id](mailto:kemah@fkip-untra.ac.id)

Nomor : 33 /UN.43.6.1/PQ/2014

11 Maret 2014

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *ijazah* mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: sfilian Nisa
NIM	: 6661090710
Semester	: X
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam Pembangunan PT. Krakatau Posco di Cilegon
Data diperlukan	: - Jumlah tenaga kerja lokal dan asing - Perda IMTA - data dan wawancara terkait peran pemerintah Kota Cilegon

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan **ijin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
  
Kim Yuliani, S.P., M.S.  
NIP. 197407052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi

Jl. Raya Jakarta KM.4 Phone (0274) 281131 Ext. 228, Fax. (0274) 281141 Palangkaraya Serang Banten  
e-mail: <http://www.fkip-unirta.ac.id>, Email: [keomb@fkip-unirta.ac.id](mailto:keomb@fkip-unirta.ac.id)

Nomor : 196 / UN.43.6.1/PG/2014

24 Juni 2014

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Sosial Kota Cileng  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan [jre] mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Afilatus Nisa  
NIM : 6661090710  
Semester : X  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Analisis Dampak Pembangunan PT. Krakatau Posco Terhadap Kondisi Sosial Di Kota Cileng  
Data diperlukan : Data dan Informasi PMKS

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan **izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si  
NIP. 197407052006042011

Lembaga : UNTIRTA FISIP

Jangka Waktu Penelitian : 20 Juni 2014 s.d 20 September 2014

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Melaporkan kedatangannya, kepada Camat, Lurah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dengan memajukan Surat Rekomendasi Penelitian ini;
- b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey/ PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
- c. Harus mematuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Wajib mengajukan perpanjangan Penelitian /Survey/ PKL apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir tetapi pelaksanaan penelitian belum selesai;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat hal - hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya;
- f. Wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Kesbanglinmas Kota Cilegon, dalam waktu paling lama 1 minggu setelah selesai kegiatan Penelitian.
- g. Kepada Semua Instansi / Lembaga yang terkait dimohon bantuan seperlunya.

Cilegon, 23 Juni 2014

s.d. WALIKOTA CILEGON

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
CILEGON



MAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19620107 198703 1 008



## PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN KESBANG DAN LINMAS

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Lantai IV,  
Telp. : (0254) 376273 Fax. : (0254) 376273  
CILEGON - BANTEN

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 41 /Orgs.Kesbang/2014

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  - Surat dari UNTERTA Tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 1349/UN.43.6.1/PG/2014 tentang Permohonan Ijin Mencari Data.
- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan rekomendasi penelitian;

Walikota Cilegon, memberikan rekomendasi kepada :

- Nama : APIPATUN NISA  
Alamat Mahasiswa : Kp. Grentang Pelabuhan Rt. 010/006 Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel  
Judul Penelitian : Analisis dampak pembangunan PT. Krakatau Posco di Kota Cilegon  
Tujuan Penelitian : Mengetahui dampak pembangunan PT. Krakatau Posco di Kota Cilegon.  
Lokasi Penelitian :
  - Bappeda Kota Cilegon
  - Diskoper Kota Cilegon
  - Disbudpar Kota Cilegon
  - Disnacepil Kota Cilegon
  - Dinas sosial Kota Cilegon
  - BKBPP Kota Cilegon
  - Kecamatan Sekota Cilegon  
Bidang Penelitian : Administrasi Negara  
Status Peneliti : Mahasiswa  
Penanggung jawab : Rina Yuliani, S.Tn, M.Si



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi 1. Ilmu Administrasi Negara

2. Ilmu Komunikasi

Jalan [[[...]]] Jakarta KM. 4 Phone (0234) 280030 Ext. 225, Fax (0234) 281240 Palangkaraya Serang Banten  
url: <http://www.fkip-ustira.ac.id>, Email: [kontak@fkip-ustira.ac.id](mailto:kontak@fkip-ustira.ac.id)

Nomor : F. 52 / UN. 43.6.1/PG/2014

12 Juni 2014

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Direktur PT. Krakatau Posco Kota Cilegon  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan magang mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu [[[...]]] dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Afilia Nisa  
NIM : 6661090710  
Semester : X  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : [[[...]]] dampak pembangunan PT. Krakatau Posco terhadap kondisi sosial di Kota Cilegon  
Data diperlukan : Data dan informasi kepegawaian

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Rita Yuliani, S.P., M.Si  
NIP. 197407052006042011



**LAMPIRAN 2**  
**Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Teori Peran menurut Sondang P. Siagian (2004)

No	Dimensi Penilaian	Sub Dimensi Penilaian	Informan
1	<b>Stabilisator</b>	a. dibidang Ekonomi - Kesempatan usaha semakin luas - Proses industrialisasi berlangsung dengan Baik b. dibidang Sosial Budaya - Proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif - Melalui pendidikan - Pendekatan yang persuasif - Pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub> ,
2	<b>Inovator:</b>	a. Inovasi di lingkungan birokrasi. - bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan, dan cara berfikir pada pelayanan b. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. - Pendekatan situasional - Problem solving, action oriented	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub>
3	<b>Modernisator:</b>	a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi - Kesiapan/ kemampuan IPTEK memadai b. Rakyat yang diperdayakan - Pemberdayaan masyarakat	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub>
4	<b>Pelopop</b>	a. Panutan atau <i>role model</i>	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub>

(Sumber: Peneliti, 2014)

**PERTANYAAN WAWANCARA**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON**

1. Apakah dengan adanya PT. Krakatau Posco kesempatan usaha semakin luas dan bagaimana menciptakan kesempatan usaha?

2. Apakah ada seleksi yang ketat atau tinggi dalam mengatasi gejala sosial baik yang disebabkan ketenagakerjaan?
3. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Disnaker dalam menjaga terjadinya gejala sosial?
4. Pendidikan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi gejala sosial di Masyarakat?
5. Adakah pendekatan secara persuasif maupun secara berkesinambungan yang dilakukan oleh Disnaker dalam menjaga kestabilan sosial?
6. Bentuk inovasi seperti apa yang dilakukan di lingkungan birokrasi dalam menyelesaikan dampak sosial? (Cara bekerja, sistem kerja yang sederhana, pada pelayanan)
7. Adakah ide, saran dan pendapat secara konseptual?
8. Bagaimana Pemecahan masalah dan orientasi tindakannya apa dalam menyikapi kecemburuan masyarakat lokal?
9. Bagaimana pendekatan situasionalnya?
10. Bagaimana kesiapan IPTEK di Disnaker dalam menyikapi adanya pembangunan Posco?
11. Apakah kemampuan IPTEK di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Ciwandan dan Citangkil sudah cukup memadai?
12. Bagaimana pendidikan SDM yang dilakukan Disnaker dalam memajukan pembangunan di Kota Cilegon?
13. Bagaimana Misi Kota Cilegon `
14. Bagaimana pemberdayaan masyarakatnya?
15. Bagaimana agar masyarakat bersedia menerima perubahan?
16. Tantangan dan kendala
17. Bagaimanadalammenyikapipekerjadariluar. Khususnya OB yang terserap di PT.KP?
18. Bagaimanapemerintahsebagaipelepor? Siapa yang memelopori?
19. Bagaimanapemerintahsebagai*Role model* bias mengatasikesenjangan
20. Apakahselamainiadasertifikasiuntuk*maintenance*elektronik/mekanik?

## **PERTANYAAN WAWANCARA**

### **SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA CILEGON**

1. Biasanya dalam pembangunan industri adanya gejala sosial, bagaimana agar proses industrialisasi berlangsung dengan baik?
2. Apakah ada seleksi yang ketat atau tinggi dalam menstabilkan agar tidak terjadi gejala sosial?

3. Adakah sosialisasi yang dilakukan Dinsos dalam menjaga terjadinya gejolak sosial? Bagaimana proses sosialisasi tersebut, apakah dengan cara yang elegan tetapi efektif?
4. Pendidikan seperti apa yang dilakukan Dinsos dalam menjaga kestabilan sosial?
5. Adakah pendekatan secara persuasif (meyakinkan, mempengaruhi) dalam menjaga kestabilan sosial?
6. Dalam menstabilkan dibidang sosial (baik gejolak sosial) adakah upaya dengan cara pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan?
7. Inovasi seperti apa yang dilakukan di lingkungan birokrasi dari segi aparaturnya dalam menyikapi dampak sosial dari adanya PT.KP? (meliputi cara bekerja dengan cepat, tepat, sederhana, transparan, akuntable).
8. Adakah inovasi ide baru secara konsep dalam menyikapi tantangan yang ada, dan bagaimana koordinasinya?
9. Adakah aturan secara legalitas dan bagaimana penegakkan hukumnya?
10. Bagaimana kesiapan IPTEK di Dinsos dalam menyikapi adanya pembangunan PT.KP?
11. Bagaimana pemberdayaan masyarakatnya?
12. Bagaimana perencanaan jangka pendek dan jangka panjang Kota Cilegon yang berkaitan dengan dampak industrialisasi, terutama adanya PT.KP?
13. Bagaimana aparaturnya memberikan panutan dengan adanya ketegangan sosial yang terjadi di Kecamatan Ciwandan karena adanya PT.Krakatau Posco?
14. Bagaimana aparaturnya pemerintah sebagai pelopor (*panutan/role model*) dalam menyikapi kesiapan keimanan dan ketakwaan masyarakat?
15. Siapa yang merencanakan pembuatan mes khusus untuk WNA?

### **PERTANYAAN UNTUK WARGA**

1. Bagaimana upaya pemerintah kota cilegon dalam menyikapi adanya PT.KP dalam menstabilkan tenaga kerja maupun maraknya WNA.
  - Adakah aturan khusus atau himbaun dari pemkot/ wali kota?
  - Adakah pendidikannya?
  - Adakah ajakan secara halus atau tersirat?
  - Sosialisasi apa yang diberikan pemkot dalam menyikapi?
  - Adakah pendekatan bertahap namun terus menerus/ berkesinambungan

2. Bagaimana dari segi pelayanan dalam menyikapi permasalahan yang ada?
  - Ada ga sih pada saat-saat tertentu melakukan apa gitu.
  - Adakah saran/pendapat, maupun ide yg dari pemkot?
3. Adakah masyarakat yang diberdayakan, baik:
  - Pelatihan tenaga kerja,

**LAMPIRAN 3**  
Surat Pernyataan Informan

## SURAT PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ernie Lintang I.R*

Pekerjaan/jabatan : *PT.*

Membesarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan di bawah ini:

Nama : *Affan Nisa*

Pekerjaan : *Mahasiswa*

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan data dalam penelitian.

Cilegon, *03 - 10/Oktober* 2013



*Ernie Lintang I.R*

## SURAT PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak H. Setiadi Sufin

Pekerjaan/jabatan : PNT / DLG TUM. PEMERINTAHAN AEC. CILANGRAN

Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan di bawah ini:

Nama : Afifatun Nisa

Pekerjaan : Mahasiswa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.

Cilegon, 05 September 2015





## SURAT PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Roni. R., MPA

Pekerjaan/jabatan : PNS / Sekretaris Dinas Kota Cilegon

Membuktikan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan di bawah ini:

Nama : Afilatus Nisa

Pekerjaan : Mahasiswa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan data dalam penelitian.

Cilegon, 31 - Maret 2013

  
Dr. H. Roni. R.

SURAT PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Erkipudha*  
Pekerjaan/jabatan : *Ka BLK - Koto Alajas*

Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan di bawah ini:

Nama : Afifatun Nisa  
Pekerjaan : Mahasiswa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan data dalam penelitian.

Cilegon, \_\_\_\_\_ 2016

  
( *Erkipudha* )

## SURAT PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahni

Pekerjaan/jabatan : PNT / KALIBLATIHAN DAN PEDAGOGIS

Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan di bawah ini:

Nama : Alifatus Nisa

Pekerjaan : Mahasiswa

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.

Cilegon, 15 Juni 2015



( Wahni )

**LAMPIRAN 4**  
*Member Check*

### MEMBER CHECK

Hari/tanggal : KAMIS, 03 SEPTEMBER 2012  
Waktu :  
Tempat : KAMPUS SINYAR  
Nama Informan : SPENSI  
Usia :  
Pekerjaan/Jabatan : WARGAWATA

- |    |  |
|----|--|
| Q. | Bagaimana dampak pso?  |
| A. | Hujan deras  |
| Q. | Beberapa dampak?   |
| A. | di Gendang   |
| Q. | Proses ke pemerintahan atau ke pemerintah?                   |
| A. | Langsung pemerintah  |
| Q. | Bagaimana dengan pihak pemerintah (baik ketumahan/instansi)? |
| A. | Jauh sih.  |
| Q. | Pemerintah mempunyai legalitas?                              |
| A. | Tanya ke pak RT yang itu                                     |
| Q. | Bagaimana itu itu?   |
| A. | Gate-gate  |
| Q. | Apakah benar?  |
| A. | Berikut seperti itu  |
| Q. | Apakah ada keluhan dari pemerintah?                          |
| A. | (Diam)   |
| Q. | Apakah ada sosialisasi?                                      |
| A. | Sumbangan  |
| Q. | Apakah sudah sampai ke sini?                                 |
| A. | Sampai masuk ke rumah  |
| Q. | Ada yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir?        |
| A. | Paling sumbangan itu itu                                     |
| Q. | Sumbangan dari pihak mana?                                   |
| A. | itu itu pak RT   |
| Q. | Bagaimana dengan tenaga kerja?                               |
| A. | (Diam)   |

Q: Bagaimana perencanaan masyarakat agar tidak ada orang tua  
 An: sesuai waktu belajar, mendapat asupan makan baik dan obat-obatan.  
 Q: Bagaimana perencanaan jumlah penduduk dan penduduk dengan umur 0-4?  
 An: Tidak lebih satu perempuan. Terhubung dengan RP3PD dan RP3MD, dan lain-lain.  
 Q: Bagaimana pengajaran kepada masyarakat?  
 An: Berikan pengajaran lewat radio di desa, kelas pengajaran tentang  
 kesehatan.  
 Q: Apakah Puskesmas sudah menerapkan akan ada yang belajar di desa?  
 An: memang banyak program PKM di desa yang terkandung di sana, namun mungkin di tingkat pendidikan tersebut, belum banyak di masyarakat.  
 Q: Bagaimana di kecamatan akan rusak?  
 An: Tidak ada, hanya ke kecamatan.  
 Q: Tidak ada yang berdatang dari desa ke kecamatan dan kabupaten?  
 An: di Desa dan desa Puskesmas.  
 Q: Bagaimana masyarakat belajar dengan adanya PKM?  
 An: Hanya belajar mengenai belajar melalui program, pada dasarnya.

MEMBER CHECK

  
 Dr. H. Purni R.  
 Sekretaris Dinkes. Celjen

Qa	Adakah upaya kualifikasi untuk dalam (Amanan dan (Ampai)?
Aa	Tidak secara khusus dari sekumpulan lainnya.
Qa	Adakah fondasi dan secara teras??
Aa	Cara untuk bekerja sama dengan utas, klayi, wana-wana
Qa	Dengan maraknya proffhi. Bagaimana upaya masyarakat tidak berumur?
Aa	Di (Aman) Kikak ada lokalitasnya Pk, maka ada cara.
Qa	Berapa kali operasi dalam waktu tertentu?
Aa	Tidak terhitung tergantung situasi dan keadaan masyarakat
Qa	Jumlah orang yg terdampak sekarang dan dulu?
Aa	sekarang 30, sebelumnya 52.
Qa	Tau affected siapa?
Aa	Tahun yang lama, 2 bulan yg lalu 12.
Qa	Terdapat dimana?
Aa	Tempat kubur warung-warung pinggir jalan, hotel/hongkong
Qa	Adakah upaya fondasi bertahap (sepi) bertahap?
Aa	Ada ada ada ada ada, tapi menurut dengan pola-pola berbeda. Tapi itu sudah terdampak dari ada-ada, sudah sangat banyak masalah
Qa	Adakah adanya pola-cara mana/suara PTA?
Aa	Tidak bisa dari dua dua itu.
Qa	Bagaimana strategi? ekuitas/masyarakat akan terdampak dengan besarnya waktu?
Aa	Sejauh ini belum dilakukan, kembali pada masyarakatnya. Masih pada-
Qa	Adakah, pendanaan pada peng I (Amanan (Ampai)) akan seperti itu?
Qa	Itu itu ada kegiatan seperti itu?
Aa	Berjalan pada saat saat yang lalu, km jwb ada saja
Qa	Adakah masalah dari sisi aparaturanya dalam menyampi? masalah PTA?
Aa	Tidak berjalan sendiri, bermitra dengan PT, lembaga PTA, pada pemerintah, tenaga di dalamnya juga
Qa	Adakah perubahan sistem teras?
Aa	Pada saat ini dengan format baru, pada saat ini, pada saat ini.
Qa	Adakah masalah secara jendral menghidup? bagaimana yang ada?
Aa	itu baik. Dugaan (Ampai) Center data, tentang (Ampai) yang ada akan masalah kerajayaan.
Qa	Bagaimana kegiatan PTA di (Ampai)? dengan adanya PT. I. PTA?
Aa	itu baik. memperkaya pelayanan berbasis online.
Qa	Bagaimana IPTEK untuk masyarakat?
Aa	Pengembangan pusat. itu punya program.
Qa	Ada permasalahannya?
Aa	Dua ke dua, PTA (peranan keluarga teras)

### MEMBER CHECK

Hari/tanggal : 31 Maret 2017  
 Waktu : 10.14 WIB  
 Tempat : KANTOR DINDO KOTA CILEGON  
 Nama Informan : Drs. H. Sumi Suhani, MPd.  
 Usia : 47 Tahun  
 Pekerjaan/ Jabatan : TNK / SEKRETARIS DINDO KOTA CILEGON

Q1	Dimana pembangunan industri manufaktur terdapat di sini. Bagaimana agar pembangunan industri berjalan dengan baik?
A1	Adanya tempat parkir dan reguler cirikan adalah sangat penting, sehingga akses jalan dan Mu Cilegon agar tidak mengalami kemacetan. Selain itu, tempat parkir juga harus ada.
Q2	Dimana lokasi yang sudah terdapat apa?
A2	Sama saja adanya perkembangan budaya, nilai-nilai negara adalah dari sisi perbatasan kelas.
Q3	Adakah lokasi yg penting?
A3	Ada lokasi jual beli, lokasi pasar dan pihak kepolisian, TNI, dll. Semua budaya akan seperti di sini, tempat wisata, dll. mungkin di sini ada.
Q4	Pada berapa?
A4	Iya di bagian belakang. Dulu parkir di sini.
Q5	Benarkah industri kelas menengah - menengah ke atas?
A5	Iya. Bukan menyalah, tetapi menyalah, membuat semua tempat industri. Itu dulu parkir di sini. Tapi tidak ada.
Q6	Misalnya industri mana saja?
A6	Kepulauan (Pasar, pasar di sini), pabrik, kerajinan, perikanan dan lainnya, dll. dll. dll. dll. dll.
Q7	Kontribusi dengan DINDO, dalam hal?
A7	Jalan ini ke arah utara dan sebagainya?
Q8	Dengan berjalannya waktu, banyak masalah terdapat?
A8	Beberapa di antaranya adalah DINDO yang ada.
Q9	Sekarang dengan pihak lain, berjalan lancar?
A9	Lancar. di samping itu dan lainnya.
Q10	Bagaimana industri lainnya, apakah sudah cirikan sudah terdapat?
A10	Beberapa jalan dengan pihak lain, mereka pun sudah terdapat. Selain itu, beberapa jalan dengan pihak lain akan terdapat di sini.
Q11	Adakah upaya pemerintah dalam rangka menjaga keselamatan?
A11	Tentu. Pembangunan jalan raya juga sudah terdapat di sini.
Q12	Mengingat terdapat, apa saja?
A12	Tentu sudah ada terdapatnya juga di sini, dll.



Q1	Apakah ide atau saran secara konseptual agar bisa ada geladak? *smpun-ai
A1	Pembinaan baru baru merambat, hant lapor ke bta.
Q2	Bagaimana pemecahan masalah dan efektifitas Hndakannya?
A2	Menyederhanakan warga lokal, dan kualifikasi lokal
Q3	Pada no.2 lain yang sudah berjalan?
A3	Luah.
Q4	Bagaimana keluhan warga menyikapi adanya Posko?
A4	ga ada hubungannya dengan posko, jika pelayanan kerendahnya sudah nfn, cepat / tepat. Luah keram Posko.
Q5	Ditaker melebihi berapa jumlah Tenaga kerja asing?
A5	Tau.
Q6	Bekal mana?
A6	Yang memang Pak Prac, hari ini cafe ga ada.
Q7	Kendala dan tantangan?
A7	Kita belum mampu membuat program yang sesuai kebutuhan saat Posko.

Mengetahui



## MEMBER CHECK

Hari/tanggal : SENIN / 15 JUNI 2015  
 Waktu : 11:20 WIB  
 Tempat : DENAHER CLETON  
 Nama Informan : KAWAN  
 Usia : -  
 Pekerjaan/ Jabatan : KASI LITAS

Q	Bagaimana dengan adanya PISO, usaha serambi luar?
A	masih usut. sudah ada, ada penguraha lokal, komulti, kucor
Q	Adakah diaku yang keas/ engg dalam mengahse geladak?
A	keawangan ada di perusahaan
Q	Pemfahan ST-60% non sika harus warga ciptan itu bukan pebijakan?
A	itu kebijakan perusahaan.
Q	Adakah serahipati?
A	Mengembalikan agar masif. /warga ciptan yang diaku ada dan
Q	Adakah akurannya?
A	Pada no. 2 tahun 2003.
Q	Adakah pmd'aktan yang dilakukan Denaker agar mampu tang?
A	Ada pmd'aktan salah satunya operator.
Q	Adakah masif kontop'orone?
A	Tau akuraku, ada Pembinaan.
Q	Pembinaan untuk apa?
A	Pelatihan - pelatihan saja
Q	Adakah pmd'aktan fesan pmd'akti?
A	tau itu. Anjuran pmd'aktan ada keawangan pmd'aktan itu harus bayar ke kta.
Q	Bagaimana kemasyarakat'nya Ahn 'ada keawangan?
A	Ah perusahaan akuraku, ada akuraku
Q	Bagaimana untuk pmd'akti?
A	lapor. tapi ada via online, melaporkan melalui akuraku
Q	Adakah masif dari Denaker dari segi kmd'akti baik kmd'akti kmd'akti?
A	tau ada pmd'aktan dengan masif ke pmd'akti.

Q: Apakah akan baik mengenai lingkungan, ketertarikan masyarakat, dan lainnya?

A: Menyampaikan ke masyarakat

Q: Sebelumnya WNA sudah tinggal bersama masyarakat?

A: Tidak ada campur tangan rumah di kontrak

Q: Apakah ada masalah dengan orang-orang yang tinggal tinggal di mes?

A: Kadang bisa war-war.

MOHON CECUK



Suffendi.

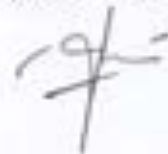
## MEMBER CHECK

Hari/tanggal : KAMIS, 04 SEPTEMBER 2015  
Waktu : 15.30 WIB  
Tempat : KANTOR KEMENTERIAN CIWANGKON  
Nama Informan : BRINA H. SUPENDI SATMI  
Usia : 62 TAHUN  
Pekerjaan/ Jabatan : PNS / KASI TATA PEMERINTAHAN

- Q. Bagaimana upaya dan strategi mengatasi dampak sosial akibat krisis ekonomi?
- A. Melalui multilevel meliputi sektor publik dan beberapa
- Q. Sampai daerah mana dulu yang terdampak krisis ini?
- A. Daerah Baku sudah hampir selesai.
- Q. Bagaimana dengan ke-chauvinisme masyarakat kelas menengah?
- A. Karena faktor mana karyawan pada daerah kurang.
- Q. Bagaimana menyikapi masyarakat yang khawatir akan ketertinggalan?
- A. Menghimbau agar tidak terpengaruh secara umum yg melihat dgn fokus.
- Q. Merasa mentah?
- A. Iya. Ada yang bilang kelas menengah
- Q. Bagaimana menyikapi masyarakat yang kerja dari luar?
- A. Pekerjaan berat di handle oleh orang lokal
- Q. Sekarang banyak yang bekerja di Pesisir?
- A. Alhamdulillah ya!
- Q. Adakah perubahan agar masyarakat mudah bersaing?
- A. Ada. Itu salah satunya
- Q. Bagaimana dengan banjir?
- A. Itu karena tersumbat dan saluran tidak dibersihkan.
- Q. Terus waktu banjir itu kapan?
- A. Belum lama ini
- Q. Adakah inovasi sistem kerja, maupun cara kerja birokrasi?
- A. Mengundang Pesisir
- Q. Adakah inovasi sistem manajemen dalam tenaga kerja?
- A. Pemerintah mendorong agar lebih banyak.

- Q10. CSR Berjalin!
- A10. Kurang tau. jayakan punkot.
- Q11. Adakah pemahaman CSR Mary. agar tidak merugikan budaya war. dia punkot?
- A11. Pemahaman dari agama dari dia.
- Q12. Adakah pembedaan mengenai siapa kerja?
- A12. Kalau untuk papa sudah tau. siapa punkot.
- Q13. Bagaimana agar Mary. menerima perubahan?
- A13. Kebudayaan beda. ga banyak diartikan. ga boleh campur.
- Q14. Adanya percampuran tempat tinggal dgn orang lain?
- A14. masih campur. kerjanya beda. kawatir sampai negatif.
- Q15. Bagaimana pengawasan dan koordinasi mengawasi dampak sosial seperti (tempat & hubungan)?
- A15. Punkot keuangannya ngawatin. monitor. agar tidak menimpang.
- Q16. Bagaimana koordinasi yg terjadi antara jika dia?
- A16. Hen Mary. mengadakan aksi. koordinasi dgn kelurahan, kecamatan, police, pamer.

member cek.



Q1	Bagaimana dan adanya pondasi?
A1	Makna pengaruh. Istilah hanya bekerja dalam. Karena I benar. ada 5th pengaruhnya.
Q2	Pengaruhnya secara positif atau negatif?
A2	positif = punya pengaruh tentukan. negatif = pengaruh waktunya tidak ada hanya ....
Q3	Adakah sosialisasi yg dilakukan postu?
A3	ada. Hanya sosialisasi dampak positif.
Q4	Sosialisasi dari pemerintah?
A4	Ikutan lewat sekuritas - sekuritas.
Q5	Untuk mengaitkan itu, bandit, maupun dampak lainnya. Ponsel melakukan sosialisasi?
A5	Ponsel motor.
Q6	Upaya ponsel melalui pondasi untuk kraga kerja?
A6	Luar BIK
Q7	Ya mengaitkan semua warga?
A7	Orbit / diarahkan dari sekuritas sekuritas.
Q8	Upaya ponsel secara positif mengatasi dampak negatif?
A8	Ada. mengaitkan ke-ke masyarakat.
Q9	Jika dari postu?
A9	kemungkinan dengan ke masyarakat sekuritas.
Q10	Bagaimana sistem kerja, pelayanan, transparansi pemerintah?
A10	transparan, menteri informasi dampak ke-ke.
Q11	Pelayanan?
A11	transparan. Ada sekuritas langsung di-ke.
Q12	IPTEK warga di-ke?
A12	Bagus. hanya belum di-ke sekuritas oleh pemerintah/pengusaha.
Q13	Pembudayaan?
A13	Bagus ada.
Q14	
A14	

- Q: Aspek dampak sosial lain, bagaimana bentuk-bentuk lainnya?
- A: Ad. Penderitaan akibat orang tua yang minum bir jadi mabuk sampai ke restoran lain, di hotel. Jika tidak sampai mabuk akan bisa lagi bekerja.
- Q: Apakah hal tersebut pengaruh media masyarakat?
- A: Tidak pengaruh, dampaknya ke orang-orang muda.
- Q: Bagaimana untuk dampak lainnya bentuk di wilayah mana?
- A: Di Cilegon, misalnya di kota ada di many, pegant, ds.
- Q: Untuk pengurusan, sebelumnya di data untuk berapa di prop?
- A: Menyang peran ada di kabupaten / kecamatan, menjadi wakil di forum. Selain ada yang di kelas.
- Q: Apakah pengaruh dari pencemaran udara?
- A: Dampak ke kesehatan, entah gatal, batuk-batuk, asma, ds.
- Q: Apakah upaya dari pemerintah untuk meminimalkan dampak?
- A: Ad. cuma hanya akan bergerak ke perusahaan jika ada protes dari warga.
- Q: Dari sisi sudah ada apa upaya?
- A: Ad. pencemaran - pencemaran di forbakli.
- Q: Bagaimana dengan banjir?
- A: Itu sudah ada dampak ada bangunan rusak vs menghambat saluran air.
- Q: Bagaimana kondisi sekarang?
- A: Pasir sudah banyak ada pasir air. Di belum maksimal.
- Q: Ada pengaruh pada umur tua dan adanya pasir?
- A: Ad. Ada-ada saja kesehatan, warung-warung rusak.
- Q: Bagaimana dan fasilitas (bunak) dekat pasir?
- A: Masih ada di. Warga banyak bergerak. Jika banyak di buatkan, tidak di buatkan.
- Q: Bagaimana dan tingkat masalah?
- A: Tidak ada.

### MEMBER CHECK

Hari/tanggal : Kamis, 05-Maret 2015  
 Waktu : 17.40 WIB  
 Tempat : KP. Lijur Kelurahan Tegal RW 01/du 03/06  
 Nama Informan : H. Abdul Nuh  
 Usia : 42 tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Widyawana

- Q1. Bagaimana pengaruh dengan adanya pasok?
- A1. Dari sisi penganggaran pengaruh, karena memang ada beberapa yg bekerja di pasok, waktu tidak banyak.
- Q2. Berapa banyak warga yang direkrut?
- A2. Saya tidak tahu.
- Q3. Yang bekerja disana mendapat secara langsung apa melalui mekanisme tertentu? dan besarnya mendapat gaji apa?
- A3. Pabrik sebagai karyawan biasa, paling bagian operator. Luaran SITA yang banyak.
- Q4. Adakah dampak sosial lainnya?
- A4. Untuk lingkungan ya ada pencemaran air laut, setelah di demo berburas.
- Q5. Kedar ada keluhan keluhan yang bisa ingat?
- A5. Reaksi pengaruh dari lokasi tersebut?
- A5. Sesi yg di luar pasok paling banyak memang.
- Q6. Pemasok di luar rumah rumah apa?
- A6. Pemerintah belum, memang SITA ya meneruskan ke pasok, kemudian ke distributor belum ada.
- Q7. Apakah mengenai dari saat?
- A7. saya pasti tidak ada.
- Q8. Bagaimana proses industri/produksi di lokasi tersebut, sudah berjalan baik?
- A8. Pertumbuhan pabrik. Pemerintah tak tanggap dgn masalah-keluhan warga.
- Q9. Kurang tanggap bagaimana?
- A9. Masih ada pencemaran gas di lingkungan sekitar, paling bisa di demo. Setelah itu akan lagi, kemudian selak ngumpul entah berapa kali selak.



- Pa Apakah sekarang masih bingung ?  
Aa Gak.
- Pa Berapa jam antre saja atau setiap hari ?  
Aa Setiap hari
- Pa Bagaimana dengan fasilitas gratis ?  
Aa Gak gratis
- Pa Kenapa tidak efektif ?  
Aa (diam)
- Pa Apakah pernah membuat Bepri agar tidak campur ?  
Aa (diam)
- Pa Bagaimana dengan barang-barang sudah di publik ?  
Aa Gak tau sekarang
- Pa Apakah ada pembekalan lagi ?  
Aa Tidak
- Pa Apakah ada kegiatan ke depannya ?  
Aa Ada

PHOTO GRES



**LAMPIRAN 5**  
Transkrip Data dan Koding

## TRANSKIP DATA DAN KODING

Keterangan

Q: Pertanyaan

A: Jawaban

I : Informan

Q/I	A	KODING
<b>Q<sub>1</sub></b>	<b>Bagaimana agar proses industri berjalan dengan baik?</b>	
I <sub>1</sub>	<p>... suatu dampak yang perlu menjadi perhatian kita adalah dengan adanya pekerja-pekerja asing di Kota Cilegon, tentunya adalah budaya semakin berwarna, kita tau bahwa Cilegon adalah agamis, sehingga setidaknya pemda berupaya bekerja samalah dengan MUI Cilegon untuk sama-sama bagaimana sosial keagamaan berjalan tetap, bahkan lebih meningkat, walaupun daerah industri itu terus terang saja dari segi dampak sosialnya ada.</p> <p>Mungkin saya akan lebih menyoroti kearah sosialnya. Memang segala bentuk industrialisasi dimanapun, entah itu ada dampak positif maupun negatif, yang pasti adalah dampak positif lebih besar dari pada negatifnya. Salah satunya adalah terserapnya tenaga kerja.</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>
I <sub>7-1</sub>	<p>Kalau pertumbuhan industri di Kota Cilegon memang pesat, Cuma memang pemerintah tidak begitu tanggap dengan keluhan-keluhan warga. Misalkan ada pencemaran kalau kata saya bilang tidak ditanggapi secara serius, biasanya ditanganinya ketika ada perotes, demo, setelah itu diem, padahal memang pencemaran masih berlangsung, yah mungkin pabrik juga ada yang nakal. Harusnya pemerintah tuh ada atau tidak ada demo dari warga, yah dikontrol tiap berapa bulan sekali atau ketentuan dari LH sendiri gitu. Harus pro aktiflah pemerintahnya</p>	(4)
<b>Q<sub>2</sub></b>	<b>Apa dampak sosial yang negatif?</b>	
I <sub>1</sub>	<p>Tentunya salah satu dampak-dampak, emm.. dengan adanya percampuran budaya, adat dari negara asalnya dari segi pergaulan dari negara-negara selain Indonesia, pengaruhnya ada di kita</p>	(5)
I <sub>10-5</sub>	<p>Dampak positif dan dampak negatif pasti adalah dek, yang positifnya dulu, yang bagus-bagus, bahwa Posco boleh dibilang sih membawa efek ekonomi yang pasti. Membuka lapangan pekerjaan juga, pengusaha-pengusaha bisa bergerak kembali juga bisa, yah gitulah. Tapi kan bukan semata-mata dampak itu aja, sementara ekonomi baik, tapi faktor sosialnya patut diperhitungkan . tentunya negatifnya lebih banyak, karena saya lihat, Posco tidak menangani dengan baik, kalau ditangani baik oleh Posco serius, beneran, selagi yang banyak positifnya, negatifnya pasti adalah, tapi kan Posconya tidak menangani dengan baik. Dampak positifnya bukan iu saja sih, membangun lapangan pekerjaan, yang menggantungkan hidup bukan dari Cilegon, tapi dari mana-mana, silahkan aja, tapikan efek negatifnya lebih banyak, pertama, yang jelas faktor lingkungan berubah, kalau dari lingkungan nih, yah infrastrukturnya tidak disiapkan secara bagus, banjir karena saluran-saluran tertutup, debu yang tidak ditangani dengan baik, terus apa lagi, orang-orang asing</p>	(6)

	yang datang dibiarkan berkeliaran bebas seperti ini. Yah bebas artinya percampuran budaya yang kita tidak siap masyarakatnya, tidak dipersiapkan. Tambah, masyarakat banyak yang merasa dirugikan, orang melaut aja susah, karena aksesnya tidak disediakan. Biasanya orang atau nelayan bisa mancing, sekarang tambah jauh, tidak disediakan aksesnya, seharusnya ada yang berkewajiban menyiapkan, apakah pemerintah ataukah dari Posco, kita kan tidak tahu	
I <sub>10-6</sub>	Memang dari segi pengangguran ngaruh, karena memang beberapa warga yang bekerja di Krakatau Posco, walaupun tidak banyak, tapi ada lah.. yang direkrut.	(7)
<b>Q</b>	<b>Apakah hal tersebut telah terjadi?</b>	
I <sub>10-5</sub>	Sudah terjadi, mungkin yang muncul beberapa kasus, tetapi yang tidak muncul banyak dek, yang keliatan, yang muncul ke permukaan hanya satu dua, yang tidak muncul lebih banyak, seperti umpamanya apa yah, yah itu tempat hiburan dimana-mana, tidak hanya (berhenti sejenak), pemerintah daerah juga harus berperan, tapi tidak sinerginya, maka efek-efek itu bisa dihilangkan bila ditangani dengan baik, atau dikurangi, itu aja	(8)
<b>Q<sub>5</sub></b>	<b>Kenapa tidak ke pemerintahan terlebih dahulu?</b>	
I <sub>10-7</sub>	Karena (diam cukup lama)	(9)
<b>Q<sub>6</sub></b>	<b>Apakah kesempatan usaha semakin luas dengan adanya K.Posco?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Pengaruhnya ada, sebelumnya memang tidak ada, sekarang bisa usaha karena adanya Posco. Dari awal karena banyak orang pendatang kesini, itu dari usaha kontrakan juga ada, dinas-dinas juga ada. Pengaruhnya memang banyak, usaha warung-warung nasi juga ada, kontraktor juga.	(10)
I <sub>2-2</sub>	Masih umum, kalau pendapat sih boleh aja, tidak mewakili dinas. Kalau kesempatan usaha larinya ke CSR, kewirausahaan juga bisa, jadi cenderung ketenaga kerja, ada perusahaan lokal, ada pengusaha kontruksinya, ada usaha kuliner. Itukan peusaha, kalau buka kantin daerah sana, terus kalau banyak karyawan yang kerja, kan ada imbasnya. Yang pasti positifnya banyak, banyak perusahaan Korea itu modal yang gede, modal kecilnya warung-warung sekitar Posco, selanjutnya kontrakan, dulu di Ciwandan itu ga begitu, sekarang bertambah, perekonomian bisa meningkat, terus belanjanya banyak, nah gitu permintaan meningkat, jadi orang-orang yang belanja ke pasar jadi banyak	(11)
<b>Q<sub>7</sub></b>	<b>Apa dampak sosial dari adanya Krakatau Posco?</b>	
I <sub>10-1</sub>	Efeknya banyak. Membawa efek ekonomi, iya. Tapi kan ada negatifnya jauh lebih banyak, yaitu lingkungan jadi kacau, sosial budaya masyarakat Korea yang dengan budaya kita berbeda, kaya minum apa, mabuk, kaya gitu kan, terus ngomong kasarnya goda-godain perempuan di sini, yang gak jelas kaya gitu, mereka kaya gimana sih, bebas sama perempuan, kalau budaya kita kan hati-hati. Tapi perempuannya kita sendiri juga yang kurang dibentengi sama akhlak, sehingga yang dilihat banyak duitnya, itu dampak-dampak seperti itu mengerikan, jika sewaktu-waktu punya anak, mesti dijaga tauhidnya	(12)

I <sub>10-6</sub>	Ada. Kalau Posco kan kebanyakan orang luar, Korea, jadi kebudayaan atau budayanya beda dengan orang Cilegon, yah kita mah minumannya air putih, kalau mereka mah minumannya Bir atau Soju, makanya ini pengaruh sosialnya, dampaknya banyak. Tadinya tidak harus menyiapkan restoran Korea, jadinya menyiapkan restoran korea, diskotik untuk menyiapkan para tamu Korea ini, karena mereka mungkin kalau tidak ada tempat hiburan mereka akan balik ke sana karena memang budayanya begitu, kebiasaannya begitu. Kalau mereka tidak minum, tidak apa .. “ah di Cilegon mah tidak ada apa-apa, lebih baik pulang aja” makanya ada pihak pengusaha juga yang membuat restoran Korea, menyediakan itu. Makanya dampak negatifnya ini, itu.	(13)  (14)
<b>Q</b>	<b>Apakah tempat tinggalnya bergabung dengan masyarakat?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Yah gak gabung, Cuma tetep berbaur. Itu lingkungnya yang pasti tempat hiburan	(15)
<b>Q</b>	<b>Bukan kah mereka warga Korea memiliki tempat tersendiri?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Ada lokasinya, tapi kan yah tetap yang namanya manusia berkeliaran keluar, dia pengen tahu Indonesia bagaimana, <i>wong Cigading kaye ape</i> , kan gitu yah berbaur, jadinya efek negatif. Orang sudah disiapkan <i>geh</i> , sebenarnya efek negatifnya karena budaya kita berbeda dengan budaya mereka, mereka tidak mau mengikuti budaya kita, orang kitanya kebawa	(16)
<b>Q<sub>8</sub></b>	<b>Apakah ada tuntutan agar sesuai dengan keinginan mereka (warga Korea)?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Iya, dan itu juga sebagai fasilitas, misalkan untuk <i>service</i> dialah, merekakan tamu, sebagai pegawai, misalkan perlu ini..ini..ini.. paling tidak “yaudah disana juga ada” begitulah kalau disini ga ada fasilitas kaya gitu yah mereka gak mau. Gimana sih teh, misalkan si tete disimpan di daerah yang budaya beda, misalkan di suku Asma* gitu, “saya mau kerja di sana asal disediakan nasi, sayur asem, tempe” padahal di sana makanannya lain, tete ga suka. Kalau tidak ada “yaudah saya pulang aja, mending saya kerja di sana” secara ininya yah.	(17)
<b>Q<sub>9</sub></b>	<b>Apakah ada kecemburuan sosial mengenai tenaga kerja?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Yah jelas	(18)
<b>Q<sub>10</sub></b>	<b>Apa yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi mengenai tenaga kerja tersebut?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Tempatnya paling deketkan, tapi kenapa ga ada yang kerja gitu. Pernah pak Ikbil bilang, katanya uda ada di Kelurahan padahal kan yang tahu warganya kan RT. Kelurahan panggil dong RTnya kalau memang ada panggilan gitu, tapi kenyataannya mana, ga ada yang kerja di Posco, disini ga ada yang kerja di Posco, padahal pabriknya keliatan gitu, seharusnya kalau misalkan nilainya mesti 6, tapi dapetnya 5,5 oh, karena tinggalnya di sini jadi dinaikin jadi 6. Waktu itu juga pernah ngebul asap itu, keluar api, yah ledakan “pak, terus kalau dilihat dari radiusnya setengah kilo ga ada, sangat berat loh pak kompensasinya”, “oh uda di Kelurahan” tapi dari Kelurahan ga ada kompensasinya, saya panggil dong sebagai ketua RT, “ada jatah dari Posco, begini-begini..” nanti saya mengintruksikan kewarganya	(19)

I <sub>10-8</sub>	(diam, seperti tidak mendengar pertanyaan walaupun peneliti beberapa kali bertanya dengan tema yang sama, yaitu mengenai tenaga kerja)	(20)
<b>Q<sub>11</sub></b>	<b>Jadi pihak Posco sudah memberikan ke Kelurahan?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Iya memberikan segala sesuatunya ke Kelurahan	(21)
<b>Q</b>	<b>Jadi warga sini belum ada yang bekerja di Posco?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Ada, hanya satu orang, Cuma saya gak tau bagian apa.	(22)
<b>Q<sub>13</sub></b>	<b>Dengan adanya K.Posco, apakah banyak pendatang?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Cuma paling yang blok sana yang pendatang (sambil menunjuk arah barat), dari 80 warga, yang asli sini kurang lebih 50an, yang selainnya itu pendatang	(23)
<b>Q<sub>13</sub></b>	<b>Bagaimana dengan tingkat kriminal?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Dari segi pendatang sendiri tidak pengaruh dari adanya Posco itu. Pendatang juga pengaruhnya.. (berfikir) beda budaya yah, yang dari Jawa tengah ke sini, beda cara hidup mereka lah, misalkan kita (hening sejenak) karena mereka hanya kerja doang teh, setelah itu mah balik lagi. Pengaruh mah ada, Cuma karena sama-sama orang kita (Indonesia) Cuma beda wilayah doang, misalkan dari Surabaya, Jakarta, mereka di sini Cuma kerja doang.	(24)
I <sub>10-8</sub>	Tidak bermasalah, yang laporan tadi itu baru kali ini, pernah waktu itu ilang gas tabung sampe berapa banyak, Cuma sampai sekarang tidak tahu siapa, yah orang-orang itu juga	(25)
<b>Q<sub>14</sub></b>	<b>Apakah pengaruh tersebut secara positif atau secara negatif?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya juga si teh, kalau positifnya yah itu dari segi ekonomi, jadi punya kontrakan karena ada yang perlu kontrakan, jadinya punya penghasilan dari kontrakan, dari segi negatifnya yah biasanya pengontrak , maaf yah.. waktunya orang-orang sholat dia hanya (berfikir) maaf yah, kebanyakannya begitu, orang-orang pendatang gitu.	(26) (27)
<b>Q<sub>19</sub></b>	<b>Bagaimana dengan kondisi kesehatan?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Yaitu setelah di demo, KS.Posco turun, melakukan apa sih, yah (berhenti, mengingat) bakti sosial lah, gak tau apa namanya. Gatel, tapi tidak kena beneran, anak kecil terutama	(28)
<b>Q<sub>23</sub></b>	<b>Berapa banyak warga yang direkrut?</b>	
I <sub>9</sub>	Yah alhamdulillah 30% itu, yah makanya kemarin sempet demo itu, artinya dengan adanya pabrik-pabrik di Indonesia itu enggak harus orang asing, jika sekiranya pekerjaan yang bisa kita kerjakan, harusnya pake putra daerah	(29)
I <sub>10-6</sub>	Saya tidak tau, karena saya juga tidak tau jumlah keseluruhan Posco itu kan gak tau berapa karyawannya.	(30)
I <sub>10-8</sub>	Ada, hanya satu orang, saya ga tau bagian apa	(31)
<b>Q<sub>24</sub></b>	<b>Yang bekerja di PT. K.Posco biasanya menduduki posisi apa?</b>	
I <sub>9</sub>	Karyawan biasa, terus yang 70% orang sana, itulah kekhawatirannya	(32)
I <sub>10-6</sub>	Paling sebagai karyawan biasa, manejer keatas mah enggaklah yah, kalau orang –orang sini paling bagian operator. Karena memang lulusan SMA paling yang daftar di sana. Paling ada 1,2 yang S1	(33)
<b>Q<sub>25</sub></b>	<b>Apakah tenaga kerjanya langsung banyak menyerap warga lokal atau ada upaya lain?</b>	

I <sub>10-6</sub>	Yah harusnya industri yang ada di Ciwandan ini mengkhususkan atau memberi prioritas kepada warga setempat, artinya jangan mengambil yang jauh dulu, tapi ambillah orang yang terdekat terlebih dahulu	(34)
<b>Q<sub>26</sub></b>	<b>Apakah ada pendataan terlebih dahulu bagi yang menganggur untuk bekerja di Posco?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Memang pernah ada dari Kelurahan atau Kecamatan misalkan “nih orang yang menganggur di Kelurahan Tegalratu, tolong diterima” memang ada sebagian yang diterima, tapi ada juga yang lain yang mendaftarkan sendiri.	(35)
<b>Q<sub>27</sub></b>	<b>Disnaker sudah melakukan apa, adakah aturan khusus?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Belum	(36)
<b>Q<sub>28</sub></b>	<b>Bagaimana menyikapi banyaknya tenaga kerja dari luar?</b>	
I <sub>9</sub>	Nah, yang akhirnya pendekatan-pendekatan yang memang awalnya didrop oleh tenaga-tenaga ahli, Cuma disini karena K.Posco, jadi pekerja-pekerja berat yang bisa di handle oleh orang kita melalui KS. Pada waktu itu pemerintahannya. Posco menyerahkan ke KS waktu menyeleksi lamaran putra daerah	(37)
<b>Q<sub>29</sub></b>	<b>Bagaimana pemerintah Kota Cilegon menyikapi dampak atas pembangunan K.Posco?</b>	
I <sub>10-5</sub>	Belum ada upaya apa-apa dari pemkot, kecuali gotong royong bersiin kali sih iya. Kalau ngomongin untuk upaya, saya tidak tahu, dan mesti upaya apanya juga saya tidak tahu	(38)
I <sub>10-6</sub>	Kalau dari pemerintah sih belum, enggak ada. Paling yah memberi tegoran ke Posco, misalkan BLH menegor ke Posco, kalau tindakan kemasyarakatannya sih belum lah.	(39)
I <sub>10-7</sub>	Jauh sih, yang protes orang-orang Cigading. Kan dulu pake plang “Posco mematikan” sekarang sih enggak, uda diatasi. Kalau itu tanya ke pak RT deh, kalau pak RT pasti tau.	(40)
<b>Q<sub>34</sub></b>	<b>Apakah dari warga lapor terlebih dahulu?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Mungkin ada juga yang lapor, tapi kan ga lapor juga tau sendiri kan lewat media koran, Cuma kayanya dia langsung negor ke Posco	(41)
<b>Q<sub>36</sub></b>	<b>Pemecahan dan aksi seperti apa dalam menyikapi permasalahan yang ada?</b>	
I <sub>2-2</sub>	Memperioritaskan warga lokal, kualifikasinya sesuai, kalau ngomong yah tadi. Karena merekrut via online, kita gak tau yang lamar dari mana, dan mohon maaf, biasanya ada, tapi sekarang warga Cilegon uda gak gptek yah, ada yang mereka uda tau, ada yang lewat koran, lewat sini. Untuk menekan gejolak tadi biar warga Cilegonnya dikasih kesempatan. Terkadang dari Jakarta, Jogja, Bandung banyak yang melamar kitanya mah gak tau ada lowongan	(42) (43)
I <sub>10-6</sub>	Yah upaya sebetulnya sudah ada, yang saya katakan tadi, Cuma memang biasanya pemerintah akan menegor perusahaan itu jika memang ada protes dari warga, upaya mah ada, Cuma memang kurang maksimal lah, harusnya memang memberikan sanksi yang tegas kepada pihak industri yang betul-betul mencemari	(44)
<b>Q</b>	<b>Apakah sebelumnya sudah melakukan pengaduan ke pemkot?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Uh, uda pernah, uda kemana-mana nong, kita mah orang uda demo, uda segala macem, kalau urusan lingkungan mah banyak	(45)

	negatifnya, mau lewat BLH, lewat walikota secara pribadi, ke Posconya sendiri, yah dibener-benerin, enggak tahu hasilnya begini terus. Kalau saya mah luar biasa positifnya, secara pribadi saya kontraktor, jelas dapet orderan dari situ, tapi masyarakat yang lain. Walau saya kontraktor, saya mah demo aja, gimana wong debunya gak sehat. Sebenarnya mah, pemerintah mah gak perlu dilaporkan juga sudah tau lah, yah.. tapi jika sibuk dan tidak tahu yah dilaporkan	
<b>Q<sub>45</sub></b>	<b>Adakah seleksi yang ketat?</b>	
I <sub>1</sub>	Kita memang dapet amanah dari pemerintah Kota Cilegon, biasanya dampak itu di daerah industri yah,, industri itu tidak terlepas di dalamnya ada Krakatau Posco, ada industri Candra Asri, maupun industri-industri Krakatau Steel, dan lain sebagainya. Pokoknya notabennya Kota Cilegon adalah Kota industri. Satu rame dikunjungi orang, kedua kita tau bahwa kita terletak di perlintasan antara pulau Jawa dengan Sumatra, setidaknya rame sekali. Ada istilah ada orang yang banyak berkunjung ke sini dari berbagai adat daerah bahkan internasional berkunjung ke sini tujuannya adalah kerja, memperbaiki kehidupan, dan lain-lain dengan membawa budaya masing-masing. Adapun upayanya adalah agar kita tetap menjadikan warna, menjadikan indah, kita bekerja sama dengan kepolisian dengan TNI, maupun pihak terkait lainnya dalam rangka menjadikan budaya malam seperti diskotik, tempat karaoke, dan sebagainya tetap mengacu pada Perda-perda yang ada di Kota Cilegon.	(46)
I <sub>2-2</sub>	Kalau mengenai perusahaan yang menerima karyawan acuannya aturan, undang-undang, kewajibannya apa, kalau menyeleksi karyawan kewenangannya ada diperusahaan, bukan dikita. Kita itu Cuma mengumumkan kalau perusahaan itu wajib kalau mau merekrut karyawan harus melapor ke sini. Kalau ada perusahaan <i>anu</i> , ada lowongan, silahkan mendaftar ke sana. Pertanyaannya masih umum, lagi pula mereka untuk menangani gejolak itukan mereka biasanya <i>make</i> istilah ring 1, nah, itu yang jadi salah satu kebijakan, kewenangan ada diperusahaan, kita tidak mempunyai kewenangan kesitu. Sebenarnya jawaban saya itu hanya sebagai warga Cilegon, jadi saya menjawab yang saya tahu	(47)
<b>Q<sub>46</sub></b>	<b>Apakah ada aturan baik mengenai lingkungan hidup, kekhawatiran masyarakat, tenaga kerja?</b>	
I <sub>9</sub>	Yah tadi tu, paling dari kita menyampaikan kewaspadaan itu. Memang ada sih, karena memang dengan mereka pinter-pinter dengan bahasa mereka itu, “wis aje parek-parek wong bule”, bagaimanapun itu tetep bukan orang islam, apa lagi, mohon maaf, masyarakat itu yang terhadap perempuan-perempuan matrealistis, karena orang Korea tebal, gajinya 300 juta perbulan, itu kekhawatiran pemerintah itu takutnya orang-orang kita nanti berbaur dengan orang Korea, akhirnya menikah, dengan syarat masuk islam boleh-boleh aja kalau ngucapin dua kalimat syahadat, tapi kalau sholat enggak, apa tetep itu namanya zinah, karena orang korea bukan ahli kitab.	(48)
<b>Q<sub>47</sub></b>	<b>Perda berapa yang mengatur?</b>	



I <sub>1</sub>	Itu di bagian hiburan. Dinas Pariwisata	(49)
I <sub>2-2</sub>	Perda No.2 Tahun 2009, namun dengan catatan yang memenuhi kualifikasi, jadi kalau tidak memenuhi jangan dipaksakan, kita juga perusahaan juga pengen berkembang maju, masa diisi sama orang-orang yang tidak berkualitas	(50)
I <sub>10-6</sub>	Kalau aturan secara undang-undang saya belum pernah baca yah, tapi memang kesepakatannya semacam itu, harusnya 60-40, 60% dari warga sekitar, 40% dari luar.	(51)
<b>Q<sub>48</sub></b>	<b>Apakah perda nomor 2 tahun 2009 sudah berjalan?</b>	
I <sub>2-2</sub>	Sudah jalan, mudah-mudahan ga adalah yang ini, biasanya adakan, mau rekrut, mau ini, perusahaan itu, kita ngomong secara <i>real</i> , bikin laporan, bikin ini, yang ngelamar sampai ratusan, ribuan, “ada gak saudara yang lulusan ini” yang karyawannya mereka aja yang di dalemnya	(52)
<b>Q<sub>54</sub></b>	<b>Apakah ada penambahan diskotik?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Tadinya memang tidak begitu ini yah, bahkan sekarang memang sudah ditutupin yah. Artinya akan ditempatkan disuatu tempat karena memang itukan kebutuhan orang-orang luar itu, jadi itu dampak-dampak negatifnya, ada pengusaha yang harus bikin itu, adanya restoran Korea, tempat hiburan, itu dampaknya.	(53)
<b>Q<sub>55</sub></b>	<b>Apakah hal tersebut berpengaruh kemasyarakat?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Jelas pengaruhlah, dampaknya ke orang-orang muda yah yang masih labil. Karena ada restoran “kita kesana”, karena ada tempat-tempat hiburan “yuk coba kesana”, karena jiwa mudah ingin tahu lah, awalnya pengen tahu terus keterusan, ketagihan, dan terjerumus. Dampaknya ada. Tapi kalau yang disini tidak ada, artinya tidak lihat, tidak tahu, tidak mau tahu, gitu.	(54)
<b>Q<sub>56</sub></b>	<b>Dimana letak tempat hiburan?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Di daerah Cilegon kalau tempat hiburan misalkan disitu ada dinast*, ada Rege**, terus ada yang lain lah banyak disitu tempat hiburan, Cuma mungkin akan diusahakan lokalisasi, Cuma tidak tahu dimana	(55)
<b>Q<sub>57</sub></b>	<b>Berarti adanya seleksi tempat-tempat hiburan?</b>	
I <sub>1</sub>	Bukan menyeleksi, tetapi memonitoring, membina semua tempat hiburan, restoran, dan sebagainya, itu di Pariwisata yah,, tetep berkoordinasilah dengan semua aparat yang ada di Kota Cilegon.	(56)
<b>Q<sub>58</sub></b>	<b>Bagaimana sosialisasinya dalam menstabilkan gejolak sosial?</b>	
I <sub>1</sub>	Pelaksanaan sosialisasi itu tentunya kita kerja sama dengan pihak-pihak tadi, seperti mereka punya ukuran dan kelompok-kelompoknya. E.. sebagai ketua HIV, dan sebagainya. Ada komunitas tersendiri. Artinya selama ini lancar, karena dengan mitra-mitra baik yang ada di Kota maupun tingkat kecamatan. Kita juga bekerja sama dengan Pasar Rebo dalam penanggulangan HIV.	(57)
I <sub>2-2</sub>	Yah itu tadi, menganjurkan agar menerima warga Cilegon yang lebih banyak, tapi tetap harus sesuai juga kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Tapi kalau ada yang dari Cilegon, jangan ngambil dari luar, misalkan kualifikasi apa nih, butuhnya apa, cari dulu di Cilegon, kalau ga dapet boleh dari luar.	(58)
I <sub>9</sub>	Yah awalnya memang jauh-jauh hari pemerintah dalam hal ini Kecamatan, banyak masyarakat ada seseorang yang menampung,	(59)

	setelah ditegor artinya gak boleh seperti itu, tapi harus satu badan, pada waktu itu akhirnya di KS lah selaku orang yang menerima lamaran untuk ditaroh di Posco	
I <sub>10-6</sub>	Itu mah lewat kelurahan-kelurahan, hanya dikasih tau kalau disini akan dibangun pabrik Krakatau Posco, itu saja sosialisasinya. Ada juga sosialisasinya lewat media gitu. Kalau pemerintah menangani dampak itu, ada memang, cara menanganinya dengan cara menegor, memberi peringatan pada PT. K.Posco, artinya memberikan arahan bagian mana yang harus diperbaiki gitu, di selesaikanlah, paling begitu pemerintah	(60)
I <sub>10-7</sub>	Sumbangan-sumbangan gitu, paling sembako. Yah setahun sekali itu	(61)
I <sub>10-8</sub>	Himbauan di Kecamatan	(62)
<b>Q<sub>59</sub></b>	<b>Dalam rangka apa pembagian sembako tersebut?</b>	
I <sub>10-7</sub>	Dari Posco itu, pak RT yang tahu, dari Posco aja	(63)
<b>Q<sub>65</sub></b>	<b>Adakah upaya pendidikan yang dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan?</b>	
I <sub>1</sub>	Iya, memang kuncinya adalah pengembangan keterampilan pada masyarakat tertentu. Pengembangan keterampilannya seperti tata boga, kecantikan. Secara khusus di kecamatan tidak ada. Artinya secara umum seluruh 8 kecamatan kita programkan itu, terutama mereka yang masuk pada sasarannya.	(64)
I <sub>2-2</sub>	Yaitu tadi, kita Cuma baru bisa melaksanakan itu kalau di latas, tapi secara umum kita juga ada pelatihan, itu salah satunya operator, biar muda terserap di Latas juga ada komputer juga ada, itu kalau di Disnaker. Kalau dilatas kan Cuma sekuriti ama menjahit, kalau pemagangan itu bukan pelatihan, tapi yang di BLK kita magangkan	(65)
I <sub>9</sub>	Oh ada, itu balai latihan di BLK, jadi rata-rata pekerja K.Posco diBLK kan dulu, ada yang di Koreanya, di Jakarta, ada yang di Serang, jadi apa sih pekerjaannya yang harus dikerjakan? Itu contoh, itu khusus, bagian ngelas yah ngelas, listrik, yah listrik, bagian administrasi yah administrasi, gitu BLKnya, tapi karena rata-rata untuk industri yah yang diterima jurusan anak STM atau Insinyur lah, yah karena mereka ngerti dibidangnya	(66)
I <sub>10-6</sub>	Kalau itu mah lewat BLK itu yah, itu juga ada, Cuma gak sepenuhnya, hanya gak seberapa, itu aja, memang ada pelatihan-pelatihan.	(67)
I <sub>10-8</sub>	Belum ada	(68)
<b>Q<sub>66</sub></b>	<b>Siapa yang boleh mengikuti pelatihan?</b>	
I <sub>2-5</sub>	(berfikir sejenak) intinya kalau kita, untuk peserta pelatihan, kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui jalur surat resmi, ke kelurahan, kita juga lewat web, di facebook jg ada, termasuk untuk pendaftar juga ada disitu, karena kita memakai sistem online, gitu pendaftarannya, kita juga di gratiskan, jadi tidak dikenakan anggaran untuk tiap peserta, uda di jamin sama pemerintah daerah, di APBDN	(69)
I <sub>10-6</sub>	Biasanya direkrut, kalau yang bekerja di KBS ditarik dari beberapa kelurahan, “siapa nih yang mau mendaftar pelatihan, kita undang”	(70)
<b>Q<sub>67</sub></b>	<b>Adakah pendekatan persuasif atau ajakan dari pemerintah?</b>	

I <sub>1</sub>	Emm.. pendekatan persuasif itu memang secara khusus kita kerja samalah dengan ustad, kiyai, ulama-ulama di Kota Cilegon.	(71)
I <sub>22</sub>	Yah itu tadi, caranya kalau ada lowongan yah anjurannya harus lapor kekita, itu juga salah satu biar masyarakat umum yang bukan ring 1 juga bisa ikut biar ada pendapatan juga,	(72)
I <sub>10-6</sub>	Yah ada sih teh, memang ada, dengan cara menggandeng tokoh-tokoh masyarakatnya, baik dari pihak Posconya maupun dari pihak pemerintahnya memang ada secara persuasif.	(73)
I <sub>10-7</sub>	(diam, dengan pandangan ke depan, dimana kurang lebih 30 meter dari hadapannya ada sekumpulan orang yang sedang merobohkan bangunan dengan alat berat)	(74)
<b>Q<sub>69</sub></b>	<b>Bagaimana kemasyarakatnya kalau ada lowongan?</b>	
I <sub>2-2</sub>	Kalau ada lowongan tuh yah perusahaan melaporkan ke kita, ada perusahaan yang terbuka, ada juga yang tertutup	(75)
<b>Q<sub>70</sub></b>	<b>Dari Posco pendekatan seperti apa?</b>	
I <sub>2-2</sub>	Lapor, tapi ada juga yang mengungga via online, melaporkan setelah diterima. “ada penempatan nih”, kalau uda begini kita arahkan “pak, bu, kalau sebelum bimbingan, sebelum pas penempatan, pas mau pembukaan, laporkan kekita” itukan salah satunya untuk menekan gejolak tadi	(76)
I <sub>10-6</sub>	Yah dengan cara komunikasi dengan para tokoh masyarakat setempat gitu	(77)
<b>Q<sub>71</sub></b>	<b>Apakah pihak Posco ada skala waktu tertentu untuk komunikasi dengan masyarakat?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Kalau seminggu sekali sih enggak, karena memang ga ada waktu, Cuma kalau dia perlu yah turun ke warga, semacam upahnya lah, adalah tugas-tugasnya	(78)
<b>Q<sub>72</sub></b>	<b>Kalau dari pemerintah?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Yah langsung ke Kelurahan itu teh	(79)
<b>Q<sub>73</sub></b>	<b>Dengan maraknya Prostitusi, bagaimana agar masyarakat tidak terbawa?</b>	
I <sub>1</sub>	Sebenarnya memang di Cilegon tidak boleh adanya suatu lokalisasi untuk PSK. Tapi tidak menuntut kemungkinan mereka tetep ada pada tempat-tempat tertentu. Maka diadakanlah suatu operasi.	(80)
I <sub>9</sub>	Yah awalnya ke warung-warung itu, berdasarkan hasil mustika antara Kelurahan, Kecamatan, Koramil, Polsek, duduk bersama, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa warung itu menjual minuman, juga mohon maaf, warung itu melayani badan. Akhir oleh mustika ini oleh trantib Kecamatan dimonitor oleh pakaiat preman, ternyata bener, makanya dijadikan alat bukti. Itu mah terang-terangan melakukan itu, yang meresahkan itu	(81)
<b>Q<sub>74</sub></b>	<b>tiap Berapa kali “Operasi”?</b>	
I <sub>1</sub>	Secara rutin memang tidak dijadwalkan seperti sebulan sekali atau berapa kalinya, tapi tetap kita lakukan lah itu, tergantung pada situasi di lapangan, tidak terlepas dari pada pengaduan masyarakat, termasuk aparat-aparat kita yang ada di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Dibulan ini ada 4 kali. Yang oleh Dinsos saja sudah 2 kali	(82)
<b>Q<sub>75</sub></b>	<b>Jumlah orang yang terjaring kondisi sekarang dan dulu?</b>	
I <sub>1</sub>	Februari bulan kemaren 25. Tapi sebelumnya 2 bulan yang lalu 52.	(83)

	Memamng dari sekian orang itu kita tidak tau apakah mereka benar-benar PSK atau bukannya nanti di Pasar Rebo.	
<b>Q76</b>	<b>Terjaring dimana?</b>	
I <sub>1</sub>	Tempat hiburan, tempat warung-warung pinggir jalan, hotel/penginapanlah, gitu yah..	(84)
<b>Q77</b>	<b>Adakah upaya pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan?</b>	
I <sub>1</sub>	Artinya kita tidak boleh bosan . dimana terus saja dengan pola-pola yang berbeda. Terus memang PSK kurang lebih begitu yah,, apakah hobi atau suatu pekerjaan, kita tidak tau, itu dari jaman dulu ampe sekarang juga gak abis-abis gitu. Ampe pemerintah Kota Cilegon melarang lokalisasi. Tapi kok tempat tersembunyi tetep ada. Dimanapun tempat pasti ada.	(85)
<b>Q78</b>	<b>Bagaimana dengan tempat hiburan, semakin banyak dengan adanya WNA?</b>	
I <sub>9</sub>	Yah pada waktu itu pernah terjadi di Krenceng, yah di Kubang sepat, yang akhirnya sampai shubuh, yang akhirnya dibatasi oleh pemerintah Kota Cilegon sampai jam 10 atau 11 malem gitu, pada waktu itu bulan puasa, gak tahu sekarang apakah berjalan atau enggakya, soalnya pak haji gak pernah ngeluyur kalau masalah hiburan. Memang bener masalah hiburan yah, tapi banyakan orannng-orang Korea sedikit berkurang yah, gak tau lah	(86)
<b>Q79</b>	<b>Berkurang bagaimana?</b>	
I <sub>9</sub>	Artinya tempat seperti itu gak seperti di Jakarta, kalau di sini ga ada, enggak kaya di Cilegon, kalau di Cilegon ada. Kalau mau hiburan keluar aja	(87)
<b>Q80</b>	<b>Apakah masyarakat tidak perlu khawatir mengenai tempat-tempat hiburan tersebut?</b>	
I <sub>9</sub>	Was-was, karena yang terjun bukan hanya orang Korea saja, orang kitanya, orang sini, sampe mabok-mabokan, sebenarnya bukan orang Koreanya, tapi orang kita aja yang imannya tipis, uda tau kaya gitu gak boleh, wah enakan	(88)
<b>Q81</b>	<b>Bagaimana menyikapi?</b>	
I <sub>9</sub>	Ada pengawasan dari satpol PP, mana yang tempat hiburan, dimonitoring gitu, nanti ada laporan gitu “di sana ada tempat hiburan”, contoh kejadian kemarin yang depan pom, larinya ke warung-warung biasa, awalnya di Gunung, di Krenceng di stop, larinya ke sini, akhirnya wah meraja lela, yah itu mabok-mabokan, itu yang mabok bukan orang Korea, orang kita. Sehingga lupa ingatan, lupa pikiran, jadi akhirnya berantem kan gitu, kebetulan berantemnya dengan orang kita yang digebukin, ditonjokin, itu lapor ke RT, lapor ke Kelurahan, yaudah bertindak, lapor ke Kecamatan disuratin, membandel ya udah. Terlambat, dieksekusi.	(89)
<b>Q82</b>	<b>Apakah yang membawa sendiri atau ada yang jual minuman?</b>	
I <sub>9</sub>	Jual minuman, gak mungkin, jadi warung-warung situ yang menyediakan, bukan itu saja jualannya, jadi maaf, sekarang ditutup. Yah warung kopilah, warung remang-remang lah, warung malam. Yah karena banyak pengunjung jadi jual bir lah, karena merasa laris jadi jual terus	(90)
<b>Q83</b>	<b>Apakah dengan adanya PT. K.Posco semakin marak adanya PSK?</b>	

I <sub>1</sub>	Apa yah.. sejak jaman dulu sebelum adanya Posco juga suda ada itu. Kalau tentang sudah ada industri, tidak lah..	(91)
<b>Q<sub>84</sub></b>	<b>Bagaimana menyikapi ke khawatiran masyarakat akan WNA</b>	
I <sub>9</sub>	Itu kekhawatiran karena penerimaan karyawan PT.K.Posco kurang untuk putra daerahnya, kayaknya gak <i>fifty-fifty</i> , kebanyakan orang Koreanya, paling orang kita 30% kayaknya	(92)
<b>Q<sub>85</sub></b>	<b>Bagaimana menyikapi kekhawatiran masyarakat akan terjerumus dengan banyaknya WNA?</b>	
I <sub>1</sub>	Selama ini belum ditemukan kasus-kasus atau operasi. Iya artinya Kembali pada masyarakatnya itu bisa memilah antara yang positif dan yang negatif. Salah satunya dengan melanjutkan pendidikan, pendekatan-pendekatan pada masyarakat terutama yang ring 1 dari Ciwandan dan Citangkil melalui kegiatan keagamaan	(93)
I <sub>9</sub>	Memang pemerintah sendiri pernah menghimbau, artinya tidak terpengaruhlah, karena mohon maaf ini mah, banyak orang-orang Korea selain yang berada di Posco itu atau yang orang Posconya ada yang menikah dengan orang peribumi, tapi bukan di sini. Ada di wilayah anyer, karena mesnya banyak. Orang Korea ini di Wulandira ama di Bojong anyer. Mereka banyak yang kawin karena mereka bisa bahasa Indonesia, yang pada akhirnya mereka menikah dengan orang anyer. Ada sih WNA di Randakari, ada beberapa, tapi enggak berbaur, kadang-kadang mereka berempat, bertiga dengan bahasa dia ngobrolnya	(94)
I <sub>10-8</sub>	Harus waspada, kalau sudah masuk ke peloksok jangan bebas, artinya begini, orang Korea kan ngontrak di rumah warga, pak Walikota juga meminta dibuatkan dimeskan, jadi biar khusus satu kampung orang Korea semua, jadi tidak menyebar kemana-mana, itu namanya orang asingkan, apalagi non muslim, yang dikhawatirkan itu tadi, makanya pak Walikota menghimbau, itu sebelum Posco operasional, kalau tidak salah sebelum personalia, baru dibangun. Alhamdulillah sekarang mereka sudah punya mes sendiri, yah tidak kececeran ke pelosok, tergantung individunya, kalau kesini jangan mau. Tapi saya belum pernah liat, orang Korea hanya sebatas jalan, ada orang Korea juga yang di PDSU, tenaga ahlinya atau apa, dia punya mes sendiri	(95)
<b>Q<sub>86</sub></b>	<b>Apakah WNA dengan orang pribumi menikah?</b>	
I <sub>9</sub>	Iya menikah, ada yang bilang kawin kontraklah. Enggak tau. Memang banyak yang kawin kontrak, dari perusahaan lain, bukan ini	(96)
<b>Q<sub>87</sub></b>	<b>Apakah ada kegiatan keagamaan untuk membentengi masyarakat akan maraknya prostitusi tersebut?</b>	
I <sub>9</sub>	Yah pengajian mah tiap kampung juga mesti ada, kata pak haji mah tergantung individunya kalau orang itu sudah kecanduan, memang susah. Masa iya harus digebukin, gak mungkinlah, harus dalam jangka waktu, karena deket dengan minuman, bagaimana caranya mengantisipasi supaya masyarakat, warung remang-remang yang menjual-jual diri itu. Yah memang itu pengaruh dari orang-orang asing itu, entah dari minuman, tontonan, mental tempe kali	(97)
<b>Q<sub>88</sub></b>	<b>Apakah kegiatan keagamaan tersebut sudah berjalan?</b>	
I <sub>1</sub>	Selama ini berjalan pada dinas-dinas lain. Kita fokuskan pada sosial	(98)

	gitu.	
I <sub>10-7</sub>	Ada di sini, paling di pak RT	(99)
<b>Q<sub>89</sub></b>	<b>Apakah adanya WNA memberikan dampak pada masyarakat sekitarnya?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Enggak, hanya sebatas dijalan-jalan. (pembicaraan sempat teralihkan dengan menanyakan asal peneliti dan pembahasan tentang warung yang jual minuman bekerja sama dengan instansi disuatu daerah luar Cilegon dengan membayar 300 ribu perbulan), kayak disitu juga ada warung-warung yang jual minuman, kemarin ada kejadian yang kerja di KBS lagi belanja dari Jublin, lewat, distop ama itu, dipukulin, yang mukulin kan mabok, kan kalau minum banyak mudhorotnya itu banyak	(100)
<b>Q<sub>90</sub></b>	<b>Kapan insiden pemukulan akibat mabuk tersebut?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Malam minggu kemarin, uda 10 hari yang lalu, hari selasa ini baru dieksekusi, berarti 2 hari lalu dieksekusinya.	(101)
<b>Q<sub>91</sub></b>	<b>Banyak warung-warung seperti itu?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Sebelah sana (menunjukkan kearah barat)	(102)
<b>Q<sub>92</sub></b>	<b>Apakah sebelumnya seperti itu?</b>	
I <sub>10-8</sub>	Uuh, lahan kosong, itu kan pindahan dari Ciwandan sana, kerenceng, kebanyakan orang Cibaliung, Pandeglang, pendatang-pendatang. Yang meresahkan warga, permintaan dari KS, jadi harus dikosongkan itu tahap kedua, padahal yang kemarin itu yang berbuat Cuma satu, yang kena imbasnya banyak warung situ, Cuma kan kejadiannya diwarung situ, seharusnya yang saya pegang itu yang punya warung. Kalau tidak di inikan nanti yang sana dikomplain, merasa tidak adil, kecuali waktu itu yang dieksekusi hanya yang jualan minuman saja, tapi apa kaitannya warteg, pecel lele, kalau memang mau, semua. Yang bagus mah jangan pilah-pilih, harus sampai sana ke Kubang sari dibenahi	(103) (104)
<b>Q<sub>93</sub></b>	<b>Adakah inovasi dari segi aparaturnya dalam menyikapi adanya PT.Krakatau Posco (tranparan)?</b>	
I <sub>1</sub>	Emm.. tentunya pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon tidak berjalan sendiri, tetapi mereka bermitra dengan industri-industri termasuk PT. Krakatau Posco, baik penerimaan pegawainya, dan hal-hal lain, termasuk didalamnya ada CCSR, artinya memang mengajak pada masyarakat sekitarnya.	(105)
I <sub>2-2</sub>	Kayanya gak ngaruh dengan adanya Posco, itu mah dari pimpinan kitanya, dari pertama pimpinan di level kabid, ada dari walikota, peraturan berapa nih tentang pelayanan, ga ada pengaruh dari Posco, kalau inovasi dari dalam kita sendiri	(106)
I <sub>10-6</sub>	Saya pikir transparan, karena saya pikir dari awal disosialisasikan kewarga, tentu pemerintah juga sudah memberi informasi mengenai dampaknya ini-ini.. gitu. Yah memang cepet tanggap, memang jika ada keluhan dari masyarakat langsung ditangani	(107)
<b>Q<sub>94</sub></b>	<b>Apakah ada pemahaman yang diberikan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh budaya luar?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Diberikan pemahaman agama sejak dari kecil, supaya tidak terpengaruh dengan budaya luar, selama ini kan pemerintah	(108)

	ngarahannya kesana, gitu. Berikan pendidikan agama sedini mungkin, agar ada pengaruh dari luar juga tidak tergođa. Tapi kalau pendidikan agamanya kurang yah begitulah, tergođa, jadinya terpengaruh nantinya	
<b>Q<sub>95</sub></b>	<b>bagaimana cara kerja, dan sistem kerjanya dalam menyikapi permasalahan?</b>	
I <sub>1</sub>	Oh,, yang pasti sistem kerja di Kota Cilegon terutama Dinsos terus berupaya, agar dari tahun ketahun tetap lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu. Dengan formula-formula baru karena kita punya yang namanya evaluasi kerja, terus penilaian kinerjanya itu salah satu dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.	(109)
I <sub>9</sub>	Dari pemerintah waktu itu tetep mengundang Posco dan pemerintah dalam menyikapi, artinya dalam penerimaan buruh Posco, dalam penanggulangan bencana pada waktu itu pemerintah sempat mengadakan .. (mengingat-ingat), itu mah diantaranya sempat mengadakan (mengingat-ingat), Posco juga sempat mengadakan simulasi dulu, itu sempat dari pemerintah dan masyarakat sempat kaya pemadam kebakaran pada waktu itu, yang dari pemdanya itu. Dan untuk penanggulangan (berfikir), masalah karyawan udah, melakukan pendekatan-pendekatan kemasyarakat, ya alhamdulillah terus penerimaan buruh banyak buruh-buruh, kaya klining servis putra daerah. Angkutan juga banyak orang-orang sini, kontraktorr juga orang-orang sini.	(110)
<b>Q<sub>97</sub></b>	<b>Apakah ada pendekatan Situasional?</b>	
I <sub>2-2</sub>	Balik lagi ke sana lagi, jadi balik lagi ke perusahaannya, bagaimana tenaga kerja dari Posco	(111)
<b>Q<sub>100</sub></b>	<b>Adakah kendalanya?</b>	
I <sub>2-2</sub>	Cuma itu tadi, di Cilegon itu lembaga pelatihannya masih belum menemukan sesuai kebutuhan, lebih banyaknya itu mereka itu menjahit, komputer, rias pengantin. Sedangkan Cilegon itu industri kimia, pelatihannya pelatihan apa? Belum banyak, dan biasanya perusahaan itu juga punya pelatihan atau training sendiri. Cuma dikita fasilitas atau pelatihan dan orang kimianya seperti itu kita belum ada	(112)
	yah karena sarana dan prasarana kita juga belum memadaikan (setelah itu tertawa kecil) gitu, yah itu juga kan alat-alat berat, jadi kita belum sampai kesana, paling kita baru bisa memilih kebutuhan-kebutuhan apa yang sesuai, baru kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di BLK. Kita juga harus memikirkan antara sarananya, dananya, yah kan SDM kita punya, tapi sarana gak punya, atau sarana kita punya, tapi SDM ga ada, yah percuma.	(113)
<b>Q<sub>105</sub></b>	<b>Adakah pengontrolan atau pengawasan?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Pengawasannya itu tadi teh, saya pikir pemerintah itukan kewajibannya ngawasin, artinya memberikan selain ijin tiap-tiap industri juga ngawasin, terutama si pengusaha atau Posco ini agak menyimpang yah harus ditegor	(114)
<b>Q<sub>106</sub></b>	<b>Adakah inovasi secara konsep, ide, menghadapi tantangan yang ada?</b>	
I <sub>1</sub>	Tadi itu. Ada. Tentunya Dinsos ini dijadikan <i>center</i> data terutama data kemiskinan. Dengan sistem online inshaAllah data itu akan	(115)

	<p>menggambarkan kata orang mah <i>by name by adres</i>, sehingga menjadi alat kebijakan Kota Cilegon dalam rangka mensejahterahkan.</p> <p>Kedua, titik berat dalam penyelesaian masalah dengan sedang dibangunnya panti rehabilitasi terpadu di Kota Cilegon, tempatnya di Cikerai.</p>	
I <sub>2-2</sub>	<p>Kalau disetujui, ada sih pembinaan, itu kalau disetujui, Cuma belum, baru. Seperti pelatihan-pelatihan kerja, tempat-tempat kursus menjahit, tata boga, itu rananya kita, jadi masyarakat juga ikut pelatihan bukan hanya di Disnaker aja, di Lembaga swasta juga bisa untuk meningkatkan kualitasnya.</p> <p>Intinya sih tadi, hubungannya dibidang penempatan dan pelatihan, jadi biar masyarakat umum gak bergejolak, perusahaan itu kalau mau merekrut harus lapor kita biar masyarakatnya tau. Kalau gejolaknya yang perselisihan di bidang tadi, bidang perselisihan, kalau dikita Cuma penempatan, karena bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Kalau dari masyarakat yah bisa ngerti, biar mereka ngerti untuk mengurangi gejolak masyarakat karena mereka kalah bersaing</p>	(116)
I <sub>9</sub>	<p>Saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari masyarakat sekitar pabrik? Yah gak tau. Paling duduk bersama, paling itu aja. Antara pemerintah Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota, Disnaker duduk bersama, itu cara penanggulangannya</p>	(117)
<b>Q<sub>107</sub></b>	<b>Seperti apa duduk bersama dengan Disnaker?</b>	
I <sub>9</sub>	<p>Iya dong, kalau itu masukan-masukan, kalau tidak ditangani pemerintah mah pada waktu itu masyarakat beneran macem-macemlah. Tapi alhamdulillah karena menurunkan aparat-aparat juga jadi akhirnya setelah diberikan masukan-masukan oleh pemerintah atau aparat, dalam hal ini kepolisian, jadi masyarakat juga menyadari</p>	(118)
<b>Q<sub>108</sub></b>	<b>Masukan seperti apa?</b>	
I <sub>9</sub>	<p>Artinya bahwa melakukan anarkis itu hal yang tidak baik, yah kita harus duduk bersama seperti apa, sampai mereka memahami, jadi dari koordinator itu lah mereka yang menyampaikan kesemua warga, atau kesemua masyarakat sekitar pabrik atau kesemua pelamar, bahwa lamaran akan diseleksi oleh KS. Dan yang menyeleksi bukan sembarangan, orang-orang ahli dibidang industri</p>	(119)
<b>Q<sub>109</sub></b>	<b>Bagaimana kesiapan IPTEK?</b>	
I <sub>1</sub>	<p>Itu tadi, mempercanggih pelayanan dalam bentuk online.</p>	(120)
I <sub>2-2</sub>	<p>Dalam hal apa? Tadi kita lari-lari ke birokrasi, kita ga ada hubungannya dengan Posco, bukan hanya Posco yang dilayani, semua perusahaan. Kita mau pelayanan birokrasinya seperti apa, cepat, tepat itu kan gak ngaruh ke sana, bukan karena Posconya, tapi dipengaruhi dari atas, terus didukung juga dari sumber daya di sini, kita mau membina apa nih, tapi tidak terpengaruh Posco. Kita secara umum yah masyarakat umumkan.</p> <p>Posco itu Korea, otomatis tenaga kerjanya itu banyak orang-orang Korea, kita harus siap. Mereka yang harus kita ijin-ijin mereka, legal gak, itu di sini, bidang ini, ada pemeriksaan, bener gak tinggalnya disini, itu dibidang sini.</p>	(121)



I <sub>9</sub>	Makanya berbicara masalah ilmu, memang orang-orang yang terjun ke Posco itu sesuai dengan ilmu yang dimiliki, jadi otomatis orang yang ia terima memang sesuai dengan ilmu yang ia miliki. Kalau memang itu insinyur, insinyur apa namanya, sipil, tentunya di sipil, kalau otomotif, di otomotif, kalau dimesin produksi, yah di produksi, adapun masalah bagaimana caranya yah tergantung individunya yah, gak mungkin orang akan menempatkan seseorang kalau tidak sesuai dengan ilmunya, <i>in the right man in the right job</i> .	(122)
I <sub>10-6</sub>	Saya pikir sumber daya manusia sudah bagus, Cuma memang belum diberi kesempatan oleh pemerintah atau oleh pihak pengusaha sendiri gitu.	(123)
<b>Q<sub>111</sub></b>	<b>Adakah pendekatannya?</b>	
I <sub>1</sub>	Iya, bisa dikatakan Door to door lah, namanya PHK (Program Keluarga Harapan), itu merupakan suatu solusi pada masyarakat atau keluarga yang bermasalah.	(124)
<b>Q<sub>112</sub></b>	<b>Bagaimana pemberdayaan masyarakatnya?</b>	
I <sub>1</sub>	Pemberdayaan melalui usaha-usaha keluarga atau usaha masyarakat, kita memberi bantuan bahan-bahan bakunya dan alat-alat produksinya dikasih	(125)
I <sub>9</sub>	Artinya untuk masyarakat setempat, artinya untuk daerah Kubangsari yah, memang ada cara-cara tertentu, ada masuk prioritas, gitu untuk masyarakat sekitar pabrik itu. Udah.	(126)
I <sub>7-1</sub>	Kalau itu sih belum ada kayanya, pemberdayaan yang dari Posco si belum ada, tapi yang dari KS, KBS, memang sudah ada, kalau bantuan mah ada, Posco itu misalkan ada banjir dia bantu-bantu segala macam	(127)
<b>Q<sub>113</sub></b>	<b>Prioritasnya berapa?</b>	
I <sub>9</sub>	Pak haji tidak dapat menentukan, tapi setahu pak haji begitu, jadi artinya untuk sekitar pabrik ada skala prioritas, yang artinya agar tidak ada gejolak sosial yang tidak diinginkan makanya kata pak haji tadi, masyarakat sekitar situ " <i>gelem ore sire neng anuh</i> " walaupun sebagai kontraktor, pada dasarnya dia mau. Ada yang lewat kontraktor, ada yang langsung ke Posconya. Tapi Posconya pintar, tidak menerima buruh secara langsung, jadi para kontraktor itulah yang merekrut tenaga kerja masyarakat sekitar pabrik	(128)
<b>Q<sub>114</sub></b>	<b>Bagaimana perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dengan adanya PT.KP?</b>	
I <sub>1</sub>	Tidak satu perusahaan artinya secara besar. Tertuang dalam rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pemerintah daerah. Nanti di masukan dalam renstra lalu dimasukan dalam musrembang untuk menampung aspirasi masyarakat setiap tahun sehingga pembangunan tidak terlepas dari aspirasi dari bawa ( <i>butter up</i> ) dan tidak keluar dari rel yang kita tentukan direncana strategi itu.	(129)
<b>Q<sub>115</sub></b>	<b>Apakah ada kesediaan menerima perubahan?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Saya pikir karena kebudayaannya beda ya teh, kebudayaan dengan orang Korea itu, tiap-tiap bagaimanapun juga yah tidak bakalan diterima, yah jelas kalau Korea ditempatkan lokasinya khusus, artinya tidak boleh campur	(130)
<b>Q<sub>116</sub></b>	<b>Apakah masih ada yang campur dengan orang Korea?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Selama ini kan Korea masih campur dimana-mana, jadi saran saya	(131)

	sih pemerintah memberikan lokasi khusus untuk orang-orang Korea karena walau bagaimanapun perbedaan kebudayaan antara orang-orang Korea dengan kita. Artinya takutnya dampak negatifnya itu kalau campur	
<b>Q<sub>117</sub></b>	<b>Bagaimana koordinasi yang terjalin?</b>	
I <sub>10-6</sub>	Itukan dari masyarakat, misalkan adanya dampak-dampak itu atau mengadakan aksi misalkan koordinasi kepihak Kelurahan, Kecamatan, kepolsek, dan juga ke polres kalau ada permasalahan	(132)
<b>Q</b>	<b>Apakah ada sertifikasi untuk mekanik peleburan baja?</b>	
I <sub>2-4</sub>	oh,ada untuk alatnya, sebelum di pakai di sertifikasinya di sini, alatnya boleh jalan atau enggaknya, jadi ada dokumennya, bahwa alatnya aman sebelum digunakan. (setelah mengetahui sertifikasi untuk masyarakat) ooh.. nanti di pak muhibin, atau BLK nanti data wawancaranya di pak muhibin yah,,	(133)  (134)
I <sub>2-5</sub>	belum ada kalau di kita, itu kan industri berat, kita kan belum mampu, tapi kalau kedepan kita ada pengembangan, (sambil mengingat-mengingat) kita ada pengembangan jurusan baru. eeeeeee (sambil mengingat), jurusan mekanik, eh, teknik, ke teknologi, ini bubut, kita juga akan mengadakan jurusan bangunan, gitu. Itu juga kedepan karena ada permintaan untuk bidang bangunan	(135)
<b>Q</b>	<b>Bagaimana menyikapi kesenjangan di masyarakat?</b>	
I <sub>2-5</sub>	(batuk sesaat) eeeh.. kita mencetak itukan tenaga non skill yah, sebenarnya soal kebutuhan perusahaan kan kita gak tau kan, lowongan pekerjaan yang mereka kerjakan itu apa kan kita gak tau yah, tapi kalau .. harusnya memang ada di disnaker yah, pencari kerja kan urusannya ada disana, disnaker tuh. Kan ada data penerimaan, itu disnaker. Nah, di disnaker kan ada BLK, terkait ketenaga kerjaan kalau di disnaker ada bidang yang namanya bidang penempatan tenagakerja, data yang itu ada di kalau setelah mereka kemampuannya memadai, nah, baru itunya disini.	(136)
<b>Q</b>	<b>Bagaimana menyikapi ketidak merataan informasi mengenai ketenaga kerjaan di masyarakat?</b>	
I <sub>2-4</sub>	siapa yg mengatakan? Memang kondisi-kondisi tertentu di dominasi tenaga asing, tapi secara keseluruhan justru lebih banyak bukan orang asingnya. lingkungan ada, tapi lingkungan apa. Masalahnya di penempatan, kalau disini lingkungan, K3. Ada beberapa kasus, misalkan pencemaran. Datanya di pak muhibin. Kalau disini kesejahteraan.	(137)
<b>Q</b>	<b>Bagaimana pemerintah sebagai pelopor?</b>	
I <sub>2-4</sub>	itu.. kalau kita itu sifatnya melakukan mengawasi peraturan-peraturan kerja. Satu kegiatan kita itu melakukan sosialisasi pada saat pembangunan atau tahap kontruksi, kemudian kalau ada dampak kecelakaan kerja, kita melakukan identifikasi tenaga kerja ee.. kita pasti dateng tuh, untuk mengetahui penyebabnya apa. kalau pemerintahkan jadinya masyarakat menunggu, ga maksimal. Itu komunitas-komunitas tertentu sekarang biar maksimal. Pemerintahkan memang harus jadi pendorong, kalau disnaker itu perannya sebagai .. (percakapan terputus karena ada yang masuk dan menerima telepon)	(138)

I <sub>2-5</sub>	Bukan bidang sini, yang sesuai memang di sana (sambil menunjuk ke arah luar pintu), Disnaker. Disini untuk memberikan pelatihan, karena ada pencari kerja yang untuk usaha mandiri, seperti wirausaha, karena ditempatnya tidak ada pabrik, haaaha (tertawa), tapi kalau model alat-alat beratkan itu kan orientasinya ke perusahaannya.	(139)
<b>Q</b>	<b>Bagaimana permasalahan yang terjadi di industri?</b>	
I <sub>1</sub>	Sebenarnya memang di Kota Cilegon itu tidak boleh adanya suatu lokasi yah, tidak adalah. Kota Cilegon tidak ada lokasi untuk PSK, tapi tidak menuntut kemungkinan mereka tetap ada di tempat-tempat tertentu, maka diadakanlah suatu operasi	(140)
<b>Q</b>	<b>Apakah pelayanan saat ini lebih sederhana?</b>	
I <sub>1</sub>	Ga ada yang lebih sederhana, justru semakin kesini permasalahan di masyarakat semakin rumit, tapi tugas kita bagaimana supaya melayani dengan baik dengan formula-formula dan metode yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya	(141)

## KODING DATA

Kode	Kata Kunci
1	Dampak pekerja asing menjadi budaya berwarna
2	kerja sama MUI tentang keagamaan
3	Dampak positif industri, terserapnya tenaga kerja
4	Pendapat masyarakat, kurang keseriusan Pemerintah akan pengaduan masyarakat
5	Dampak sosial negatif (dampak percampuran budaya
6	Pendapat masyarakat, deskripsi dampak Posco
7	Dampak positif (mengurangi pengangguran)
8	Kompleksitas sosial
9	Informan diam
10	Pengaruh pada peningkatan usaha kontrakan, warung, kontraktor
11	Peningkatan usaha, kewirausahaan, perusahaan lokal, kontruksi, kontrakan
12	Kompleksitas dampak adanya Pembangunan Posco
13	Perbedaan kultur dengan Korea dari segi minuman (bir atau soju)
14	Adanya Perubahan sosial
15	WNA yang berbaur dengan masyarakat
16	Keingin tahuan WN Korea, perbedaan budaya
17	Kesadaran akan pelayanan terhadap tamu WNA
18	Kecemburuan tenaga kerja
19	Tuduhan terhadap Kelurahan mengenai tenaga kerja dan kompensasi asap
20	Informan acuh
21	Tuduhan terhadap kelurahan
22	Warga yang bekerja di PT.KP
23	Jumlah KK antara warga asli dengan pendatang
24	Ketidak pengaruh kriminal dengan adanya pendatang
25	Tidak adanya tingkat kriminal, terjadi hanya yang baru terjadi hari itu
26	Pengaruh positif pendatang dari segi ekonomi, kontrakan
27	Pengaruh negatif dari pengontrak, tidak mengikuti sholat
28	Adanya bakti sosial kesehatan setelah didemo
29	Pendapat mengenai keterlibatan putra daerah dalam tenaga kerja, 30%
30	Tidak tahu jumlah warga lokal yang bekerja di Posco
31	Yang bekerja di Posco, satu orang
32	Kekhawatiran 70% pekerja luar
33	Kedudukan pekerja lokal, karyawan biasa

34	Pendapat warga mengenai penyerapan tenaga lokal, ada skala prioritas
35	Adanya rekomendasi pemerintah setempat, kelurahan atau Kecamatan mengenai tenaga kerja
36	Pendapat masyarakat, belum ada tindakan dan aturan dari Disnaker
37	Pendekatan, pekerjaan berat di handle oleh pribumi
38	Pendapat masyarakat, Tidak tahu upaya pemkot apa dan mesti bagaimana
39	Belum adanya tindakan ke masyarakat
40	Keengganan informan
41	Ketidak tahuan mekanisme pengaduan warga pada pemerintah
42	Solusi disnaker, prioritas warga lokal sesuai kualifikasi
43	Kesulitan pengawasan karena via online dan kegaptekan Warga Cilegon
44	Pernyataan warga upaya pemerintah kurang maksimal, pemerintah akan menegor ke perusahaan jika ada protes warga
45	Pengaduan yang belum efektif
46	Kerjasama dengan aparat dan Budaya malam tetap mengacu pada Perda
47	Disnaker tidak memiliki kewenangan dalam menangani gejolak tenaga kerja
48	Himbauan kewaspadaan pada warga asing
49	Pelimpahan tugas
50	Landasan hukum
51	Belum membaca aturan secara khusus
52	Harapan akan berjalannya perda No.2 tahun 2009
53	Pengaruh permintaan sehingga adanya tempat hiburan
54	Deskripsi pengaruh adanya tempat hiburan pada orang-orang muda
55	Tempat hiburan berada di Cilegon
56	Monitoring tempat hiburan pada dinas pariwisata
57	Mitra dengan komunitas masing-masing
58	Sosialisasi disnaker, Anjuran memprioritaskan warga Cilegon terlebih dahulu
59	Adanya tegoran dalam penerimaan lamaran agar satu badan, ke KS
60	Sosialisasi lewat kelurahan-kelurahan
61	Sosialisasi lewat sumbangan
62	Sosialisasi melalui himbuan di Kecamatan
63	Tidak tahu tujuan pembagian sembako oleh Posco
64	Pengembangan keterampilan, tata boga
65	Adanya pelatihan operator, sekuriti, menjahit
66	Pelatihan sesuai bidangnya
67	Pelatihan yang belum maksimal
68	Pernyataan masyarakat, belum ada upaya pendidikan
69	Alur penyampaian informasi peserta pelatihan BLK
70	Adanya perekrutan untuk mengikuti pelatihan
71	Pendekatan persuasif, Bekerja sama dengan ulama
72	Pendekatan persuasif, anjuran adanya pelaporan ke disnaker jika ada lowongan
73	Pendekatan persuasif, menggandeng tokoh masyarakat
74	Informan tidak menjawab

75	Perusahaan melaporkan jika terbuka
76	Pendekatan Posco yang melaporkan setelah penerimaan akan ada pengarah
77	Pendekatan komunikasi dengan para tokoh
78	Waktu situasional Posco untuk komunikasi dengan warga
79	Komunikasi dengan masyarakat di Kelurahan
80	Tidak adanya lokalisasi dan adanya suatu operasi
81	Deskripsi monitoring Dinsos terhadap warung remang-remang
82	Dinsos dalam operasinya bersifat Kondisional
83	Jumlah yang terjaring operasi oleh dinsos
84	Tempat-tempat yang terjaring operasi oleh dinsos
85	Kompleksitas PSK
86	Pembatasan jam buka tempat-tempat hiburan oleh pemkot
87	Saran tempat hiburan diluar kota cilegon saja
88	Kekhawatiran pengaruh adanya tempat hiburan
89	Deskripsi insiden pemukulan dan sikap pemerintah, eksekusi
90	Penutupan warung remang-remang
91	Pendapat dinsos mengenai ketidak kaitan industri dengan adanya PSK
92	Penyebab kekhawatiran masyarakat akan WNA karena kurangnya putra daerah yang bekerja di Posco
93	Saran dinsos untuk masyarakat, melanjutkan pendidikan, pendekatan masyarakat pada keagamaan
94	Adanya imbauan agar tidak terpengaruh hal negatif dari WNA
95	Pernyataan masyarakat, Perlunya kewaspadaan dan adanya permintaan walikota untuk WNA dimeskan
96	Adanya pernikahan dengan pribumi
97	Pengaruh individu yang lemah
98	Fokus pada sosial
99	Kegiatan keagamaan di RT
100	Pernyataan masyarakat, tidak adanya dampak dari adanya WNA
101	Waktu insiden pemukulan
102	Arah warung remang-remang
103	Deskripsi tempat hiburan
104	Keresahan warga dengan adanya pengosongan lahan atas permintaan KS
105	Inovasi aparatur, Keterlibatan industri dalam peningkatan kesejahteraan
106	Tidak adanya kaitan inovasi birokrasi dengan adanya Posco
107	Pernyataan masyarakat akan transparansinya pemerintah
108	Pernyataan masyarakat dengan adanya arahan pemerintah mengenai pemberian pemahaman agama sedini mungkin
109	Dinsos tiap tahun melakukan perbaikan sistem kerja birokrasi
110	Deskripsi cara kerja pemerintah menyikapi bencana, buruh
111	Pendekatan situasional tergantung perusahaannya
112	Ketidak sesuaian pelatihan yang ada dengan kebutuhan industri
113	Kendala BLK sarana dan prasarana belum memadai
114	Pernyataan masyarakat mengenai pengawasan pemerintah
115	Inovasi konsep Dinsos, mempercanggih pelayanan secara online dan akan

	dibangunnya panti rehabilitasi
116	Adanya rencana pembinaan pelatihan kerja
117	Tidak tahu saran yang harus diberikan
118	Deskripsi penanganan gejolak masyarakat
119	Deskripsi masukan yang diberikan dalam penanganan gejolak masyarakat
120	IPTEK, Dinsos mempercanggih teknologi untuk pelayanan secara online
121	Ketidak kaitan Birokrasi, IPTEK dengan adanya Posco
122	Deskripsi penempatan tenaga kerja sesuai kemampuannya
123	Sumber daya manusia yang belum terberdayakan
124	Pendekatan door to door untuk keluarga bermasalah
125	Pemberdayaan melalui usaha keluarga
126	Pemberdayaan berupa prioritas untuk warga setempat
127	Pernyataan masyarakat, belum ada pemberdayaan
128	Tidak tahu berapa jumlah yang diprioritaskan
129	Pemaparan alur renstra
130	Pernyataan masyarakat, tidak akan ada penerimaan kebudayaan
131	Kekhawatiran masyarakat akan kebudayaan yang berbeda
132	Koordinasi ke instansi setempat jika ada permasalahan
133	Ada sertifikasi alat
134	Pelembaran penjelasan mengenai Sertifikasi untuk masyarakat
135	Belum ada sertifikasi pelatihan mekanik
136	BLK tidak mengetahui kebutuhan industri
137	Pelembaran penjelasan mengenai pemerataan informasi
138	Kepeloporan mengenai keselamatan kerja
139	yang mempelopori perusahaannya untuk alat berat
140	tidak melakukan lokalisasi
141	memberikan pelayanan yang baik

# **LAMPIRAN 6**

## **Kategorisasi Data**



## KATEGORISASI DATA

No.	Kategori	Rincian Isi Kategori
1	Proses industrialisasi berlangsung dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kurang keseriusan Pemerintah akan pengaduan masyarakat</li> <li>• Pemkot bekerja sama dengan MUI tentang keagamaan</li> <li>• Kerjasama dengan aparat</li> <li>• Budaya malam tetap mengacu pada Perda</li> <li>• Pemaparan upaya pola industri</li> </ul>
2	Kesempatan usaha makin luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapat mengenai keterlibatan putra daerah dalam tenaga kerja, 30%</li> <li>• Tidak tahu jumlah warga lokal yang bekerja di Posco</li> <li>• Yang bekerja di Posco, satu orang</li> <li>• Kedudukan pekerja lokal, karyawan biasa</li> <li>• Kedudukan atau jabatan pekerja lokal, karyawan biasa</li> <li>• Pendapat warga mengenai penyerapan tenaga lokal, ada skala prioritas</li> <li>• Pengaruh pada peningkatan usaha kontrakan, warung, kontraktor</li> <li>• Peningkatan usaha, kewirausahaan, perusahaan lokal, kontruksi, kontrakan</li> </ul>
3	Proses sosialisasi yang elegan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuduhan terhadap Kelurahan mengenai tenaga kerja dan kompensasi asap</li> <li>• Mitra dengan komunitas masing-masing</li> <li>• Anjuran memprioritaskan warga Cilegon terlebih dahulu</li> <li>• Adanya tegoran dalam penerimaan lamaran agar satu badan, ke KS</li> <li>• Sosialisasi lewat kelurahan-kelurahan</li> <li>• Sosialisasi lewat sumbangan</li> <li>• Sosialisasi melalui himbauan di Kecamatan</li> <li>• Alur penyampaian informasi peserta pelatihan BLK (s</li> </ul>
4	Stabilisator sosial melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan keterampilan, tata boga</li> <li>• Adanya pelatihan operator, sekuriti, menjahit</li> <li>• Pelatihan sesuai bidangnya</li> <li>• Pelatihan yang belum maksimal</li> <li>• Pernyataan masyarakat, belum ada upaya</li> </ul>

		<p>pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perekrutan untuk mengikuti pelatihan</li> <li>• Kegiatan keagamaan di RT</li> <li>• Ketidak sesuaian pelatihan yang ada dengan kebutuhan industri</li> <li>• Kendala BLK sarana dan prasarana belum memadai</li> </ul>
5	Pendekatan yang persuasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Himbauan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap warga asing</li> <li>• Pendekatan persuasif, Bekerja sama dengan ulama</li> <li>• anjuran adanya pelaporan ke disnaker jika ada lowongan</li> <li>• menggandeng tokoh masyarakat</li> <li>• Pernyataan masyarakat mengenai pengawasan pemerintah</li> <li>• Deskripsi penanganan gejolak masyarakat</li> <li>• Deskripsi masukan yang diberikan dalam penanganan gejolak masyarakat</li> </ul>
6	Pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring tempat hiburan pada dinas pariwisata</li> <li>• Adanya pembersihan saluran sungai di kampung lain oleh pemkot</li> <li>• Tidak adanya lokalisasi dan adanya suatu operasi</li> <li>• Pendapat dinsos mengenai ketidak kaitan industri dengan adanya PSK</li> </ul>
7	Inovasi dilingkungan birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuduhan terhadap kelurahan</li> <li>• Belum adanya tindakan ke masyarakat</li> <li>• Deskripsi monitoring Dinsos terhadap warung remang-remang</li> <li>• Inovasi aparatur, Keterlibatan industri dalam peningkatan kesejahteraan</li> <li>• Tidak adanya kaitan inovasi birokrasi dengan adanya Posco</li> <li>• Pernyataan masyarakat akan transparansinya pemerintah</li> <li>• Pernyataan masyarakat yang cepet tanggap</li> <li>• Pendekatan situasional tergantung perusahaannya</li> <li>• Pendapat masyarakat, Tidak tahu upaya pemkot apa dan mesti bagaimana</li> <li>• Pengaduan yang belum efektif</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang rasa kepercayaan terhadap walikota</li> <li>• Pengobatan gratis</li> <li>• Pengobatan gratis tidak efektif</li> <li>• Ketidak tahuan atas ketidak efektifan pengobatan gratis</li> </ul>
8	Inovasi konseptual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rekomendasi tenaga kerja oleh pemerintah setempat, kelurahan atau Kecamatan</li> <li>• Saran dinsos untuk masyarakat, melanjutkan pendidikan, pendekatan masyarakat pada keagamaan</li> <li>• Adanya imbauan agar tidak terpengaruh hal negatif dari WNA</li> <li>• Pernyataan masyarakat, Perlunya kewaspadaan tidak bebas</li> <li>• adanya permintaan walikota untuk WNA dimeskan</li> <li>• Pernyataan masyarakat dengan adanya arahan pemerintah mengenai pemberian pemahaman agama sedini mungkin</li> <li>• Adanya rencana pembinaan pelatihan kerja</li> <li>• Tidak tahu saran yang harus diberikan</li> </ul>
9	Pendekatan situasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan, pekerjaan berat di handle oleh pribumi</li> <li>• Alur penyampaian aspirasi masyarakat ke walikota dan tindakannya menyetop aktifitas Posco</li> <li>• Pendekatan Posco yang melaporkan setelah penerimaan akan ada pengarahannya</li> <li>• Dinsos dalam operasinya bersifat Kondisional</li> <li>• Deskripsi insiden pemukulan dan sikap pemerintah</li> <li>• Penutupan warung remang-remang</li> <li>• Pendekatan situasional tergantung perusahaannya</li> <li>• Adanya bakti sosial kesehatan setelah didemo</li> <li>• Pengobatan gratis yang kurang efektif</li> </ul>
10	Inovasi Sistem, Prosedur, dan metode kerja (Legalistik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinsos tiap tahun melakukan perbaikan sistem kerja birokrasi</li> <li>• Penutupan penyelenggaraan hiburan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapat masyarakat, belum ada tindakan atau aturan dari Disnaker</li> <li>• Perda No.2 Tahun 2009</li> <li>• Belum membaca aturan secara khusus</li> <li>• Deskripsi cara kerja pemerintah Menyikapi buruh</li> <li>• Pembatasan jam buka tempat-tempat hiburan oleh pemkot</li> </ul>
12	Kesiapan/ kemampuan IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan pengawasan karena via online dan kegaptekan warga Cilegon</li> <li>• IPTEK, Dinsos mempercanggih teknologi untuk pelayanan secara online</li> <li>• Ketidak kaitan Birokrasi, IPTEK dengan adanya Posco</li> <li>• Deskripsi penempatan tenaga kerja sesuai kemampuannya</li> <li>• Sumber daya manusia yang belum terberdayakan</li> </ul>
13	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan melalui usaha keluarga</li> <li>• Pemberdayaan berupa prioritas untuk warga setempat</li> <li>• Tidak tahu berapa jumlah yang diprioritaskan</li> <li>• Pernyataan masyarakat, belum ada pemberdayaan</li> </ul>
14	Kesediaan masyarakat menerima perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran akan pelayanan terhadap tamu WNA</li> <li>• Pernyataan masyarakat, tidak akan ada penerimaan kebudayaan</li> </ul>
15	Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada sertifikasi alat</li> <li>• Pelemparan penjelasan mengenai Sertifikasi untuk masyarakat</li> <li>• Belum ada sertifikasi pelatihan mekanik</li> <li>• BLK tidak mengetahui kebutuhan industri</li> <li>• Kepeloporan mengenai keselamatan kerja yang memelopori perusahaannya untuk alat berat</li> <li>• tidak melakukan lokalisasi</li> <li>• memberikan pelayanan yang baik</li> <li>• Pelemparan penjelasan mengenai pemerataan informasi</li> </ul>

**LAMPIRAN 7**  
Data-Data Pendukung  
Hasil Penelitian



# PROFIL DINAS SOSIAL KOTA CILEGON



DINAS SOSIAL KOTA CILEGON

**PROFIL  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KOTA CILEGON**

**2013**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KOTA CILEGON**

1	2	3	4												5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Pembinaan, penyuluhan dan bimbingan jabatan	1. Menyenggarakan bimbingan dan penyuluhan jabatannya psikologi kepada pencari kerja (AKU, AKAD, dan ANGAN) siswa sekolah dan masyarakat													
17	Kejelasan Sosis Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja	1. Job Fair 2. Usaha Mandiri													

Cilacap, 08 Januari 2015

KEPALA BIDANG  
PILATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
KOTA CILEGON

MURDOGIN, SH, Msi  
NIP. 19551106 196303 1 011





1	2	3	4												5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Pembinaan pelayanan perdagangan pencari kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melayani pembuatan Kartu Kuning ( AK. I ) kepada pencari kerja</li> <li>Penerbitan sifir. Ak. I &amp; Ak. II</li> <li>Mengolah data dan memfotokan dalam bentuk laporan angka pencari kerja setiap bulan, tri wulan dan tahunan</li> </ol>													
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data pencari kerja ( melalui Ak. I )</li> <li>Pengumpulan data lowongan pekerjaan dan penempatan ke-ja kepada perusahaan melalui :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat edaran wajib lapor lewat mesin pencetakan dan penempatan tenaga kerja</li> <li>Kunjungan ke perusahaan untuk memperoleh data ke-empatan (lowongan kerja dan penempatan kerja</li> <li>Menyebarkan informasi lowongan kerja melalui papan pengumuman media massa dll.</li> <li>Memantau dan membantu rekruitment karyawan pada perusahaan</li> </ol> </li> </ol>													
10	Penyediaan informasi pasar kerja (PK) dan penyediaan bursa ke-4.														





Tabel 3

# (PK 001): Resume Penciri Kayu yang Terdaftar, Diampatkan, Diampatkan

Ditrad dan/atau Tidak Terdaftar

Nama : CLUGON

Bulan : April

# : 2014

	JUMLAH										Jumlah		Keterangan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	B									
Penciri yang belum diampatkan pada akhir bulan lalu	0	0	1262	1742	2266	1281	155	345	4	0	0	0	0	0	5552	6632	1	Lowongan yang belum diampatkan pada akhir bulan lalu	76	15	91
Penciri yang Terdaftar Pada Bulan Ini	0	0	18	18	129	29	16	3	2	1	0	0	0	0	165	52	3	Lowongan yang Terdaftar Pada Bulan Ini	90	21	111
Jumlah (1+2)	0	0	2881	2761	2395	2828	348	348	6	1	0	0	0	0	3717	6744	A	Jumlah (1+2)	166	36	202
Penciri yang Diampatkan Pada Bulan Ini	0	0	14	16	36	5	40	0	0	0	0	0	0	0	90	21	3	Lowongan yang Diampatkan Pada Bulan Ini	90	21	111
Penciri yang Dihapus Pada Bulan Ini	0	0	14	16	36	5	40	0	0	0	0	0	0	0	90	21	4	Lowongan yang Dihapus Pada Bulan Ini	76	15	91
Jumlah (3+4)	0	0	28	32	72	10	80	0	0	0	0	0	0	0	180	42	B	Jumlah (3+4)	166	36	202
Penciri yang Belum Diampatkan pada akhir bulan ini (A-B)	0	0	2863	2729	2122	2828	328	328	6	1	0	0	0	0	3527	6722	5	Lowongan yang Belum Diampatkan pada akhir bulan ini	0	0	0
																		(A-B)			



PEMERINTAH KOTA CILEGON  
KECAMATAN CIWANDAN

Jl. Sunan Gunung Jati No. 11, Ciwandan Telp. (0254) 801611 Ciwandan 42445  
Website : kecamatan\_ciwandan@cilegon.go.id

DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN CIWANDAN TAHUN 2012

NO	KEKAWAHAN	JUMLAH			BET
		L	P	L+P	
1	Berjamesra	3.075	3.287	6.362	
2	Tegayata	4.711	4.291	9.002	
3	Kulangsari	3.213	3.379	6.592	
4	Gunungregh	7.820	2.927	10.747	
5	Kayuh	4.290	3.212	7.502	
6	Randabari	3.747	3.443	7.190	
	JUMLAH	32.156	20.516	52.672	

DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN CIWANDAN TAHUN 2013

NO	KEKAWAHAN	JUMLAH			BET
		L	P	L+P	
1	Berjamesra	3.130	3.079	6.209	
2	Tegayata	4.753	4.332	9.085	
3	Kulangsari	3.370	3.400	6.770	
4	Gunungregh	7.901	2.905	10.806	
5	Kayuh	3.984	3.400	7.384	
6	Randabari	3.984	3.780	7.764	
	JUMLAH	23.122	20.896	44.018	

Daftar Peserta (Pendaftaran) Hiburan dan Festival  
 Area Utama (KABUPATEN) Gedung Peninggalan Nuri & Sumantri  
 Juni 2014

NO	NAMA PENYUSUN	JENIS HIBURAN	LOKASI	NOI 2014	KELOMPOK
1	MAHA BERTALAN	KABARE	A. A. Tegal No. 14 Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000001/2014	Kelembagaan Tahun 2014
2	WINDA BERTALAN	KABARE	A. SA. Yogyakarta No. 14 B. 01-02 Jendang Wirata	506.1.114.02000002/2014	Kelembagaan Tahun 2014
3	MARCHE BERTALAN	KABARE	A. Raya Sragen No. 11-08 No. 08 Jempang 1/08	506.1.114.02000003/2014	Kelembagaan Tahun 2014
4	PLANET BERTALAN	KABARE	Bulan P3 Blok A & B. 14	506.1.114.02000004/2014	Kelembagaan Tahun 2014
5	PERFORM BERTALAN	KABARE	A. 40 Jendang No. 4	506.1.114.02000005/2014	Kelembagaan Tahun 2014
6	PITA HANAFIYAH	KABARE	A. SA. Yogyakarta Blok C No. 8	506.1.114.02000006/2014	Kelembagaan Tahun 2014
7	SOLOBO ( BERTALAN MENDIRI)	KABARE	A. SA. Yogyakarta Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000007/2014	Kelembagaan Tahun 2014
8	SOLOBO BERTALAN	KABARE	Kemp. Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000008/2014	Kelembagaan Tahun 2014
9	REJOJO BAKAR FLAME	KABARE	A. SA. Yogyakarta No. 14 B. Jendang Wirata	506.1.114.02000009/2014	Kelembagaan Tahun 2014
10	P. WINDY FORD MICHONELA	KABARE	Bulan (Gedung Bantulman) Sragen Blok E (No. 5 & 7)	506.1.114.02000010/2014	Kelembagaan Tahun 2014
11	DAVID BAKARAU (HOTEL)	KABARE	A. Jendang A. Yogyakarta No. 11/01/01 Jendang Wirata	506.1.114.02000011/2014	Kelembagaan Tahun 2014
12	IMPACT HOTEL	KABARE	A. Raya Sragen Blok B (No. 11 & 12)	506.1.114.02000012/2014	Kelembagaan Tahun 2014
13	NEW LA HOTEL	KABARE	A. SA. Yogyakarta No. 07 Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000013/2014	Kelembagaan Tahun 2014
14	REJOJO HOTEL	KABARE	A. Raya Sragen No. 14 Jendang Wirata	506.1.114.02000014/2014	Kelembagaan Tahun 2014
15	URABANA (HOTEL)	KABARE	A. Raya Sragen No. 07 Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000015/2014	Kelembagaan Tahun 2014
16	SOLOBO FAMILY	KABARE	A. Raya Sragen No. 07 Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000016/2014	Kelembagaan Tahun 2014
17	SOLOBO MANSION	KABARE	A. Bantul (Gedung Bantulman) Sragen Blok E (Gedung)	506.1.114.02000017/2014	Kelembagaan Tahun 2014
18	STYLISTE	KABARE	A. SA. Yogyakarta No. 13 No. 7 Jendang Wirata	506.1.114.02000018/2014	Kelembagaan Tahun 2014
19	THE BURNER BARATAU (HOTEL)	KABARE	A. Yogyakarta No. 08 (Gedung)	506.1.114.02000019/2014	Kelembagaan Tahun 2014
20	THE BURNER LALON	KABARE	A. Raya Sragen Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000020/2014	Kelembagaan Tahun 2014
21	IMPACT MALL	KABARE	Kemuning Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000021/2014	Kelembagaan Tahun 2014
22	PARADISEMAN	KABARE	Kemuning Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000022/2014	Kelembagaan Tahun 2014
23	FAMILY	KABARE	Musik (Gedung)	506.1.114.02000023/2014	Kelembagaan Tahun 2014
24	SOLOBO	KABARE	Kemuning Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000024/2014	Kelembagaan Tahun 2014
25	SOLOBO	KABARE	Kemuning Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000025/2014	Kelembagaan Tahun 2014
26	MUSIK	KABARE	Kemuning Bantulman (Gedung)	506.1.114.02000026/2014	Kelembagaan Tahun 2014
27	KLAMBA	KABARE	Publi (Gedung)	506.1.114.02000027/2014	Kelembagaan Tahun 2014
28	LALON	KABARE	Publi (Gedung)	506.1.114.02000028/2014	Kelembagaan Tahun 2014
29	LALON	KABARE	Publi (Gedung)	506.1.114.02000029/2014	Kelembagaan Tahun 2014
30	SOLOBO	KABARE	Publi (Gedung)	506.1.114.02000030/2014	Kelembagaan Tahun 2014

Daftar, Juni 2014  
 Departemen Hiburan

DAFTAR HIBURAN  
 NO. 11/01/01 JENDANG WIRATA

292 PT SUN KOREA ENGINEERING INDONESIA	1	0	1				
293 PT THREE WIN	0	1	1				
294 PT WOOJIN ELECTRO-MTE INDONESIA	3	0	3				
295 PT Y-KOSTEEL	7	1	8				
296 PUTRA TABONG PT	1	0	1				
297 REDCOO-PETROLIN UTAMA PT	1	0	1				
298 REDWOOD INDONESIA PT	2	0	2				
299 S RICH TECH PT	2	0	2				
300 SARAH ELECTRIC CO	7	2	9				
301 SARYU INDONESIA INTERNATIONAL PT	2	0	2				
302 SARAH ASTARA	1	0	1				
303 SEL ENGINEERING CO.LTD	6	0	6				
304 SEL ENGINEERING CO., LTD	16	0	16				
305 SEL ENGINEERING CO., LTD	6	0	6				
306 SHINGO PLANTECH PT	1	0	1				
307 SHINGO PLANTECH PT	16	0	16				
308 SHOWA ESTERINDO INDONESIA PT	1	0	1				
309 SEMENT INDONESIA PT	31	0	31				
310 SRI SUKSES PONDOK	1	0	1				
311 SUKAM	1	0	1				
312 SULFINDO AERUNAVA PT	1	0	1				
313 TDI SURABAYA	1	0	1				
314 TOPS BRIDGE CO., LTD	1	0	1				
315 UNEDCO PT	2	0	2				
316 WAHANA ERA METAL PT	1	0	1				
317 WINTECO INDONESIA PT	3	0	3				
318 Y-KOSTEEL PT	2	0	2				
319 YATASAN PENCORUAN SINGAPURA ASIA	0	1	1				
320 YATASAN PENCORUAN SINGAPURA ASIA	1	0	0				
321 YONHAB DEVELOPMENT CO.LTD	6	0	6				
322 ZENACITY RAYA PT	0	0	0				
TOTAL	218	24	242				



221 PT. SEMPURNA MAKSUD SENTOSA	1	0	1				
222 PT. SECHIE INDONESIA	11	3	13				
223 PT. SINAR PROFESSIONAL INDONESIA	1	0	1				
224 PT. SNC LAKUN TPS	1	0	1				
225 PT. SONG INDO MULIA	1	0	1				
226 PT. STYRON INDONESIA	0	2	0				
227 PT. SUBE PELUKI BAPU SEMESTA	2	2	4				
228 PT. SUGA INDONESIA	1	0	1				
229 PT. TEKNO INDONESIA	14	1	15				
230 PT. TEKNO ARTHA MANEJO	1	0	1				
231 PT. THE BEST OF ASIA ENERGY	0	0	0				
232 PT. THREE WIN	1	0	1				
233 PT. TO DAM GOI, LESTARI	0	2	2				
234 PT. TRILINK INDONESIA	1	0	1				
235 PT. TITRE MECH-ELECTECH INDONESIA	1	0	1				
236 PT. TUV NORD INDONESIA	1	0	1				
237 PT. UNGGUL INDAH CAHAYA TSK	1	1	2				
238 PT. WISAN TEKNIK PERDAMA	1	0	1				
239 PT. WUJAYA INDAH ARADI ENTAL	3	0	3				
240 PT AIR LIQUIDE INDONESIA	0	0	0				
241 PT ALSTON POWER ENERGY SISTEM INDC	2	0	2				
242 PT AMOCO MITSUI PTA INDONESIA	1	0	1				
243 PT BALAJA TEKNIK REKATAMA	0	1	1				
244 PT BANTEN LINTAS SAMUDERA	2	0	2				
245 PT CARMA NUSANTARA	1	0	1				
246 PT CHONG RO INDONESIA	1	0	1				
247 PT CHOSUN INTERNATIONAL INDONESIA	3	0	3				
248 PT CLEGON FABRICATORS	21	0	21				
249 PT DAERYEONG PLASTIC	3	0	3				
250 PT DELTA JASATAMA INDONESIA	4	0	4				
251 PT DOK PULO AMPIL	3	0	3				
252 PT DONGSHI EAC	0	0	0				
253 PT DONGYANG INDONESIA	11	0	11				
254 PT GOLDEN GRAND MILLS	14	0	14				
255 PT HARRISON WALKER REFRACTORIES	1	0	1				
256 PT A. JUNG ENGINEERING	0	0	0				
257 PT INDONESIA POC CHEMTECH CHOSUN I	10	4	20				
258 PT INDONESIA POC CHEMTECH CHOSUN II	1	0	1				
259 PT JAHERMUSA	2	0	2				
270 PT JEL 211	1	0	1				
271 PT JOC INDONESIA	1	0	1				
272 PT KO ONE INDONESIA	1	0	1				
273 PT KRATAU DAEDONG MACHINERY	4	0	4				
274 PT LEEGUN MACHINERY ELECTRICITY IND	4	0	4				
275 PT PETROTECH INDO ENGINEERING	13	1	14				
276 PT POSCO EAC INDONESIA	20	4	30				
277 PT POSCO ICT INDONESIA	100	0	100				
278 PT POSCO ICT INDONESIA	0	1	0				
279 PT POWOO EAC INDONESIA	1	0	1				
280 PT POWOO EAC INDONESIA	0	1	0				
281 PT REDWOOD INDONESIA	3	0	3				
282 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL	0	1	0				
283 PT SE JON GLOBAL	0	0	0				
284 PT SENTRA USAHATAMA	1	0	1				
285 PT SHOWA ESTERINDO INDONESIA	0	0	0				
286 PT SIEMENS INDONESIA	7	0	7				
287 PT STAGIARD TOYO POLYMER	0	0	0				
288 PT STEEL SCAFFING AND CLITTING INDO	0	1	1				
289 PT STOLLBERG SAKIL INDONESIA	1	1	2				
290 PT STOLLBERG SAKIL INDONESIA	2	0	2				
291 PT SUCCESS WINNER TECH	1	0	1				

170 PT. GEOSUNG ENG	1	0	1			
171 PT. HARAPAN TEKNIK SHIPYARD	1	0	1			
172 PT. IKEDA INDONESIA	1	0	1			
173 PT. IKEDA INDONESIA	1	0	1			
174 PT. S. JUNO ENGINEERING	3	0	3			
175 PT. IN DONG YANG	1	0	1			
176 PT. INDOFERRO	36	1	37			
177 PT. INDRAM PETROCHEMICALS	1	0	1			
178 PT. JAHENKOSA	36	0	36			
179 PT. JAKARTA BRIDGE	1	0	1			
180 PT. JAWAHANG RAFNABI	27	0	27			
181 PT. JAYA HANOHANG & C	1	0	1			
182 PT. JCC INDONESIA	1	0	1			
183 PT. JIN SUNG INDONESIA	4	0	4			
184 PT. KAN JAYA ABADI	0	2	2			
185 PT. KRAXATAU ARGO LOGISTICS	1	0	1			
186 PT. KRAXATAU BLUE WATER	1	0	1			
187 PT. KRAXATAU DAEDONG MACHINERY	3	1	4			
188 PT. KRAXATAU POS-CHEM DONG-SUN CHE	3	1	4			
189 PT. KRAXATAU PTC	239	47	286			
190 PT. KRAXATAU POSCO CHEMTECH CALOR	8	5	13			
191 PT. KRAXATAU POSCO ENERGY	7	2	9			
192 PT. KRAXATAU POSCO POWER	1	0	1			
193 PT. KRAXATAU POSCOPOWER	1	0	1			
194 PT. LATRUSA, TSK	1	0	1			
195 PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL	1	0	1			
196 PT. LEGUN MACHINERY ELECTRICITY INC	3	0	3			
197 PT. LINDI INDONESIA	2	0	2			
198 PT. LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA	1	0	1			
199 PT. MAMMOET INDONESIA	14	0	14			
200 PT. MC PET FILM INDONESIA	3	0	3			
201 PT. MCA INDONESIA	2	0	2			
202 PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA	18	0	18			
203 PT. MULIA PRIMA PERMAN	1	0	1			
204 PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA	80	2	82			
205 PT. NORTHEAST ELECTRIC POWER CONDI	22	0	22			
206 PT. NIP MARINE	1	0	1			
207 PT. NURI OIL INDONESIA	0	1	1			
208 PT. NA INDONESIA	1	0	1			
209 PT. ONSHORE CONSTRUCTION INDONESIA	10	0	10			
210 PT. PABE SAJA RAYA UTAMA	1	0	1			
211 PT. PELAT TIMAH NUSANTARA TSK	5	0	5			
212 PT. PERLITE INDONESIA ABADI	1	0	1			
213 PT. PHAROS DEVELOPER	2	0	2			
214 PT. POSCO-ICT INDONESIA	4	0	4			
215 PT. POSCO-MTECH INDONESIA	2	1	3			
216 PT. POSCO PLANTEC	1	0	1			
217 PT. POWOO E & C INDONESIA	1	0	1			
218 PT. POWOO E & C INDONESIA	11	0	11			
219 PT. PURDI KENCANA	1	1	2			
220 PT. PURNA SAJA HARSCO	4	0	4			
221 PT. RC GREASE & LUBRICANTS	1	0	1			
222 PT. REDCOO PETROLIN UTAMA	0	1	1			
223 PT. REDWOOD INDONESIA	1	0	1			
224 PT. S WON TECH	1	0	1			
225 PT. SAMJIN ELECTRIC CO	1	0	1			
226 PT. SANGJORA MARINE INDONESIA	3	1	4			
227 PT. SANGYU INDONESIA INTERNATIONAL	43	3	46			
228 PT. SANTHYOGA	1	0	1			
229 PT. SEJUHTERA MULYA CITRA	1	0	1			
230 PT. SEMEN JAKARTA	3	0	3			

108	PT DRESSER HAND SERVICE INDONESIA	1	0	1					
110	PT DUTA SUGAR INTERNATIONAL	2	1	3					
111	PT FAJAR EKA INDOYAMA	1	0	1					
112	PT GUNANUSA UTAMA FABRIKATORS	1	0	1					
113	PT H&E UN D&E INDONESIA	0	2	2					
114	PT HARAPAN TEKNIK SHIPYARD	0	0	0					
115	PT S. JUNO ENGINEERING	0	0	0					
116	PT HO DONG YANG	0	2	11					
117	PT INDRAMAYA PETROCHEMICALS	10	0	10					
118	PT JAKARTA BRIDGE	1	0	1					
119	PT JAWAHIRI KAPINASI	10	0	10					
120	PT JE & TECH INDONESIA	3	1	4					
121	PT JE N TECH INDONESIA	1	0	1					
122	PT KRAGATAU POSCO CHEMTECH CALOR	0	0	0					
123	PT KARYA TEKNIK UTAMA	2	0	2					
124	PT KONTEC ENGINEERING	4	0	4					
125	PT KRAGATAU POSCO CHEMTECH CALOR	3	0	3					
126	PT KRAGATAU STEEL	22	0	22					
127	PT KRYA TEHNK UTAMA	12	0	12					
128	PT KRINO INDONESIA	0	0	0					
129	PT KRT INDONESIA	1	0	1					
130	PT LINDI INDONESIA	20	1	20					
131	PT MERAK ENERGI INDONESIA	1	0	1					
132	PT MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA	2	0	2					
133	PT NINDA FOOD INDONESIA	1	0	1					
134	PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA	3	0	3					
135	PT NORTHEAST ELECTRIC POWER CONEY	12	0	12					
136	PT PETROKIMA BUTADIENE INDONESIA	1	0	1					
137	PT PETROTECH ADO ENGINEERING	4	0	4					
138	PT PIPE COATING INDONESIA	3	0	3					
139	PT POLYHEM INDONESIA	1	0	1					
140	PT POLYHEM INDONESIA TRK	4	0	4					
141	PT PUNDI KENCANA	5	0	5					
142	PT RC GREASE & LUBRICANTS	1	0	1					
143	PT S WOK TECH	1	0	1					
144	PT SAKLEDA MARINE INDONESIA	2	1	4					
145	PT SALTANATA INDAH WOODBASED INDU	1	0	1					
146	PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA	0	0	0					
147	PT SEONES INDONESIA	0	1	1					
148	PT SIEMENS INDONESIA	4	0	4					
149	PT SINAR PROFESIONAL INDONESIA	0	0	0					
150	PT SULFINO ADUSAWA	0	1	1					
151	PT TEKNIK INDONESIA	0	0	0					
152	PT WISMA TEKNIK PERDANA	1	1	2					
153	PT WOODRI ELECTRO NITE INDONESIA	1	0	1					
154	PT Y-ADSTEEL	0	1	0					
155	PT YOO HAN ELECTRIC AND CONSTRUCT	2	0	2					
156	PT. ABB SAKTI INDUSTRI	10	0	10					
157	PT. AIR LIQUID INDONESIA	0	0	0					
158	PT. ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS IN	1	0	1					
159	PT. ANGEL PANGUN TAMB	1	0	1					
160	PT. BAJA TEHNK ROKATAMA	2	0	2					
161	PT. CARNA NUSANTARA	1	0	1					
162	PT. DAEHYEONG PLANTEC	0	0	0					
163	PT. DAEHYUNG HEAVY HEAVY INDUSTRIES	4	2	6					
164	PT. DELTA JASATAMA INDONESIA	1	0	1					
165	PT. DONJUN INDONESIA	1	0	1					
166	PT. DURI BUMI KONSTRUKSI	0	1	0					
167	PT. DURI BUMI KONSTRUKSI	2	0	2					
168	PT. FAJAR EKA INDOYAMA	1	0	1					
169	PT. FU TA ENGINEERING INDONESIA	0	0	0					

48 HIRAWOONG ELECTRIC CO., LTD.	14	0	14				
49 HO DONG YANG PT	8	0	8				
50 INDO SEVEN OCEAN, PT	3	1	4				
51 INDOFERRO PT	72	0	72				
52 INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN REF	10	2	12				
53 INDORAMA PETROCHEMICALS PT.	108	3	111				
54 INDORAMA POLYPET INDONESIA PT.	3	0	3				
55 INDO TRUJAYA MANUR PT.	1	0	1				
56 ISNAEM	2	0	2				
57 JAWAHANG RAFFAZI PT	2	0	2				
58 JE N TECH INDONESIA	1	0	1				
59 JETANDERLUT SINH	0	1	1				
60 KARYA TEKNIK LAHARNO PT	3	0	3				
61 KARYA TEKNIK UTAMA PT	1	0	1				
62 KARYA TEKNIK UTAMA PT	3	0	3				
63 KOKUSAI KEISO INDONESIA PT	5	0	5				
64 KOKUSAI KEISO INDONESIA, PT	1	0	1				
65 KPMS INDONESIA PT	1	0	1				
66 KRAKATAU DAEDONG MACHINERY PT	0	3	3				
67 KRAKATAU ENGINEERING PT	1	0	1				
68 KRAKATAU POSCO PT	83	34	87				
69 KRAKATAU POSCO PT.	0	1	1				
70 MAARDET INDONESIA	3	0	3				
71 MAARDET INDONESIA PT.	8	0	8				
72 MCC CAPITAL ENGINEERING RESEARCH &	1	0	1				
73 MCC CAPITAL ENGINEERING & RESEARCH	2	0	2				
74 MIKWANG INSTRUMENT & ELECTRIC CO., I	1	0	1				
75 MIKWANG INSTRUMENT & ELECTRIC CO., I	8	0	8				
76 MITSUBISHI CORPORATION	10	0	10				
77 MK TRADING & CONSUA TRG PT	2	0	2				
78 MOHAMAD ALI HASAN	0	2	2				
79 MULIA PRIMA PERMAI PT	0	2	2				
80 MULIA TIARA SUKSES INDONESIA PT	1	0	1				
81 MYONG KWANG PT	1	0	1				
82 NIPPON SHOKUSAI INDONESIA PT	48	1	52				
83 NIPPON SHOKUSAI INDONESIA PT.	2	0	2				
84 NURI C & I INDONESIA	1	0	1				
85 NURI C & I INDONESIA PT	2	0	2				
86 NX INDONESIA PT	2	0	2				
87 ONSHORE CONSTRUCTION COMPANY PVT	1	0	1				
88 PELAT TRAH NUSANTARA TSK PT	8	2	7				
89 PERLITE INDONESIA ABADI PT	3	0	3				
90 PESANTREN MODERN AL-FURQON	1	0	1				
91 POLYCHEM INDONESIA TSK PT	13	2	15				
92 POSCO A & C CO., LTD.	3	0	3				
93 POSCO A & C CO., LTD	12	3	15				
94 POSCO PLANT ENGINEERING CO., LTD	12	0	12				
95 POWOO S&C CO., LTD	0	3	3				
96 PT ASE SAKTI INDUSTRI	2	0	2				
97 PT AIR LIQUIDE INDONESIA	2	0	2				
98 PT ALLOY MANUFACTURING INDONESIA	1	0	1				
99 PT ARCOPLATE INDONESIA	2	0	2				
100 PT BAJA TEKNIK REKATAMA	2	0	2				
101 PT BUKANA TEKNIK UTAMA	2	0	2				
102 PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TSK	4	0	4				
103 PT CHOSUN INTERNASIONAL INDONESIA	2	0	2				
104 PT CLEGGON FABRICATORS	4	0	4				
105 PT DAEHYONG PLANTEC	11	3	14				
106 PT DAEHYONG PLANTEC	1	0	1				
107 PT DAEHYONG INDAH HEAVY INDUSTRY	0	2	2				
108 PT DOK PULO AMPIL	0	0	0				

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
 DIREKTORAT JENDERAL MIGRASI  
 JL. RAYA MERAK KM 11B  
 KP. TEGAL WANGI  
 PAJ. 6254 - 67853  
 TELP. 6254 - 672818

LAPORAN STATISTIK UIN TINGGAL TERBATAS BERDASARKAN SPONSOR

KANTOR WILAYAH BARTEN

KANTOR MIGRASI KLAS E CILEGON

TANGGAL : 01-01-2013 S/D 31-03-2014

NO.	PELJAMIN	JUMLAH		
		L	P	L+P
1	ABB SAKTI INDUSTRI PT	2	0	2
2	AMOCO MITSUBI PTA INDONESIA PT	1	0	1
3	AMOCO MITSUBI PTA INDONESIA PT	1	0	1
4	BLACK & VEATCH INTERNATIONAL COMPA	3	0	3
5	BNK INDONESIA PT	0	1	1
6	BUKANA TEKNIK UTAMA PT	1	0	1
7	BUT NORTHEAST NO.2 ELEKTRONIC POWE	1	0	1
8	BYUCKSAN ENGINEERING CO., LTD	2	0	2
9	BYUCKSAN ENGINEERING CO.,LTD	1	0	1
10	CERESTAR FLOUR MILLS PT	2	0	2
11	CERESTAR FLOUR MILLS PT	2	0	2
12	CHINA NATIONAL TECHNICAL I&E CORP	1	0	1
13	CILEGON FABRICATORS PT	9	4	13
14	CILEGON FABRICATORS PT	24	0	24
15	CJ KOREA EXPRESS SERVICE INDONESIA	1	0	1
16	DARAH E & C INDONESIA PT	36	0	36
17	DAEYUK INDUSTRY CO.LTD	2	0	2
18	DAEYUONG PLANTEC PT	9	1	10
19	DAEYUNG INDAH HEAVY INDUSTRY PT	1	0	1
20	DAEYUNG INDAH HEAVY INDUSTRY PT	2	0	2
21	DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CC	1	0	1
22	DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CC	1	0	1
23	DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CC	3	0	3
24	DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CC	2	0	2
25	DEA WOONG ELECTRICAL CO., LTD.	8	0	8
26	DEA WOONG ELECTRICAL CO.,LTD	2	0	2
27	DEAWOONG ELECTRICAL CO.,LTD	1	0	1
28	DOK PUJO AMPEL PT	17	0	17
29	DONGHWA LIMITED PARTNERSHIP	2	0	2
30	DONGIN E & C PT	1	0	1
31	DONGJUN INDONESIA PT	1	0	1
32	DONGJUN INDONESIA PT	1	0	1
33	DONGYANG INDONESIA PT	4	0	4
34	ENGLISH FIRST	1	0	1
35	ENVIRONMENT TECHNICAL SERVICE PT	1	0	1
36	EPSCO S.R.L.	10	0	10
37	FACTOENG JAYA INDONESIA PT	3	0	3
38	FAJAR ERA INDOYAMA PT	1	0	1
39	FICMA REPRESENTATIVE PT	1	0	1
40	FUTAI ENGINEERING INDONESIA PT	5	0	5
41	GAMAH TINGGAL TSK PT	2	5	7
42	GUNAWASA UTAMA FABRICATORS PT	2	2	4
43	GURMYONG INDUSTRIAL CO.,LTD	3	0	3
44	HARBISON WALKER REFRACTORIES PT	1	0	1
45	IKHYA PERSADA PT	2	0	2
46	VERNARIATI	1	0	1
47	HOSAN EXCELLENT KORDKO PT	1	1	2

**14 Tahun Kota Cilegon**  
**Wujudkan Program Pro Rakyat**  
**Menuju Cilegon Sejahtera**

PEMERINTAH  
KABUPATEN  
CILEGON

**LAMPIRAN 8**  
Catatan Lapangan

## CATATAN LAPANGAN

No.	Tanggal	Waktu	Tempat	Informan	Hasil
1	05/03 /2015	17.20	Kp. Lijajar Kel. Tegal ratu	Bpk. Abdul Muhit	Wawancara
2	31/03 /2015	08.30	Kantor Dinsos	Bpk. Romli	Wawancara dan buku profil
3	05/06 /2015	10.30	Kantor Disnaker	Bpk. Wawan	Wawancara dan proker bid. Penta
4	03/09 /2015	13.39	Kantor Kec. Ciwandan	Bpk. Sufendi S.	Wawancara
5	03/09 /2015	16.44	Komp. Sinyar	Bpk. spendi	Wawancara
6	03/09 /2015	17.24	Komp. Sinyar	Bpk. Untung	Wawancara



## CATATAN LAPANGAN

Rabu, 05 Maret 2015

Kedatangan peneliti disambut hangat oleh informan yaitu penduduk Kelurahan Tegal Ratu (I<sub>8-6</sub>) yang dua hari sebelumnya sudah janji untuk dijadikan informan atas rekomendasi dari Kelurahan Tegal ratu pada bulan September 2014. Pada setengah wawancara mesti terpotong karena solat magrib, sehingga dilanjutkan setelah magrib, dan lagi-lagi pada <sup>3</sup>/<sub>4</sub> wawancara mesti terpotong karena informan menerima telepon dan ijin keluar sebentar (15 menit), sehingga pertanyaan yang belum sempat terjawab teralihkan. Selain itu informan sepertinya cukup hati-hati dalam menjawab tiap pertanyaan, dan terkadang ada ketidakjelasan dalam memaparkannya. Tampaknya ada kehati-hatian terutama menyangkut PT. Krakatau Posco.

**LAMPIRAN 9**  
Lembar Bimbingan

**LAMPIRAN 10**  
Dokumentasi Kegiatan Wawancara

## DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Romli  
Sekertaris Dinas Sosial



Wawancara dengan Bapak Sufendi  
Satim kepala Seksi Tata Pemerintahan  
Kecamatan Ciwandan



Wawancara dengan Bapak Untung  
Masyarakat sekitar PT.KP

**LAMPIRAN 11**  
Daftar Riwayat Hidup

# RIWAYAT HIDUP

## 1. Identitas Pribadi

Nama : Afifatun Nisa  
NIM : 6661090710  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Grenyang Pelabuhan Desa Argawana  
Kec. Puloampel Kab. Serang 42455  
Email : [afi.fatunnisa@yahoo.com](mailto:afi.fatunnisa@yahoo.com)  
[Epipatun.nisa@gmail.com](mailto:Epipatun.nisa@gmail.com)

## 2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ma'mun Djamhari  
Nama Ibu : Artatiah

## 3. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Sumur Wuluh (1996)  
SD Negeri Buah Gede 1 (1997-2002)  
SMP : SMP Negeri 1 Bojonegara (2002-2005)  
SMA : SMA Al-islah Kota Cilegon (2005-2008)  
Perguruan Tinggi (S1) : Ilmu Adm. Negara- UNTIRTA (2009-2016)

## 4. Riwayat Organisasi

LDK Babussalam UNTIRTA periode 2009-2010 sebagai Staf Kesekretariatan  
Fosmai FISIP UNTIRTA tahun 2013 sebagai Bendahara Umum  
TRAS (*Tirtayasa Research and Academic Society*) sebagai Anggota